



*Laporan Lapangan*

# **Studi Kredit Kecil Perkotaan Di Kabupaten Kulon Progo, D.I. Yogyakarta**

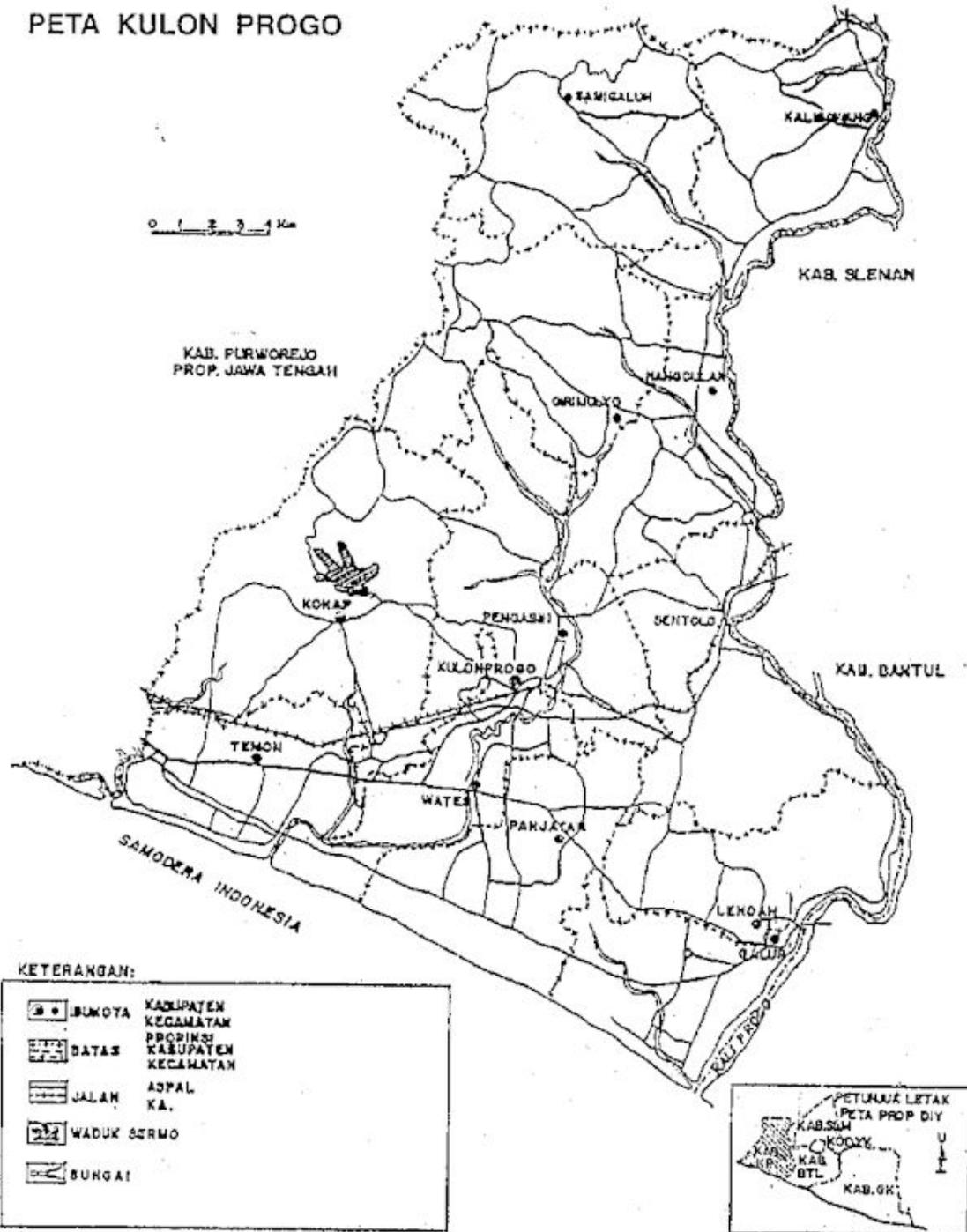
Temuan, pandangan dan interpretasi dalam laporan ini digali oleh masing-masing individu dan tidak berhubungan atau mewakili Lembaga Penelitian SMERU maupun lembaga-lembaga yang mendanai kegiatan dan pelaporan SMERU. Untuk informasi lebih lanjut, mohon hubungi kami di nomor telepon: 62-21-336336; Fax: 62-21-330850; E-mail: [smeru@smeru.or.id](mailto:smeru@smeru.or.id); Web: [www.smeru.or.id](http://www.smeru.or.id)

**Hastuti  
Akhmadi**

Laporan dari Lembaga  
Penelitian SMERU, dengan  
Dukungan dari AusAID dan  
Ford Foundation

**6 Maret, 2001**

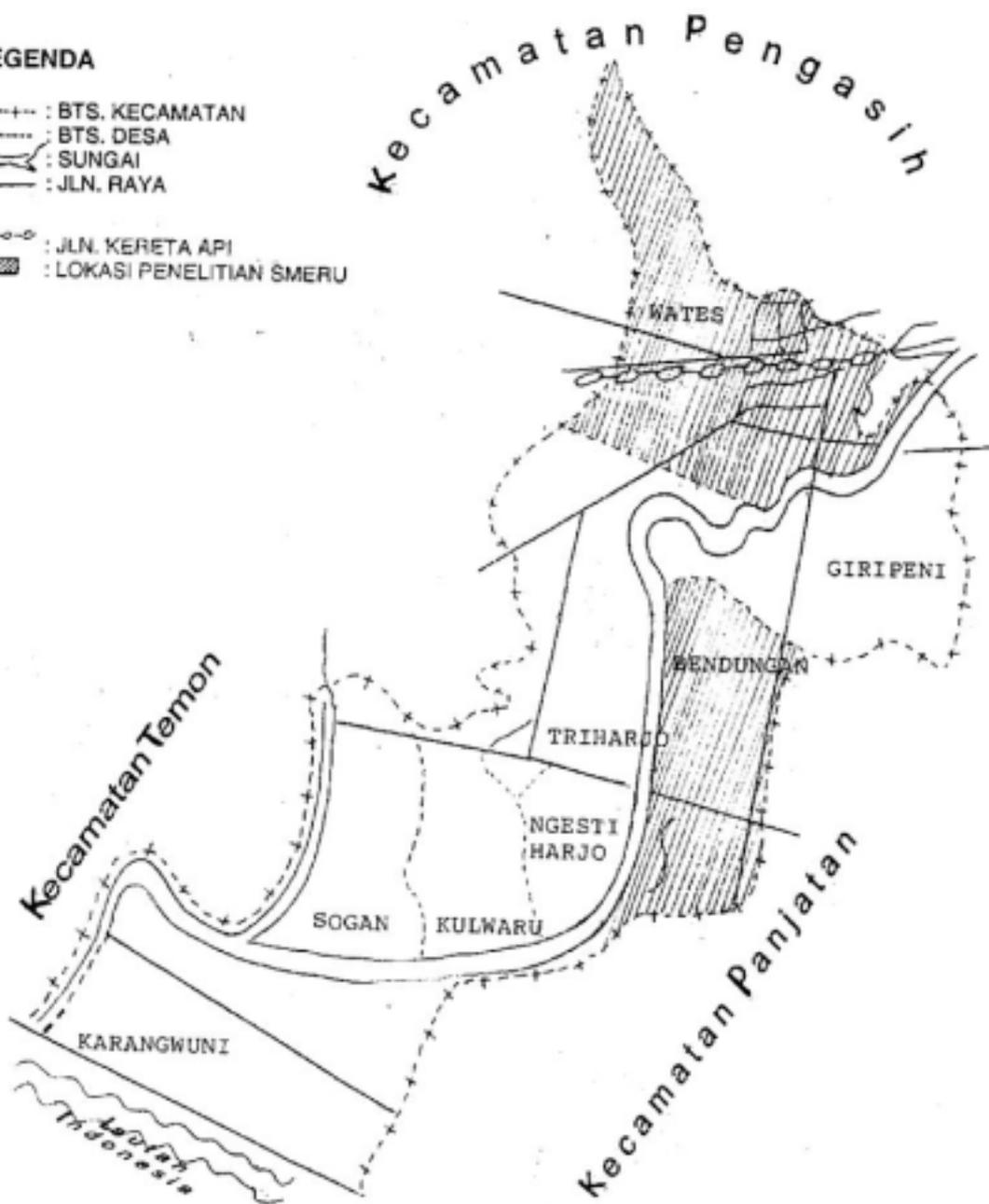
# PETA KULON PROGO



# PETA KECAMATAN WATES

## LEGENDA

- +---+ : BTS. KECAMATAN
- : BTS. DESA
- ~~~~~ : SUNGAI
- : JLN. RAYA
- : JLN. KERETA API
- ▨ : LOKASI PENELITIAN SMERU



## DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN	4
II.	KARAKTERISTIK DAERAH PENELITIAN	5
	Gambaran Umum Wilayah	5
	Struktur Sosial Ekonomi Masyarakat	8
	Dinamika Masyarakat Selama Krisis	11
III.	SKEMA KREDIT YANG TERSEDIA	13
	Kredit Formal	13
	Kredit Informal	34
	Kredit Program	41
IV.	AKSES, HAMBATAN DAN PILIHAN MASYARAKAT TERHADAP JENIS KREDIT	54
	Akses	54
	Hambatan	57
	Pilihan	58
V.	KEBERADAAN KREDIT PERKOTAAN DI MASA KRISIS	59
VI.	KESIMPULAN	61

## DAFTAR PETA

1. Peta Kabupaten Kulon Progo
2. Peta Kecamatan Wates

## DAFTAR TABEL

1. Penduduk, dan Jarak Desa di Kecamatan Wates
2. Banyaknya Rumahtangga Menurut Sektor Ekonomi Pekerjaan Utama Kepala Keluarga di Desa Penelitian
3. Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Tahapan Keluarga Sejahtera
4. Perbedaan Harga Input Output Akibat Krisis di Sebuah Industri Tahu di Desa Bendungan
5. Perkembangan Pinjaman, Tunggakan, dan Simpanan di BRI Unit di Kecamatan Wates
6. Jumlah Tabungan, Penyaluran Kredit, Sisa Kredit dan Kredit Bermasalah di Bank Pasar Kabupaten Kulon Progo, Tahun 1995 – 1999.
7. Jumlah Penyaluran dan Sisa Kredit Bank Pasar di Dua Desa Penelitian
8. Perkembangan Tabungan, Deposito dan Outstanding Kredit di BPR Shinta Putra Kulon Progo
9. Jumlah Nasabah dan Kredit Baru BKD di Desa Wates
10. Tingkat Suku Bunga di Kantor Pegadaian Wates
11. Perkembangan Jumlah Nasabah menurut golongan di Kantor Pegadaian Wates
12. Perkembangan Omzet Kredit yang Disalurkan Kantor Pegadaian Wates
13. Perkembangan Jumlah Piutang dan Tabungan di BUKP Kec. Wates
14. Pentahapan Skema Kukesra
15. Realisasi Penyaluran Kukesra di Kecamatan Wates dan Kabupaten Kulon Progo
16. Laporan Perkembangan PDM-DKE Tahun Anggaran 1998/1999 di Desa Bendungan
17. Realisasi Penyaluran KUT di KUD Bangun dan di Kabupaten Kulon Progo
18. Perubahan Suku Bunga Kupedes BRI, Maret 1998 – Oktober 2000

## DAFTAR BOX

1. Kios yang terlibat dalam kredit jaringan sekaligus pemberi pinjaman
2. Ibu rumah tangga yang meminjam dari beberapa sumber
3. Pengusaha tahu yang menjadi nasabah beberapa lembaga kredit

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Sumber Informasi di Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi Penelitian
2. Skema Kredit Formal, Program dan Informal, serta Tahun Mulai Beroperasi di Wilayah Penelitian

## DAFTAR SINGKATAN

APBD	=	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	=	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Bappeda	=	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
BKD	=	Badan Kredit Desa
BKKBN	=	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
BKM	=	Badan Keswadayaan Masyarakat
BNI	=	Bank Negara Indonesia
BPD	=	Bank Pembangunan Daerah
BPKB	=	Buku Pemilik Kendaraan Bermotor
BPR	=	Bank Perkreditan Rakyat
BRI	=	Bank Rakyat Indonesia
BUKP	=	Badan Usaha Kredit Pedesaan
Golbertap	=	Golongan Berpenghasilan Tetap
IPTW	=	Insentif Pembayaran Tepat Waktu
KUB	=	Kelompok Usaha Bersama
KK	=	Kepala Keluarga
KPS	=	Keluarga Pra Sejahtera
KS-I	=	Keluarga Sejahtera I
KSM	=	Kelompok Swadaya Masyarakat
KTP	=	Kartu Tanda Penduduk
Koppas	=	Koperasi Pasar
KPKU	=	Kredit Pengembangan Kemitraan Usaha
KUD	=	Koperasi Unit Desa
Kukesra	=	Kredit Usaha Kesejahteraan Keluarga
Kupedes	=	Kredit Usaha Pedesaan
KKLKMD	=	Kelompok Kerja Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa
LKMD	=	Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa
P2KP	=	Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan
P3A	=	Perhimpunan Petani Pemakai Air
PBB	=	Pajak Bumi dan Bangunan
PKK	=	Program Kesejahteraan Keluarga
PDKMK	=	Program Penanggulangan Dampak Krisis dan Mengatasi Kekeringan
PDM-DKE	=	Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi
RT	=	Rukun Tetangga
RW	=	Rukun Warga
SHU	=	Sisa Hasil Usaha
SMERU	=	Social Monitoring and Early Response Unit
SK	=	Surat Keputusan
STNK	=	Surat Tanda Nomor Kendaraan
Takesra	=	Tabungan Keluarga Sejahtera
UEDSP	=	Usaha Ekonomi Desa Simpan-pinjam
UPPKA	=	Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor
UPPKS	=	Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera

## I. PENDAHULUAN\*

Daerah perkotaan mengalami dampak krisis yang jauh lebih parah dibandingkan dengan daerah perdesaan<sup>1</sup>. Dalam kondisi seperti ini diduga krisis ekonomi akan berpengaruh terhadap keberadaan kredit di daerah perkotaan. Oleh karena itu setelah melakukan penelitian tentang kredit kecil di perdesaan, Tim Dampak Krisis SMERU memutuskan untuk melakukan penelitian lapangan terhadap kredit kecil di perkotaan, khususnya dikaitkan dengan krisis moneter

Seperti pada penelitian tentang kredit perdesaan, pengamatan lapangan kredit perkotaan Tim Dampak Krisis SMERU bertujuan untuk memberi gambaran tentang keberadaan kredit, sebelum krisis dan pada masa krisis. Keberadaan kredit perkotaan diperoleh dengan menggali informasi antara lain tentang:

- Jenis kredit yang berlaku di wilayah perkotaan/kelurahan;
- Kapan jenis kredit tersebut diperkenalkan;
- Mekanisme kredit, sumber pendanaan, dan pengelolanya;
- Kinerja masing-masing jenis kredit;
- Jenis kredit perkotaan yang diminati dan yang tidak diminati masyarakat, serta alasannya;
- Manfaat masing-masing jenis kredit bagi masyarakat;
- Kendala yang dihadapi oleh pengguna dan pengelola kredit; dan
- Efektivitas beberapa jenis kredit yang paling dominan di kelurahan tertentu.

Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara semi mendalam dengan menggunakan pedoman pertanyaan sederhana. Diskusi kelompok juga dilakukan pada beberapa kelompok masyarakat. Informasi yang terkumpul dianalisa dengan menggunakan analisa gabungan kualitatif dan kuantitatif berupa tabulasi sederhana.

Pada setiap kelurahan diwawancarai sekitar 20 orang masyarakat, baik pengguna kredit maupun bukan. Selain itu diwawancarai pula beberapa informan kunci seperti pengelola kredit formal, informal dan program, tokoh masyarakat, aparat kelurahan, fasilitator program pemerintah/swasta, kios di pemukiman, dan pedagang di pasar. Di tingkat kecamatan informasi digali dari camat dan aparatnya serta pengelola kredit, sedang di tingkat kabupaten informasi diperoleh dari aparat Pemda, Bappeda, instansi terkait, dan pengelola kredit. Sedangkan di tingkat propinsi diwawancarai aparat Pemda dan pengelola kredit (lihat Lampiran 1).

Tim Dampak Krisis SMERU juga melakukan studi literatur untuk menyusun rencana penelitian, termasuk menentukan lokasi tingkat propinsi hingga kecamatan, agar tidak terjadi tumpang tindih dengan studi yang telah dilakukan oleh lembaga lain.

Mengingat dampak krisis ekonomi di daerah perkotaan dirasakan lebih parah di wilayah Jawa dibanding di luar Jawa maka Jawa ditentukan sebagai lokasi penelitian. Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kemudian dipilih sebagai propinsi penelitian karena

---

\* Pengamatan lapangan dilakukan pada saat SMERU masih di bawah naungan Bank Dunia

<sup>1</sup> Sudarno Sumarto, Anna Wetterberg, dan Lant Pritchett (1988). Dampak Sosial dari Krisis di Indonesia: Hasil Survei Nasional Kecamatan.

merupakan propinsi perkotaan yang paling terkena dampak krisis<sup>2</sup>. Di DIY diambil dua kecamatan perkotaan yang paling terkena dampak krisis, salah satunya yaitu Kecamatan Wates di Kabupaten Kulon Progo. Selanjutnya dua kelurahan atau desa perkotaan dari delapan desa di Kecamatan Wates dipilih berdasarkan diskusi dengan aparat setempat (Pemda, Bappeda dan Kecamatan), dengan pertimbangan desa tersebut terkena dampak krisis dan mewakili wilayah perkotaan, yaitu Desa Bendungan yang juga menjadi ibukota Kecamatan Wates, dan Desa Wates yang terletak di ibukota Kabupaten Kulon Progo.

Penelitian lapangan kredit perkotaan di DIY dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama antara tanggal 8 - 13 September 2000, dalam rangka pengumpulan data sekunder dan informasi awal di tingkat propinsi, kabupaten dan kecamatan. Tahap kedua dilakukan sejak tanggal 26 September hingga 5 Oktober 2000 untuk mengumpulkan data primer dan sekunder di tingkat desa, serta untuk melengkapi berbagai informasi dari tingkat kecamatan dan kabupaten.

## II. KARAKTERISTIK DAERAH PENELITIAN

Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu dari lima kabupaten/kota di Propinsi DIY yang terletak 30 km sebelah barat Kota Yogyakarta. Daerah yang terdiri dari 12 kecamatan ini mempunyai luas wilayah 586,28 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 435.225 jiwa atau 86.749 KK.

Kabupaten ini dapat dikatakan berkembang bila dilihat dari infrastruktur dan perkembangan desanya. Semua ibukota desa dan kecamatan mempunyai akses yang baik terhadap ibukota kabupaten maupun desa/kecamatan lain. Selain itu, berdasarkan kriteria perkembangan desa, semua desa di Kabupaten Kulon Progo yang berjumlah 88 termasuk dalam kriteria desa swasembada<sup>3</sup>. Meskipun demikian jumlah keluarga yang termasuk KPS dan KS1 cukup dominan, yaitu mencapai 62% dari total keluarga<sup>4</sup>.

### Gambaran Umum Wilayah

Kecamatan Wates terdiri dari delapan desa dengan luas wilayah 3.200 ha dan jumlah penduduk 45.789 jiwa. Kepadatan penduduk mencapai 14,31 jiwa/ha atau 2,81 rumahtangga/ha (lihat Tabel 1).

Kecamatan Wates adalah satu dari dua kecamatan yang sebagian wilayahnya masuk dalam ibukota Kabupaten Kulon Progo. Empat dari delapan desa yang dimilikinya, yaitu Desa Wates, Bendungan, Giri Peni, dan Desa Ngestiharjo, merupakan desa yang berkarakteristik daerah perkotaan dilihat dari ketersediaan sarana dan prasarana transportasi, komunikasi dan perekonomian.

Meskipun demikian keempat desa perkotaan tersebut statusnya masih desa, belum menjadi kelurahan. Hal itu antara lain karena aparat desanya kurang berminat untuk

---

<sup>2</sup> Lihat Sudarno Sumarto (ibid)

<sup>3</sup> Berdasarkan kriteria perkembangan, desa dikelompokkan dalam tiga tingkat perkembangan, yaitu swadaya, swakarya dan swasembada. Desa swasembada merupakan tingkatan yang paling tinggi.

<sup>4</sup> Kulon Progo Dalam Angka 1998.

merubah status desa supaya tetap memiliki hak garap tanah bengkok yang cukup luas<sup>5</sup>. Bila menjadi kelurahan, selain akan kehilangan hak tersebut, belum tentu semua aparat (16 – 27 orang per desa) bisa otomatis menjadi pegawai kelurahan atau pegawai negeri, karena terbentur kemampuan pemerintah daerah dan sumber daya aparatnya sendiri.

Jarak antara desa dengan ibukota kecamatan relatif dekat. Desa paling jauh adalah Desa Karangwuni yang berjarak 10 km dari ibukota kecamatan dan terletak di daerah pesisir. Sarana transportasi antar desa dan kecamatan sangat baik. Selain tersedia prasarana jalan yang memadai juga terdapat alat transportasi yang cukup banyak, khususnya di desa perkotaan. Meskipun demikian masih banyak jalan di desa yang tidak dilalui kendaraan umum sehingga sepeda menjadi alat transportasi yang sangat banyak digunakan penduduk.

**Tabel 1. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Jarak Desa di Kecamatan Wates**

No	Nama Desa	Luas Wilayah (ha)	Jumlah Penduduk		Jarak ke Ibukota (Km)	
			Jiwa	RT	Kecamatan	Kabupaten
1	Karangwuni	722,35	2 785	709	10	t.d.a.
2	Sogan	250,45	2 224	431	3	t.d.a.
3	Kulwaru	251,74	2 742	531	3	t.d.a.
4	Ngestiharjo	255,61	3 381	646	2	t.d.a.
5	Triharjo	481,88	6 298	1 152	2	t.d.a.
6	Bendungan	341,42	6 740	1 232	0	5
7	Giripeni	468,55	7 495	1 392	3	t.d.a.
8	Wates	428,24	14 124	2 905	5	0
Kecamatan Wates		3 200,24	45 789	8 998	-	5

Sumber : Kecamatan Wates dalam Angka 1998.

Ket. : t.d.a.= tidak ada data

Kecamatan Wates merupakan kecamatan yang paling ramai dan berkembang di Kabupaten Kulon Progo. Selain menjadi lokasi ibukota kabupaten, juga dilalui oleh jalan raya jalur selatan yang menghubungkan kota-kota mulai dari DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah bagian barat dengan Yogyakarta, Jawa Tengah bagian timur dan Jawa Timur. Tepatnya, kota ini terletak diantara Kota Purworejo dan Yogyakarta.

Diantara delapan desa di Kecamatan Wates, kedua desa penelitian yaitu Desa Bendungan dan Desa Wates merupakan desa yang paling ramai. Desa Bendungan terletak di ibukota kecamatan sedangkan Desa Wates terletak di jantung kota Kabupaten Kulon Progo. Desa Wates lebih ramai dan lebih mencerminkan daerah perkotaan dibandingkan dengan Desa Bendungan yang masih bernuansa agak perdesaan. Ciri perkotaan Desa Wates juga ditandai dengan lebih banyaknya jumlah berbagai sarana, baik sarana transportasi, sosial,

<sup>5</sup> Tanah *bengkok* adalah tanah milik pemerintahan desa. 60% dari tanah tersebut digunakan untuk menggaji aparat desa melalui pemberian hak garap, dan 40% sisanya sebagai sumber pemasukan kas desa untuk keperluan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pegawai desa yang mendapat hak garap tanah *bengkok* adalah kepala desa beserta aparatnya dan kepala dusun. Di Desa Bendungan terdapat tanah *bengkok* seluas 23,79 ha sedangkan di Desa Wates 26,287 ha. Di Desa Bendungan, masing-masing kepala dusun dan aparat desa mendapatkan hak garap tanah *bengkok* sekitar 7000 m<sup>2</sup>, sedangkan kepala desa sekitar 2 ha. Karena hampir semua aparat sudah mempunyai lahan garapan milik sendiri, tanah *bengkok* tersebut umumnya disewakan ke pabrik gula atau petani secara perseorangan Rp. 125– Rp. 200 per m<sup>2</sup> per tahun.

budaya maupun ekonomi; kepadatan penduduk; matapencaharian utama penduduk; dan penggunaan lahan.

Aksesibilitas terhadap kedua desa ini cukup baik karena didukung oleh jalan yang baik dan sarana transportasi yang tersedia setiap saat, baik siang maupun malam. Bahkan di Desa Wates yang dilalui jalan raya jalur selatan tersedia bis antar kota. Sarana sosial dan budaya tersedia dengan baik, seperti tempat beribadah dan sekolah, mulai tingkat taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Sarana kesehatan yang ada antara lain Puskesmas dan beberapa praktek dokter. Disamping itu, saluran air PAM dan sarana telekomunikasi berupa telepon dan wartel tersedia dalam jumlah cukup.

Sebagai konsekuensi dari daerah perkotaan, Desa Bendungan dan Desa Wates banyak didatangi kaum pendatang meskipun sebagian besar berasal dari DIY dan Jawa Tengah. Penerimaan masyarakat terhadap pendatang cukup baik, pendatang bisa membaur dengan penduduk setempat sehingga tidak menjadi masalah jika pendatang tersebut menduduki jabatan penting di lingkungannya.

Desa Bendungan yang terletak 5 km dari ibukota kabupaten ini terdiri dari 12 dusun, 21 RW, 48 RT, dan 104 dasa wisma<sup>6</sup>. Penduduknya berjumlah 6.740 jiwa atau 1.232 rumahtangga. Dengan luas areal 481,88 ha, kepadatan penduduk di Desa Bendungan mencapai 20 jiwa/ha.

Menurut penggunaannya, tanah di Desa Bendungan digunakan untuk sawah (41%), tanah kering (45%), bangunan (3%), dan lainnya (11%). Umumnya, tanah sawah diusahakan dalam bentuk *surjan*<sup>7</sup>. Penguasaan masyarakat tani terhadap teknologi pertanian cukup baik. Para petani yang tergabung dalam kelompok P3A (Perhimpunan Petani Pemakai Air) menyatakan bahwa:

*Pada tahun 1960-an, orang tua kami rata-rata memiliki lahan seluas 4.000 m<sup>2</sup> tetapi hasilnya hanya sedikit karena belum menguasai teknologi pertanian dan lahan digarap sebagai lahan tadah hujan. Pada saat kami pulang sekolah belum tentu bisa makan, atau maksimal hanya bisa makan tinul atau ganyong saja. Sekarang dengan lahan 500 m<sup>2</sup> dan menguasai teknologi pertanian kami bisa menghidupi keluarga yang berjumlah empat orang secara memadai.*

---

<sup>6</sup> Dasa wisma adalah kelompok ibu-ibu PKK dan merupakan kepanjangan tangan dari kelompok PKK dusun. Sesuai dengan namanya, kelompok ini seharusnya terdiri dari 10 rumah yang terdapat di RT yang sama, tetapi umumnya jumlah anggota dasa wisma tidak dibatasi dan bervariasi hingga belasan anggota. Dalam satu RT biasanya terdapat satu hingga tiga kelompok dasa wisma, tergantung dari besarnya jumlah keluarga.

<sup>7</sup> Pada pertanian sistem *surjan*, tanah mempunyai ketinggian yang berbeda. Biasanya sekitar 1/3 bagian lahan yang terdapat di tengah petak ditinggikan sekitar 0,5 m, sedangkan 2/3 lainnya agak rendah. Lahan yang berada di bagian bawah bisa dimasuki air irigasi sehingga digunakan untuk tanaman padi sawah, khususnya pada musim penghujan. Sedangkan pada musim kemarau biasanya *diberakan* (tidak ditanami apa-apa). Lahan yang ditinggikan dikelola secara intensif dan biasanya ditanami palawija atau hortikultura seperti cabe merah, bawang merah, sayuran, dan kedele. Pengairan untuk lahan yang ditinggikan diperoleh dari air sumur yang dibuat di lahan tersebut. Bertani di lahan yang ditinggikan ini bisa dikatakan sebagai pekerjaan sekaligus sumber penghasilan sehari-hari. Hampir setiap hari petani di Desa Bendungan mengelola lahan ini, baik untuk pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan tanaman, penyiraman, dan panen. Penanaman dan pemanenan tanaman biasanya tidak dilakukan sekaligus tapi sedikit demi sedikit sehingga mereka bisa menikmati hasil lebih lama dan tenaga kerja cukup disediakan dari dalam keluarga saja. Petani menilai, sistem *surjan* lebih menguntungkan dibandingkan dengan pertanian lahan biasa karena erosi pupuk dari lahan yang ditinggikan akan jatuh ke lahan sawah dibawahnya sehingga lahan sawah menjadi lebih subur.

Sementara itu, Desa Wates yang merupakan pusat perdagangan dan perekonomian di Kabupaten Kulon Progo terdiri dari 16 dusun, 38 RW, 86 RT, dan 190 dasa wisma. Luas wilayah Desa Wates 428,24 ha dengan jumlah penduduk 14.124 jiwa atau 2.905 rumahtangga. Dengan kepadatan penduduk 33 jiwa/ha, Desa Wates menjadi desa yang paling padat di Kecamatan Wates sekaligus di Kabupaten Kulon Progo. Lahan pertanian di Desa Wates relatif lebih sedikit. Hal ini tampak dari proporsi penggunaan lahannya yang digunakan untuk sawah (31%), tanah kering (13%), bangunan (42%), dan lainnya (14%).

### **Struktur Sosial Ekonomi Masyarakat**

Kegiatan gotong-royong masyarakat Kulon Progo tampak masih kental, termasuk di wilayah perkotaan seperti di Desa Wates dan Desa Bendungan. Hal ini antara lain karena gotong-royong atau di daerah ini dikenal dengan istilah *guyub* (menjaga persatuan, kesatuan, gotong-royong, dan kerukunan) merupakan salah satu unsur dari delapan motto Kabupaten Kulon Progo. Kegiatan gotong-royong antara lain dilakukan pada saat pembuatan pondasi rumah. Warga yang berhalangan biasanya menyediakan makanan sekedarnya untuk yang sedang bekerja sebagai tanda tetap ikut bergotong-royong.

Sejalan dengan Undang-Undang No. 5 tahun 1979 tentang pemerintah desa, di Kecamatan Wates termasuk di kedua desa penelitian dibentuk beberapa organisasi semi formal secara bertingkat. Pembentukan organisasi tersebut bertujuan untuk mempermudah penyampaian berbagai program dari pemerintah ke masyarakat. Untuk keperluan program pemerintahan, di setiap desa terdapat organisasi tingkat dusun, RW, dan RT. Sedangkan untuk program PKK, terdapat PKK desa, PKK dusun, PKK RT dan dasa wisma. Kelompok dusun, RW dan RT umumnya terdiri dari kaum bapak atau janda, sedangkan kelompok PKK dan dasa wisma terdiri dari kaum ibu.

Adanya undang-undang tersebut ditambah dengan kentalnya sikap *guyub* turut mendorong minat berorganisasi warga setempat yang pada dasarnya memang senang berorganisasi. Karenanya kelompok masyarakat yang dibentuk pada awal tahun 1980-an tersebut hingga saat ini sebagian besar masih berjalan dengan baik. Di samping itu, di kedua desa penelitian juga terbentuk beberapa kelompok yang terdiri dari warga yang mempunyai matapencaharian yang sama, seperti kelompok pedagang burung, pengrajin besi, pedagang pasar, dan pemilik industri kaleng. Minat berorganisasi juga tampak dari tingkat kehadiran masyarakat di berbagai pertemuan kelompok dan undangan dari kantor desa yang mencapai lebih dari 90%.

Semua kelompok tersebut tidak membedakan status sosial maupun ekonomi. Pada beberapa kelompok yang sempat dikunjungi Tim SMERU tampak adanya variasi status sosial ekonomi diantara anggotanya. Dalam pertemuan tidak terlihat adanya indikasi warga berstatus lebih tinggi akan mendominasi kelompok, terutama dalam pengambilan keputusan. Meskipun demikian, biasanya pengurus kelompok adalah kepala dusun, ketua RT atau istrinya, atau orang yang dianggap mampu mengelola dilihat dari segi pengetahuan dan pendidikannya.

Masing-masing kelompok di tingkat dusun, RW, RT, dan dasa wisma mempunyai jadwal pertemuan rutin, sebulan sekali atau 35 hari sekali (*selapanan*). Kegiatan masing-masing kelompok hampir sama, yaitu: simpan-pinjam, arisan, dan pengumpulan dana untuk kegiatan sosial bagi anggota yang mendapat musibah seperti kematian, atau dirawat di

rumah sakit. Selain itu mereka juga mengumpulkan dana *jimpitan* (dana pembangunan) untuk membangun sarana umum di wilayah masing-masing, seperti lampu penerangan jalan dan pengerasan jalan setapak.

Hampir semua keluarga paling tidak mengikuti satu kelompok kegiatan. Bahkan banyak keluarga mengikuti hampir semua tingkatan kelompok yang ada. Menurut mereka dengan mengikuti kegiatan tersebut mereka menjadi lebih dekat satu sama lain dan tidak dikucilkan.

Berdasarkan pekerjaan utama kepala keluarga maka matapencaharian penduduk Desa Bendungan sebagian besar adalah di bidang pertanian (55%), perdagangan (20%), dan industri (18%). Sementara itu matapencaharian penduduk Desa Wates adalah jasa dan lainnya (34%), perdagangan (29%), bangunan (14%), dan pertanian (9%). Kegiatan pertanian penduduk kedua desa adalah pertanian tanaman pangan dan berternak sapi, kambing atau ayam dalam jumlah kecil. Di Desa Bendungan kegiatan industri yang diusahakan antara lain pembuatan tahu, peralatan pertanian dan perkakas dapur dari besi atau kaleng.

**Tabel 2. Jumlah Rumahtangga Menurut Sektor Ekonomi Pekerjaan Utama Kepala Keluarga di Desa Penelitian**

Sektor Ekonomi	Jumlah Rumahtangga		
	Desa Bendungan	Desa Wates	Kecamatan Wates
Pertanian	689	265	4.063
Pertambangan & penggalian	0	9	67
Industri	218	243	578
Listrik, gas dan air	0	7	7
Bangunan/konstruksi	42	383	883
Perdagangan	243	819	1.473
Angkutan	14	107	191
Lembaga keuangan	4	32	42
Jasa dan lain-lain	33	978	1.738
Jumlah	1.243	2.843	9.042

Sumber: Kecamatan Wates dalam Angka 1998

Menurut berbagai sumber informasi, hampir semua keluarga baik di Desa Bendungan maupun Desa Wates mempunyai matapencaharian lebih dari satu. Pertanian masih menjadi sumber matapencaharian sebagian besar keluarga meskipun tidak selalu menjadi yang utama. Hampir semua keluarga tani mempunyai pekerjaan lain di luar pertanian, seperti dagang atau industri rumah tangga.

Di kedua desa penelitian pencari nafkah keluarga tidak menunjukkan adanya dominasi suami atau istri karena umumnya masing-masing mempunyai pekerjaan. Hampir semua kaum ibu di kedua desa mempunyai kegiatan yang menunjang ekonomi keluarga. Sebagian besar berdiri sendiri dan lainnya bekerja sama dengan suami. Kaum ibu umumnya bekerja di bidang perdagangan, seperti membuka kios di rumah atau di pasar,

pedagang sayur keliling, atau membuat dan menjual makanan kecil. Sedangkan kaum bapak bertani atau bekerja di industri rumah-tangga.

Sektor usaha di kedua desa penelitian ditunjang oleh berbagai fasilitas ekonomi mulai dari lembaga perbankan, koperasi, pasar hingga kios. Di Desa Bendungan terdapat satu Bank Rakyat Indonesia (BRI) unit desa, satu Bank Pembangunan Daerah (BPD), satu Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), dua Badan Kredit Desa (BKD), satu Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP), satu Koperasi Unit Desa (KUD), dua Koperasi non KUD, 13 toko, 44 kios, 21 warung dan sebuah pasar milik Pemda. Desa Wates mempunyai fasilitas ekonomi lebih lengkap, yaitu: satu Bank Negara Indonesia (BNI), tiga BRI (satu cabang dan dua unit), satu BPD, dua BKD, satu Bank Danamon, satu UED-SP, 35 Koperasi Non KUD, 189 toko, 118 kios, 269 warung, dan dua pasar negeri yang cukup besar. Disamping itu kedua desa masih bisa mengakses fasilitas lain yang terdapat di desa atau kecamatan lain karena mudahnya sarana transportasi.

Berdasarkan tahapan kesejahteraan Badan Kesejahteraan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)<sup>8</sup>, kesejahteraan penduduk Kecamatan Wates yang berjumlah 9.810 KK cukup menyebar. Jumlah keluarga yang termasuk dalam masing-masing tahapan cukup seimbang, tidak ada konsentrasi pada tahapan tertentu. Penduduk Desa Wates lebih sejahtera dibanding penduduk Desa Bendungan maupun penduduk kecamatan secara keseluruhan. Di Desa Bendungan jumlah Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera (KS) I yang biasanya merupakan kelompok sasaran sejumlah program bantuan pemerintah, khususnya program Jaring Pengaman Sosial (JPS), masih cukup banyak, yakni mencapai 44%. Sedangkan kelompok paling sejahtera, yaitu KS III + hanya mencapai 3%. Kondisi yang agak berbeda terjadi di Desa Wates yang mempunyai KPS dan KS I 25% sedangkan KS III + mencapai 30% (Tabel 3).

Meskipun di sebagian daerah tahapan kesejahteraan tersebut tidak menunjukkan strata ekonomi namun di kedua desa penelitian bisa mencerminkan strata ekonomi karena ke-5 kriteria dasar kesejahteraan BKKBN<sup>9</sup> juga merupakan kebutuhan dasar masyarakat setempat yang senantiasa diusahakan agar dapat dipenuhi. Penduduk yang mempunyai status ekonomi terbawah adalah mereka yang mempunyai pekerjaan sebagai buruh (tani, bangunan, industri rumahtangga, tukang becak) dan pedagang kecil di pasar. Strata ekonomi menengah adalah mereka yang mempunyai industri rumahtangga, petani pemilik, pemilik kios atau toko kecil, dan pegawai tingkat menengah. Sedangkan penduduk strata ekonomi atas umumnya mempunyai pekerjaan sebagai pedagang besar (pemilik kios besar) dan pegawai tingkat atas.

---

<sup>8</sup> BKKBN menggolongkan keluarga ke dalam lima tahapan kesejahteraan yang terdiri dari KPS, KS I, KS II, KS III dan KS III +.

<sup>9</sup> Kriteria kesejahteraan BKKBN yang paling dasar adalah: menjalankan ibadah, makan dua kali sehari, mempunyai pakaian yang berbeda, lantai rumah bukan dari tanah, dan pergi ke sarana kesehatan bila sakit.

**Tabel 3. Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Tahapan Keluarga Sejahtera**

Nama Desa	KPS		KS I		KS II		KS III		KS III +	
	KK	%	KK	%	KK	%	KK	%	KK	%
Bendungan	215	15,02	410	28,65	444	31,03	315	22,01	47	3,28
Wates	226	7,77	494	16,99	488	16,79	820	28,21	879	30,24
Kec. Wates	2276	23,2	1693	17,26	1331	13,57	2337	23,82	2173	22,15

Sumber : Kecamatan Wates dalam Angka 1998.

### **Dinamika Masyarakat Selama Krisis**

Pengaruh krisis ekonomi terhadap masyarakat selalu dikaitkan dengan dampaknya terhadap penerimaan dan pengeluaran masyarakat. Dilihat dari sisi penerimaan, krisis yang sudah berlangsung selama tiga tahun ini memberikan dampak yang berbeda terhadap daerah maupun individu yang berbeda karena antara lain dipengaruhi oleh jenis mata pencaharian yang bersangkutan. Hal yang sama terjadi juga di Kecamatan Wates.

Di kedua desa penelitian usaha pertanian tidak dipengaruhi secara langsung oleh krisis karena penerimaannya sangat tergantung pada hasil panen dan tingkat harga jual. Meskipun demikian selama krisis harga komoditi pertanian mengalami fluktuasi yang sangat tinggi akibat perubahan suplai di pasar. Pada awal krisis harga cabe merah dan beberapa jenis sayuran lainnya yang diproduksi daerah setempat mengalami peningkatan hingga beberapa kali lipat harga sebelumnya. Namun hal ini tidak berlangsung lama karena kemudian harga mengalami penurunan yang disebabkan oleh membanjirnya produksi akibat banyak petani (bahkan masyarakat di luar petani) menanam komoditi yang sama dengan harapan bisa meraih keuntungan dari harga jual yang tinggi tersebut. Setelah harga turun, produksi berkurang sehingga harga meningkat kembali meskipun tidak setinggi pada awal krisis. Fluktuasi harga demikian sebenarnya biasa terjadi pada komoditi pertanian tetapi selama krisis terjadi pergeseran harga ke tingkat yang lebih tinggi, baik ketika harga berada di titik tertinggi maupun terendah. Akibatnya penerimaan petani cenderung lebih tinggi tetapi karena harga barang-barang meningkat, nilai riilnya relatif sama dibanding sebelum krisis.

Jenis usaha yang mendapat dampak negatif dari krisis ekonomi adalah sektor industri rumahtangga seperti industri tahu, makanan kecil, peralatan rumahtangga dan pertanian, yang umumnya mengandalkan pasar lokal atau regional. Sektor ini mendapat pukulan dari dua sisi, baik produksi maupun pemasaran. Dari sisi produksi terjadi peningkatan harga bahan baku, sedangkan dari sisi pemasaran jumlah permintaan mengalami penurunan akibat turunnya daya beli masyarakat, sehingga tidak mungkin meningkatkan harga jual yang sebanding dengan peningkatan harga bahan baku. Tabel 4 berikut ini menyajikan perbedaan harga bahan baku dan harga jual hasil produksi pada sebuah industri rumahtangga tahu. Perbandingan harga output terhadap harga input yang sebelumnya hanya 0,5 selama krisis menurun menjadi 0,2. Sejak tahun 2000 ini perbandingan tersebut meningkat kembali meskipun masih dibawah angka sebelum krisis, yaitu menjadi 0,4. Dengan melihat perbandingan tersebut dapat disimpulkan bahwa industri ini mengalami penurunan keuntungan per unit output. Secara keseluruhan keuntungan mengalami penurunan karena jumlah penjualan tahu berkurang.

**Tabel 4. Perbedaan Harga Akibat Krisis di Sebuah Industri Tahu di Desa Bendungan**

	Sebelum Krisis (Rp./kg)	Selama Krisis (Rp./kg)	Tahun 2000 (Rp./kg)
Kacang Kedele (input)	1200	4800	2500
Tahu (output)	600	1000	1000

Sumber: Hasil wawancara

Contoh lainnya adalah industri rumahtangga yang membuat peralatan dapur dan pertanian dari kaleng. Sebelum krisis pemilik usaha dapat memperkirakan besarnya produksi dan lebih bisa mengatur tengkulak dengan meminta pembayaran lebih dahulu pada saat pemesanan. Akan tetapi selama krisis hingga sekarang pemilik usaha tidak bisa memperkirakan jumlah produksi karena volume penjualan tidak pasti. Pemilik usaha juga tidak berani meminta pembayaran dimuka karena takut rugi akibat tidak ada kepastian harga bahan baku. Sejak krisis industri rumahtangga ini sedikit mengubah strategi usaha. Apabila sebelumnya tidak menerima perbaikan kecil dari peralatan yang rusak, setelah krisis mulai menerima. Selain karena tersedia waktu agak luang akibat pesanan berkurang, juga karena permintaan perbaikan meningkat. Sebelum krisis biaya memperbaiki lebih mahal daripada membeli baru, sehingga masyarakat lebih memilih membeli baru. Sebaliknya setelah krisis masyarakat lebih memilih memperbaiki daripada harus membeli dengan harga mahal<sup>10</sup>.

Dilihat dari strata sosial ekonomi, kelompok yang diduga paling terkena dampak adalah golongan bawah seperti petani kecil yang tidak memiliki lahan, buruh bangunan dan pedagang kecil. Seorang ibu tua yang berjualan kecil-kecilan berkata: "*Krisis moneter kebangetan opo-opo larang*" (krisis moneter keterlaluan, apa-apa menjadi mahal). Masyarakat strata menengah ke atas kurang merasakan dampak krisis karena meskipun sebagian besar matapencarian mereka terkena dampak negatif tetapi karena umumnya mereka juga petani pemilik lahan yang terkena dampak positif, secara keseluruhan krisis tidak begitu berpengaruh terhadap penerimaan keluarga mereka.

Secara umum, dampak krisis di desa penelitian sangat dirasakan pada akhir tahun 1997 hingga 1998 karena terjadinya peningkatan harga berbagai barang kebutuhan yang cukup melonjak. Meskipun demikian krisis tidak berpengaruh nyata terhadap pola konsumsi masyarakat, khususnya konsumsi primer. Sebagian besar masyarakat berusaha mengurangi pembelian sandang dengan membatasi pembelian hanya pada saat lebaran.

Krisis juga berpengaruh pada aktifitas masyarakat, misalnya perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus yang biasanya diramaikan dengan panjat pinang dan band selama tahun 1998 dan 1999 terpaksa ditiadakan. Pada tahun 2000 ini masyarakat merasa bahwa kondisi ekonomi sudah mulai membaik, walaupun beberapa sumber mengatakan karena sudah terbiasa. Hal ini tampak dari mulai pulihnya aktifitas ekonomi masyarakat dan perayaan 17 Agustus pun sudah dirayakan seperti tahun-tahun sebelum krisis. Menurut pejabat kepala desa Desa Wates, saat ini krisis tidak begitu terasa karena ditopang oleh berbagai bantuan pemerintah, baik dalam bentuk pinjaman modal, subsidi maupun hibah.

<sup>10</sup> Setelah krisis, harga peralatan pertanian dan suku cadangnya meningkat karena harga bahan baku mengalami peningkatan, sementara biaya perbaikan relatif tidak berubah.

### **III. SKEMA KREDIT YANG TERSEDIA**

Sumber kredit bagi masyarakat di wilayah perkotaan Kabupaten Kulon Progo cukup banyak dan bervariasi. Secara garis besar, sumber kredit tersebut bisa dikelompokkan ke dalam tiga kelompok kredit, yaitu: kredit formal, kredit informal, dan kredit program. Kredit formal adalah kredit yang diperoleh dari lembaga formal yang berbadan hukum, seperti lembaga perbankan dan koperasi. Kredit informal diperoleh dari lembaga informal yang tidak berbadan hukum, baik perseorangan maupun kelompok. Sedangkan kredit program adalah kredit yang disediakan oleh pemerintah dan disalurkan melalui program tertentu, biasanya untuk tujuan khusus dan dalam jangka waktu tertentu.

#### **Kredit Formal**

Kredit formal berasal dari dua kelompok sumber, yaitu dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). LKB yang ditemui di daerah penelitian antara lain BRI, BNI, BPD DIY, Bank Danamon, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Pasar, BPR Shinta Putra, dan BKD. Sedangkan LKBB yang tersedia antara lain adalah Pegadaian, BUKP, Koperasi Pasar Karya Makmur, Koperasi Pasar Niaga Binangun, Koperasi Asewa Bentara, Koperasi Industri Kerajinan Maju, Koperasi Wanita Teratai, dan KUD. Dari berbagai sumber dana yang tersedia, yang akan dibahas dalam laporan ini hanya lembaga yang paling banyak dimanfaatkan oleh masyarakat desa penelitian, khususnya yang menjadi responden.

#### **A. Lembaga Keuangan Bank**

##### **(1) BRI (Bank Rakyat Indonesia)**

Di DIY terdapat dua Kantor Cabang (Kanca) BRI, yaitu BRI Kanca Yogyakarta Cik Ditiro yang tidak membawahi BRI Unit dan BRI Kanca Yogyakarta Katamso yang membawahi 21 BRI Unit di wilayah DIY. BRI yang menyalurkan kredit ke masyarakat adalah BRI Cabang dan BRI Unit.

BRI Cabang yang terdapat di setiap kota kabupaten biasanya menyalurkan tiga macam kelompok kredit, sedangkan BRI Unit Desa yang ada di setiap kecamatan menyalurkan Kupedes. Ketiga kelompok kredit dari BRI Cabang tersebut adalah:

- Kredit Komersial Umum, terdiri dari:
  - Kredit Modal Kerja (KMK)
  - Kredit Investasi (KI)
- Kredit Program, antara lain:
  - Kredit Usaha Tani (KUT)
  - Kredit Pangan
  - KKop (sembako, agribisnis, pupuk, dll)
  - Kredit untuk Pengusaha Kecil dan Menengah (KPKM)
  - Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK)
  - Kredit Modal Kerja – Usaha Kecil Menengah (KMK-UKM)
- Kredit Konsumtif, terdiri dari:
  - Kredit Golbertap
  - Kredit Pensiun
  - Kredit untuk pegawai sendiri

Dari banyak skema kredit yang ditawarkan BRI tersebut, skema kredit yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat di desa penelitian adalah Kredit Konsumtif dan Kupedes yang diambil melalui BRI terdekat, serta KUT yang diambil melalui KUD. Selain KUT, umumnya masyarakat tidak mengetahui secara mendetil nama skema kredit yang diambilnya. Mereka hanya tahu bahwa mereka mengambil kredit dari BRI.

Persyaratan untuk memperoleh pinjaman Kupedes antara lain adalah memiliki usaha, agunan, dan ijin usaha. Agunan dapat berupa benda bergerak, seperti Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor atau mobil, dan benda tidak bergerak, seperti surat tanah asli berupa sertifikat, Letter C atau Letter D. Jumlah pinjaman berkisar antara Rp. 25.000 s/d Rp. 25 juta. Khusus untuk kredit  $\leq$  Rp. 1 juta bisa dilakukan tanpa jaminan tetapi pemberiannya sangat tergantung pada kepercayaan kepala unit terhadap kemampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman. Selain itu pengajuan pinjaman juga harus disertai surat pengantar dari kepala desa. Jangka waktu pinjaman berkisar antara satu hingga tiga tahun, sedangkan tingkat suku bunga 2% per bulan merata (termasuk 0,5% IPTW<sup>11</sup>).

Di Kabupaten Kulon Progo selain terdapat 1 BRI cabang juga terdapat 20 BRI Unit Desa yang tersebar di 12 kecamatan, tiga diantaranya berada di Kecamatan Wates. Ketiga BRI Unit tersebut satu terletak di Desa Bendungan, yaitu BRI Unit Wates I dan dua di Desa Wates, yaitu BRI Unit Kota dan BRI Unit Adyaksa. Ketersediaan BRI unit dalam jumlah yang cukup tersebut lebih memudahkan masyarakat setempat untuk mengaksesnya.

Di Desa Bendungan dan Desa Wates banyak masyarakat yang meminjam dari BRI. Hal ini tidak terlepas dari cukup gencarnya pemasaran kredit dari pihak BRI. Petugas pemasaran di BRI Unit sering melakukan pertemuan dengan masyarakat di desa maupun di kecamatan untuk memasarkan produknya. Upaya ini tidak terlepas dari kepercayaan BRI terhadap kemampuan masyarakat setempat dalam membayar angsuran pinjaman. Tabel 5 menunjukkan bahwa jumlah tunggakan setiap tahun di tiga BRI unit di Kecamatan Wates hanya berkisar 0 – 6%, yang merupakan tingkat pembayaran yang sangat tinggi.

---

<sup>11</sup> IPTW atau Insentif Pembayaran Tepat Waktu adalah insentif berupa uang yang diberikan kepada nasabah peminjam yang membayar angsuran tepat waktu. IPTW diberikan setiap 6 bulan sekali sebesar 0,5% dari jumlah pinjaman.

**Tabel 5. Perkembangan Pinjaman, Tunggakan, dan Simpanan di BRI Unit di Kecamatan Wates.**

(000)

BRI Unit	Tahun	Pinjaman		Tunggakan		Simpanan	
		Rp.	Orang	Rp.	Orang	Rp.	Orang
Wates I	1996	833.778	636	49.581	91	2.974.312	7.191
	1997	1.105.389	657	44.848	82	3.746.502	7.225
	1998	1.058.482	628	37.971	52	6.469.934	8.919
	1999	1.342.324	666	34.934	42	7.800.487	9.874
	2000*)	1.639.654	728	25.521	37	7.662.181	10.269
Kota	1996	1.500.481	982	65.073	109	2.925.632	7.180
	1997	1.473.596	967	76.227	112	3.367.097	7.582
	1998	1.652.947	970	76.502	112	4.346.673	8.340
	1999	1.967.630	979	51.785	81	5.373.810	8.949
	2000*)	2.298.667	970	40.453	55	5.534.238	8.864
Adyaksa	1996	95.387	0	0	0	102.764	237
	1997	544.184	229	10.190	11	576.634	1.113
	1998	810.683	369	3.810	5	1.753.535	2.180
	1999	1.476.116	570	2.605	4	2.580.835	2.727
	2000*)	1.770.226	655	999	1	2.572.121	3.086

Sumber : BRI Cabang Wates

Keterangan : - BRI Unit Wates I di Desa Bendungan, BRI Unit Kota dan BRI Unit Adyaksa di Desa Wates

- \*) Data sampai September 2000

Suku bunga yang rendah, proses pengajuan kredit yang mudah, dan adanya IPTW berpengaruh terhadap keputusan masyarakat dalam mengambil pinjaman. Mendapat IPTW juga menimbulkan perasaan dihargai sehingga mendorong nasabah untuk selalu membayar tepat waktu.

Berdasarkan Tabel 5 tampak bahwa baik jumlah pinjaman maupun simpanan mengalami peningkatan sejak 1996 hingga sekarang. Meskipun masyarakat yang mengambil kredit cukup banyak tetapi jumlah pinjaman dibandingkan dengan jumlah simpanan masih jauh lebih kecil. Hal ini selain karena dibatasi oleh minat masyarakat untuk meminjam, juga karena banyaknya lembaga kredit yang tersedia.

## (2) BPD (Bank Pembangunan Daerah)

BPD menawarkan beberapa skema kredit kepada masyarakat, yaitu:

1. Kredit Investasi
2. Kredit Modal Kerja
3. Kredit Pensiun
4. Kredit Pegawai
5. Kredit Keluarga, terdiri dari:
  - a. Kredit Pemilikan Kendaraan
  - b. Kredit Perbaikan Rumah
  - c. Kredit Pemilikan Alat Rumah tangga

Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja yang biasanya disebut sebagai Kredit Umum diperuntukkan bagi masyarakat pemilik usaha. Meskipun tingkat suku bunga kedua skema kredit tersebut sama, yakni 21% per tahun efektif, tetapi jangka waktu pinjamannya

berbeda, yaitu empat tahun untuk investasi dan dua tahun untuk modal kerja. Persyaratan untuk memperoleh kredit ini adalah mempunyai agunan berupa barang bergerak (BPKB sepeda motor atau mobil) atau sertifikat tanah. Khusus untuk pinjaman Rp. 25 juta atau lebih harus dilengkapi dengan surat ijin usaha.

Syarat Kredit Pensiun yang dikhususkan bagi para pensiunan, antara lain menggunakan Surat Keputusan (SK) pensiun asli dan usia nasabah dibatasi sampai 73 tahun. Jangka waktu kredit maksimal empat tahun dengan tingkat suku bunga 27% per tahun efektif. Jangka waktu tersebut dipengaruhi oleh pembatasan umur, yaitu semakin pendek apabila usia nasabah semakin mendekati batas umur yang ditentukan.

Kredit Pegawai dan Kredit Keluarga mempunyai ketentuan suku bunga dan jangka waktu yang sama dengan Kredit Pensiun tetapi persyaratannya berbeda. Besarnya pinjaman Kredit Pegawai dibatasi oleh jumlah angsuran maksimal sebesar 50% dari penghasilan bersih (*take home pay*) per bulan. Persyaratan Kredit Keluarga yang biasanya diambil oleh mereka yang mempunyai penghasilan tetap, baik pegawai negeri maupun swasta adalah harus menyerahkan foto copy SK pegawai yang disahkan oleh pimpinannya.

Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja mempunyai batas minimal pinjaman, yaitu Rp. 2,5 juta, sedangkan Kredit Pegawai, Kredit Pensiun dan Kredit Keluarga tidak mempunyai batas minimal, tetapi biasanya nasabah paling tidak meminjam Rp. 500.000.

Di Kabupaten Kulon Progo terdapat satu BPD Cabang, dua kantor cabang dan empat kantor kas. Beberapa waktu yang lalu, masyarakat Desa Wates mempunyai akses yang lebih mudah terhadap BPD karena di desa ini terdapat BPD Cabang, sementara di Desa Bendungan tidak tersedia. Karenanya, masyarakat Desa Bendungan yang ingin menjadi nasabah harus ke BPD yang terdapat di desa atau kecamatan lain. Akan tetapi sejak 21 September 2000 di Desa Bendungan telah dibuka BPD Kantor Kas. Alasan BPD membuka kantor kas baru adalah untuk lebih mendekati masyarakat. Desa Bendungan dijadikan pilihan karena masyarakatnya dinilai relatif maju, seperti tercermin dari tingginya pendapatan, banyaknya jumlah masyarakat yang menjadi nasabah di BPD Cabang dan banyaknya usaha. Sosialisasi tentang dibukanya kantor kas baru antara lain dilakukan dengan mengundang tokoh masyarakat setempat pada saat pembukaan kantor, melalui selebaran (brosur), dan diiklankan melalui radio. Minat masyarakat cukup tinggi, tampak dari cukup banyaknya orang yang datang meminta informasi dan meskipun baru dibuka 8 hari kerja BPD Kantor Kas ini sudah mempunyai nasabah penyimpan 25 orang dan yang mengambil formulir pinjaman 10 orang.

Keputusan pemberian kredit adalah wewenang BPD cabang pembantu dan BPD cabang. Kredit sampai Rp. 15 juta merupakan wewenang Cabang pembantu sedangkan yang lebih besar wewenang cabang.

Selain memberikan pinjaman kepada masyarakat, BPD juga memberi pinjaman kepada BUKP dengan tingkat suku bunga yang relatif lunak, yaitu 19% per tahun efektif. BPD juga memberikan pembinaan teknis perbankan dan pengawasan terhadap BUKP. Hal tersebut karena keduanya merupakan lembaga keuangan milik pemerintah daerah meskipun dengan segmen nasabah yang berbeda, yaitu BPD untuk segmen menengah ke atas sedangkan BUKP untuk segmen rendah.

### (3) BPR Bank Pasar

Bank Pasar merupakan sebuah BPR (Bank Perkreditan Rakyat) milik Pemda Tingkat II Kulon Progo dengan bupati dan kepala bagian perekonomian sebagai dewan pengawas. Di Kabupaten Kulon Progo selain Bank Pasar juga terdapat dua BPR lainnya, yaitu Bank Shinta Putra dan Bank Nusamba, tetapi yang paling banyak dimanfaatkan oleh masyarakat desa penelitian, khususnya yang menjadi responden adalah Bank Pasar dan Bank Shinta Putra.

Pembentukan Bank Pasar di Kabupaten Kulon Progo diawali dari sebuah perusahaan daerah berbentuk badan kredit yang didirikan pada tahun 1964 berdasarkan Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 1964. Badan kredit tersebut menjadi lembaga perkreditan yang lebih profesional setelah menjadi Bank Pasar pada tahun 1981 dan kemudian menjadi BPR sejak 1995.

Modal dasar Bank Pasar berasal dari Pemda Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp. 150 juta yang diberikan secara bertahap. Tahap pertama diberikan pada tahun 1981 sebesar Rp. 50 juta, berikutnya pada tahun 1996, 1999, dan tahun 2000, sehingga saat ini telah mencapai Rp. 143 juta. Karena milik Pemda, Bank Pasar wajib menyeter kepada Pemda sebesar 40% dari keuntungan setelah dipotong pajak. Sedangkan 60% lainnya digunakan untuk penambahan modal dan biaya operasional yang terdiri dari: jasa produksi 10%, cadangan umum 20%, cadangan tujuan 20%, dan dana kesejahteraan karyawan 10%.

Kegiatan Bank Pasar adalah menghimpun dana melalui tabungan dan deposito, serta memberikan kredit kepada masyarakat. Terdapat empat jenis pinjaman yang ditawarkan, sesuai dengan kelompok peminjamnya, yaitu Pinjaman Umum, Pinjaman Pegawai, Pinjaman Kelompok Mikro, dan Pinjaman Pedagang Pasar. Tingkat suku bunga dan plafon kredit keempat jenis pinjaman tersebut berbeda.

Batas Pinjaman Umum berkisar antara Rp. 1 juta – Rp. 8 juta, tergantung dari nilai jaminan, karakter orangnya (informasi dari pihak desa, bank lain, dll), dan besarnya usaha. Suku bunga ditetapkan 26% per jangka pinjaman selama 1 tahun atau 10 bulan. Artinya, untuk jangka waktu 1 tahun, dikenakan bunga 2,16% per bulan tetapi untuk 10 bulan menjadi 2,3% per bulan. Syarat peminjam adalah bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kulon Progo, memiliki KTP atau SIM, melakukan usaha produktif, dan memiliki jaminan yang mencukupi besarnya pinjaman. Jaminan kredit bisa berupa BPKB sepeda motor atau mobil, atau sertifikat tanah. Jaminan berupa BPKB lebih disukai karena lebih mengikat nasabah dan lebih mudah pengurusannya<sup>12</sup>.

Pinjaman Pegawai diberikan kepada pegawai negeri dari lingkungan Pemda atau Perusahaan Daerah Tk II Kulon Progo. Besarnya pinjaman antara Rp. 500.000 hingga Rp. 3 juta dengan tingkat suku bunga 1,8% per bulan. Jangka waktu pinjaman adalah 10, 12, 20, atau 24 bulan. Syarat kredit ini adalah memiliki sisa gaji yang dapat dipotong sebagai angsuran pinjaman selama jangka waktu pinjaman, ada jaminan dari pimpinan

---

<sup>12</sup> Setiap tahun nasabah membutuhkan BPKB untuk mengurus perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Akibatnya nasabah dituntut untuk selalu lancar membayar angsuran pinjaman supaya BPKB-nya bisa kembali apabila pinjamannya lunas atau bisa minta surat keterangan dari Bank Pasar bahwa BPKB-nya digunakan sebagai agunan bila pinjaman belum lunas. Sementara itu sertifikat tanah baru dibutuhkan nasabah apabila tanah akan dijual atau akan digunakan sebagai agunan kredit lainnya. Apabila kredit macet sulit untuk diurus disamping biayanya mahal.

dinas/kepala bagian/kepala unit di kantor yang bersangkutan, dan ada jaminan pinjaman berupa SK pegawai dan slip gaji.

Pinjaman Kelompok Mikro adalah pinjaman yang hanya diberikan kepada nasabah yang mempunyai usaha dan berkelompok, serta merupakan binaan dari Bank Indonesia. Besarnya pinjaman per kelompok antara Rp. 5 juta sampai Rp. 12 juta, tergantung pada jumlah anggota kelompok yang berkisar antara 5 – 12 orang, sehingga setiap anggota rata-rata mendapat pinjaman Rp. 1 juta. Tingkat suku bunga 2% per bulan merata, dengan jangka waktu pinjaman 18 bulan dan diangsur secara bulanan. Jaminan Pinjaman Kelompok Mikro sama dengan pinjaman umum, yakni berupa BPKB atau sertifikat tanah. Jaminan bisa diwakili oleh satu atau beberapa anggota kelompok asal nilainya sebanding dengan jumlah pinjaman kelompok.

Sesuai dengan namanya, Pinjaman Pedagang Pasar merupakan jenis pinjaman khusus untuk para pedagang di pasar. Tingkat suku bunga 8% per jangka waktu pinjaman selama 50 hari. Angsuran kredit dibedakan menjadi dua, yaitu harian dan *pasaran*<sup>13</sup> (5 hari sekali). Besarnya pinjaman berkisar antara Rp. 50.000 – Rp. 500.000, diberikan secara bertahap mulai dari jumlah terkecil kemudian meningkat apabila pembayarannya lancar. Pinjaman ini tidak menggunakan jaminan, hanya berupa kepercayaan. Semua jenis pinjaman, termasuk pinjaman pedagang pasar dikenakan biaya administrasi 1% dari jumlah pinjaman yang dipotong dimuka pada saat pencairan pinjaman. Untuk memudahkan administrasi dan pelaksanaan pinjaman pedagang pasar, di 10 pasar di Kabupaten Kulon Progo disediakan sebuah loket Bank Pasar. Petugas loket diberi kekuasaan penuh untuk memutuskan pemberian pinjaman. Setiap ‘hari pasar’ petugas dibekali modal Rp. 1 juta sampai Rp. 1,5 juta, atau tergantung kebutuhan.

Petugas Bank Pasar berjumlah 13 orang, tujuh orang diantaranya adalah pegawai Pemda TK II dan enam orang pegawai Bank Pasar. Dari sejumlah petugas tersebut, delapan orang bertugas di kantor pusat dan lima orang lainnya bertugas di loket yang terdapat di 10 pasar. Masing-masing petugas loket bertanggungjawab terhadap dua pasar yang mempunyai ‘hari pasar’ berbeda.

Meskipun di Kulon Progo terdapat banyak lembaga kredit, tetapi Bank Pasar tidak merasakan ketatnya persaingan dalam memperoleh nasabah. Mereka tidak mengalami kesulitan untuk menjaring nasabah. Walaupun demikian Bank Pasar selalu berusaha untuk meningkatkan pelayanan.

Di sisi lain Bank pasar selalu melakukan komunikasi dengan bank lain, terutama dalam menghadapi nasabah yang mengajukan pinjaman agak besar supaya tidak terjadi tumpang tindih nasabah. Guna lebih mengamankan angsuran, Bank Pasar mengarahkan pinjamannya untuk mereka yang berpenghasilan tetap, yang saat ini mencapai sekitar 50% dari total pinjaman.

Strategi kebijakan Bank Pasar ini telah menyebabkan bank berkembang. Hal ini bisa diukur dari perkembangan jumlah modal yang tercermin dari perkembangan jumlah dana yang disalurkan kepada masyarakat yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tidak seperti pada bank umum yang biasanya menyerap dana jauh lebih besar dibandingkan dengan yang disalurkan kepada masyarakat setempat, pada Bank Pasar dana

---

<sup>13</sup> *Pasaran* merupakan istilah dalam kalender Jawa yang lamanya lima hari, terdiri dari *wage*, *kliwon*, *legi*, *pahing*, dan *pon*.

yang disalurkan justru jauh lebih besar dibanding jumlah tabungan masyarakat. Hal tersebut terjadi karena pemberian pinjaman merupakan satu-satunya sumber penerimaan Bank Pasar, sehingga semua modal yang ada ditujukan untuk perputaran pinjaman. Disamping itu nasabah yang dilayani, baik penabung maupun peminjam, adalah masyarakat kabupaten setempat sehingga dana selalu berputar di wilayah yang sama.

**Tabel 6. Jumlah Tabungan, Penyaluran Kredit, Sisa Kredit dan Kredit Bermasalah di Bank Pasar Kabupaten Kulon Progo, Tahun 1995 – 1999.**

Tahun	Jumlah Tabungan (Rp.)	Jumlah Penyaluran (Rp.)	Sisa Kredit (Rp.)	Kredit Bermasalah (Rp.)
1995	45.311.991	591.560.000	191.960.580	43.806.125
1996	58.093.812	627.515.000	237.965.155	40.652.485
1997	92.988.069	632.640.000	287.333.400	54.353.910
1998	104.532.484	624.435.000	315.755.315	45.565.620
1999	149.450.828	784.275.000	411.674.775	43.216.125

Sumber: Bank Pasar Kabupaten Kulon Progo

Bank Pasar merupakan salah satu sumber kredit bagi masyarakat di kedua desa penelitian. Dalam setiap tahun, rata-rata jumlah pinjaman yang disalurkan di Desa Bendungan mencapai 8,32% dan di Desa Wates 11,97% dari total penyaluran kredit Bank Pasar.

Penyaluran dana pinjaman di Desa Bendungan mengalami peningkatan hingga Rp. 55 juta pada tahun 1997. Seiring dengan terjadinya krisis, pada tahun 1998 terjadi penurunan, namun kemudian pada tahun 1999 mengalami peningkatan yang pesat. Seperti di Desa Bendungan, pengaruh krisis terhadap penyaluran kredit di Desa Wates sangat terasa pada tahun 1998 dengan tingkat penurunan yang lebih tinggi. Pada tahun tersebut penurunan penyaluran mencapai 28% dibanding tahun sebelumnya (Tabel 7). Keadaan tersebut terjadi karena meskipun krisis sudah berlangsung sejak tahun 1997 tetapi dampak terburuk terhadap sektor perbankan yang terlihat dari peningkatan suku bunga yang sangat tinggi baru terjadi pada tahun 1998.

**Tabel 7. Jumlah Penyaluran dan Sisa Kredit Bank Pasar di Dua Desa Penelitian**

Tahun	Desa Bendungan		Desa Wates	
	Jumlah Penyaluran (Rp.)	Sisa Kredit (Rp.)	Jumlah Penyaluran (Rp.)	Sisa Kredit (Rp.)
1995	51.580.000	7.200.000	77.995.000	8.001.000
1996	53.830.000	8.074.500	86.845.000	9.938.500
1997	54.955.000	7.260.000	82.505.000	10.169.000
1998	49.050.000	7.472.100	59.620.000	9.602.500
1999	60.940.000	8.829.500	80.290.000	10.121.500

Sumber: Bank Pasar Kabupaten Kulon Progo

#### (4) BPR Shinta Putra Pengasih

BPR Shinta Putra Pengasih didirikan pada tahun 1994 tetapi baru beroperasi mulai awal tahun 1996. Modal dasar BPR yang disyaratkan sebesar Rp. 200 juta dicicil dengan modal awal Rp. 85 juta. Modal tersebut berasal dari 47 orang pemegang saham yang sebagian besar merupakan karyawan BPR di wilayah DIY lainnya.

BPR Shinta Putra Pengasih yang sebagian besar wilayah operasinya di Kabupaten Kulon Progo (sekitar 70%) dikelola oleh 13 orang karyawan, termasuk dua orang direksi. Sesuai dengan UU Perbankan No. 10 tahun 1999, kegiatan BPR adalah menghimpun dan menyalurkan dana. Penghimpunan dana dilakukan melalui empat program tabungan, yaitu Tabungan Pegawai (tingkat suku bunga 12% per tahun), Tabungan Umum (14% per tahun), Tabungan Kelompok (14% per tahun), dan Tabungan Siswa/Pelajar (12% per tahun). Penyaluran dana dilakukan dengan menyediakan empat jenis kredit, yaitu Kredit Usaha, Kredit Umum Perorangan, Kredit Pegawai, dan Kredit Kelompok.

Guna meningkatkan penggalangan dana dari masyarakat kecil, sejak tahun 1999 BPR memperkenalkan cara menabung dengan menggunakan '*bumbungan*', yaitu alat menabung yang terbuat dari bambu. Alat ini disimpan di rumah nasabah tetapi kuncinya disimpan di BPR sehingga setiap saat nasabah bisa menabung tanpa bisa mengambil kembali secara langsung. Setiap jangka waktu yang telah disepakati bersama (harian, mingguan atau bulanan) petugas BPR akan menjemput tabungan '*bumbungan*' di rumah nasabah yang selanjutnya akan dimasukkan ke dalam tabungan resmi nasabah di BPR (menggunakan buku tabungan). Sebagai tahap uji coba tabungan '*bumbungan*' ini baru disebar sebanyak 150 buah.

Kredit Usaha adalah kredit yang menerapkan sistem angsuran mingguan dan diberikan kepada nasabah yang memiliki usaha kecil produktif, seperti pedagang di pasar. Besarnya kredit antara Rp. 50.000 – Rp. 500.000, tetapi sebagian besar nasabah meminjam Rp. 200.000. Selain harus memiliki usaha, syarat untuk mendapatkan kredit ini adalah memiliki perabotan rumahtangga sebagai jaminan meskipun tetap disimpan oleh nasabah, dan foto copy KTP. Tingkat suku bunga tergantung pada jangka waktu pinjaman. Pinjaman dengan jangka waktu 10 minggu atau 10 kali angsuran 1,5% per bulan merata, sedangkan untuk 20 minggu atau 20 kali angsuran dikenakan bunga 1% per bulan merata. Kredit usaha tidak menjadi prioritas karena cukup mengganggu terhadap penilaian kinerja BPR, dimana pinjaman sudah dinilai tidak lancar bila menunggak selama dua minggu. Meskipun demikian tingkat pengembalian kredit ini cukup lancar yaitu mencapai 80%, sementara 20% sisanya menunggak meskipun belum jatuh tempo.

Kredit Perorangan merupakan kredit bagi nasabah yang memiliki usaha yang sudah berjalan. Batas kredit antara Rp. 500.000 hingga Rp. 30 juta, sesuai dengan kelayakan usaha. Rata-rata nasabah memperoleh pinjaman Rp. 5 juta, saat ini hanya tiga orang nasabah yang disetujui meminjam Rp. 30 juta. Jangka waktu pengembalian bervariasi, yaitu 2, 5, 10 atau 25 bulan. Tingkat bunga semakin kecil dengan semakin besarnya jumlah pinjaman, yaitu sebagai berikut:

- 2,15% per bulan merata untuk kredit Rp. 3 juta - < Rp. 5 juta
- 2% per bulan merata untuk kredit Rp. 5 juta – < Rp. 10 juta
- 1,85% per bulan merata untuk kredit Rp. 10 juta - < Rp. 20 juta.
- 1,7% per bulan merata untuk kredit  $\geq$  Rp. 20 juta.

Penentuan tingkat suku bunga untuk pinjaman kurang dari Rp. 20 juta dilakukan oleh direksi, sedangkan untuk diatas Rp. 20 juta oleh komisaris.

Syarat Kredit Perorangan antara lain: (1) mempunyai usaha yang telah jalan; (2) jaminan berupa sertifikat tanah atau BPKB kendaraan bermotor; (3) terdapat penjamin bila tanah yang dijamin bukan milik sendiri, berupa surat kuasa dari pemilik; (4) KTP suami/istri, (5) surat keterangan dari kepala desa (untuk sertifikat tanah harus dari kecamatan).

Kredit Pegawai diperuntukkan bagi PNS atau pegawai swasta yang berpenghasilan tetap bulanan. Syarat kredit antara lain: (1) rekomendasi dari kepala kantor; (2) surat kuasa pemotongan gaji dari nasabah kepada juru bayar kantor; (3) foto copy SK pegawai terakhir; (4) foto copy KTP (suami/istri bagi yang berkeluarga); dan (5) perincian/struk gaji. Besarnya kredit tergantung dari besarnya gaji nasabah, yaitu 60% dari gaji bersih. Jangka waktu pinjaman sangat bervariasi, yaitu 10, 15, 20, 25, 30, 35, atau 40 bulan. Tingkat suku bunga ditetapkan 1,7% per bulan merata untuk jangka waktu pinjaman 10 dan 15 bulan, dan 1,85% per bulan merata untuk jangka 20, 25, 30, 35, atau 40 bulan. Untuk Kredit Pegawai, BPR juga melakukan kerjasama dengan dealer sepeda motor merek tertentu untuk nasabah yang ingin membeli sepeda motor secara kredit. Dalam hal ini BPR hanya berhubungan dengan dealer, sementara nasabah meminjam dan mengangsur secara tidak langsung melalui dealer.

Sesuai dengan namanya, Kredit Kelompok diperuntukkan bagi masyarakat yang membentuk kelompok usaha. Kredit Kelompok dibagi dalam tiga, yaitu Kelompok Pengusaha Mikro (KPM), Kelompok Besar, dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Syarat mendapatkan kredit adalah: (1) kelompok mempunyai manajemen yang kuat; (2) secara organisasi aktif; (3) memiliki kegiatan keuangan; (4) menyelenggarakan pertemuan rutin; (5) kelompok memiliki usaha (misalnya industri kecil atau dagang); dan (6) jaminan tanggung renteng berupa tabungan sebesar 20% dari jumlah pinjaman yang harus ditabung sebelum mengajukan permohonan pinjaman. Besarnya kredit tergantung dari jumlah anggota kelompok, tetapi setiap anggota maksimal mendapat Rp. 1 juta. Jangka waktu kredit 6 - 18 bulan, sedangkan bunga 1,85% per bulan merata. Saat ini terdapat 84 KPM yang semuanya dibentuk oleh BPR.

Selain keempat skema kredit tersebut BPR juga menyisipkan program kredit pemerintah berupa Program Kredit Mikro (PKM) untuk membantu usaha produktif dalam mengatasi dampak krisis, dan Kredit Modal Kerja (KMK). Dana PKM diperoleh dari Asian Development Bank (ADB), sedangkan KMK dari Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI). Nasabah PKM dan KMK berjumlah 47 orang, semuanya adalah nasabah baru BPR. Besarnya pinjaman antara Rp. 600.000 – Rp. 15 juta untuk KMK dan Rp. 300.000 – Rp. 15 juta untuk PKM, dengan tingkat bunga 1,35% per bulan merata dan jangka waktu satu tahun. Sejak Nopember 1999 KMK sudah dihentikan tetapi PKM masih ada sampai saat ini. Pada bulan Agustus 2000 pinjaman KMK telah mencapai Rp. 285,65 juta.

Secara umum semua pinjaman dari BPR dikenakan potongan sebesar 1% dari pinjaman untuk biaya administrasi. Selain itu peminjam harus mengeluarkan biaya materai untuk perjanjian kredit dan kuitansi.

Agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah, BPR sangat fleksibel dalam menentukan tempat transaksi, baik untuk tujuan kredit maupun simpanan. Meskipun

secara formal tempat pelayanan bagi nasabah adalah kantor BPR tetapi petugas BPR bersedia mengambil angsuran pinjaman atau tabungan di rumah nasabah ('sistem jemput bola').

Pemberian kredit kepada masyarakat merupakan satu-satunya sumber penerimaan BPR dalam bentuk pembayaran bunga dan biaya administrasi. Karenanya, BPR akan selalu berusaha meningkatkan jumlah kredit sesuai dengan ketersediaan sumber dana. Tabel 8 menunjukkan bahwa jumlah pinjaman yang disalurkan kepada masyarakat pada tahun 1997 dan tahun 1999 mengalami peningkatan cukup melonjak. Peningkatan tersebut disebabkan adanya suntikan dana dari pemegang saham, pinjaman dari bank lain, dan simpanan masyarakat berupa tabungan biasa dan deposito. Sedangkan penurunan yang terjadi pada tahun 1998 merupakan kebijakan dari BPR sebagai akibat dari adanya krisis.

Pada saat ini jumlah nasabah peminjam di BPR Shinta Putra mencapai 2.172 orang, terdiri dari peminjam umum 1.300 orang, sisanya peminjam di pasar (kredit usaha). Sementara itu jumlah nasabah penabung biasa 2.935 orang dan penabung deposito 58 orang.

**Tabel 8. Perkembangan Tabungan, Deposito dan Outstanding Kredit di BPR Shinta Putra Kulon Progo**

(Rp.)

Tahun	Tabungan	Deposito	Outstanding Kredit
1996	147.553.977	282.290.000	526.143.464
1997	186.073.364	371.400.000	817.404.270
1998	263.011.538	343.850.000	802.274.100
1999	412.081.000	702.935.000	1.543.021.975

Sumber: BPR Shinta Putra Pengasih, Kulon Progo

Meskipun BPR ini berlokasi di Kecamatan Pengasih, tetapi nasabahnya banyak yang berasal dari kedua desa penelitian. Hal ini antara lain karena tingkat suku bunga pinjaman di BPR sama dengan BRI, adanya sistem 'jemput bola' sehingga masyarakat tidak perlu pergi ke kantor BPR, dan karena BPR mempunyai skema Kredit Kelompok yang persyaratannya dianggap mudah.

### (5) BKD (Bank Kredit Desa)

BKD merupakan lembaga keuangan milik pemerintah desa dibawah binaan BRI, karena itu pengelolanya terdiri dari dua unsur, yaitu pamong desa dan BRI. Secara resmi BKD mempunyai empat orang pegawai, yaitu Komisi I (kepala desa), Komisi II (Juru Tagih), Komisi III (Kasir), dan JTU-BKD (Juru Tata Usaha-BKD). Komisi I sampai III adalah pamong dan masyarakat desa yang digaji oleh BKD<sup>14</sup> sedangkan petugas JTU-BKD adalah pegawai BRI yang digaji oleh BRI. Sebagai bank pembina, Kantor Cabang BRI melakukan kegiatan koreksi dan pengawasan terhadap BKD, serta pelatihan untuk semua komisi dan JTU.

<sup>14</sup> Komisi BKD memperoleh imbalan sebesar 4% dari angsuran pokok pinjaman mingguan ditambah 5% dari angsuran pokok pinjaman *selapanan*. Dari jumlah imbalan tersebut, Komisi I mendapat 35%, Komisi II dan III masing-masing 32,5%.

Kantor BKD berkedudukan di kantor desa. Kegiatan operasionalnya dilakukan seminggu sekali pada hari dan jam tertentu. Di kedua desa penelitian kegiatan BKD dilakukan dua kali seminggu tetapi masing-masing mempunyai pembukuan tersendiri. Bahkan di Desa Bendungan petugasnya pun berbeda. Di Desa Bendungan dilakukan pada hari Selasa dan Sabtu, sementara di Desa Wates pada hari Senin dan Jumat. Meskipun kegiatan utama BKD sebetulnya adalah menghimpun dana (tabungan) dan menyalurkan dana (pinjaman), tetapi dalam pelaksanaannya hanya kegiatan penyaluran dana saja yang berjalan.

Sumber modal BKD berasal dari desa dan BRI. Dana awal dari BRI berjumlah Rp. 5 juta diperoleh pada saat BKD berdiri (sekitar tahun 1951 - 1952). Dengan modal tersebut BKD memberikan pinjaman kepada masyarakat yang umumnya merupakan pedagang kecil. Pinjaman dibedakan dalam dua skema, yaitu pinjaman mingguan dan *selapanan* (35 hari). Pinjaman mingguan dikenakan bunga 7% per 10 minggu, sedangkan pinjaman *selapanan* 24% per 10 *selapanan* (350 hari).

Persyaratan untuk peminjam adalah memiliki KTP desa setempat dan mengajukan permohonan yang diketahui oleh kepala desa (di Desa Wates sebelum ke kepala desa harus melalui RT, RW, dan kepala dusun). Jumlah pinjaman tanpa agunan ini berkisar antara Rp. 50.000 hingga Rp. 750.000. Jumlah pinjaman ini harus disisakan 5% sebagai simpanan wajib yang bisa diambil kembali menjelang lebaran setelah seluruh pinjaman dilunasi.

Berdasarkan Tabel 9 dapat diketahui bahwa jumlah nasabah BKD di Desa Wates mengalami penurunan dari tahun ke tahun, khususnya sejak tahun 1997, tetapi jumlah dana yang dipinjam justru mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan terjadinya penambahan jumlah pinjaman per nasabah. Penurunan jumlah nasabah antara lain karena BKD semakin selektif dalam memilih nasabah guna menghindari kemungkinan terjadinya tunggakan.

**Tabel 9. Jumlah Nasabah dan Kredit Baru BKD di Desa Wates**

Tahun	Jumlah Nasabah (orang)			Nilai Kredit (Rp)		
	Mingguan	<i>Selapanan</i>	Total	Mingguan	<i>Selapanan</i>	Total
1996	41	21	62	8.490.0000	4.075.000	12.565.000
1997	36	28	64	8.025.000	5.925.000	13.950.000
1998	29	25	54	9.430.000	6.145.000	15.575.000
1999	28	18	46	10.665.000	4.650.000	15.315.000
2000*)	16	7	23	6.550.000	1.400.000	7.950.000

Sumber : BKD Desa Wates (BKD Wates I dan II)

Keterangan : \*) Data sampai September 2000

Pelaksanaan BKD di kedua desa tampak kurang berjalan dengan baik, yang antara lain terlihat dari kurang aktifnya para komisi. Kegiatan BKD seolah-olah hanya tanggungjawab JTU, sehingga segala sesuatunya sangat bergantung pada keaktifan petugas JTU. Seperti di Desa Wates, meskipun pada tahun 1999 terjadi penunggakan cukup tinggi di kedua BKD, yaitu masing-masing sebesar Rp. 1,8 juta dan Rp. 1 juta, tetapi penagihan oleh komisi tidak berjalan dengan baik. Komisi justru menyalahkan petugas JTU yang tidak aktif melakukan penagihan.

## B. Lembaga Keuangan Bukan Bank

### (1) Pegadaian

Pegadaian merupakan lembaga *instant* untuk mendapatkan uang. Dengan menggadaikan barang yang bernilai, masyarakat bisa segera memperoleh uang sesuai dengan nilai barang. Pegadaian berada di bawah naungan Departemen Keuangan dan mendapatkan dana berupa kredit komersil dari beberapa bank seperti BRI dan BCA.

Kantor Cabang Pegadaian biasanya terdapat di setiap kecamatan, dibawah oleh Pegadaian Cabang (di tingkat kabupaten), Kanwil Pegadaian (di tingkat propinsi), dan Pegadaian Pusat (di tingkat pusat). Meskipun demikian, masyarakat yang dilayani tidak dibatasi oleh wilayah kecamatan. Kantor Pegadaian yang terletak di Desa Wates misalnya, melayani empat kecamatan, yaitu Kecamatan Wates, Panjatan, Pengasih, dan Kecamatan Temon. Bahkan sopir truk yang sedang lewat dapat menggadaikan barang berharga (misalnya emas) apabila membutuhkan uang segera di perjalanan.

Barang yang digadaikan di Kantor Pegadaian Wates sangat bervariasi, mulai dari kendaraan bermotor, perhiasan (misalnya emas dan berlian), peralatan rumah tangga, barang elektronik, hingga kain. Apabila dilihat dari kontribusinya terhadap nilai keseluruhan, emas mempunyai kontribusi terbesar (70%), disusul sepeda motor (25%), dan barang lainnya (5%).

Persyaratan menggadaikan barang relatif mudah, namun barang yang digadaikan harus diserahkan berikut suratnya. Untuk menggadaikan kendaraan bermotor selain menyerahkan foto copy KTP juga harus menyerahkan kendaraan, STNK dan BPKB asli. Apabila kendaraan tersebut milik orang lain harus ada surat kuasa dari pemilik dan apabila tidak atas nama yang bersangkutan (belum balik nama) harus disertai surat pernyataan. Untuk menggadaikan emas dan barang lain cukup menyerahkan barangnya dan foto copy KTP.

Proses pengajuan pinjaman sangat cepat, hanya sekitar 15 menit apabila persyaratan sudah terpenuhi. Jangka waktu pinjaman sampai empat bulan tetapi dapat diperpanjang. Besar kredit maksimal Rp. 20 juta dengan tingkat suku bunga bervariasi tergantung golongan pinjaman yang dibedakan berdasarkan besarnya pinjaman, seperti tertera pada tabel berikut:

**Tabel 10. Tingkat Suku Bunga di Kantor Pegadaian Wates**

Golongan	Jumlah Pinjaman (Rp. )	Tingkat Suku Bunga (%/bulan)	Jangka Waktu Pengembalian (bulan)
A	5.000 - < 40.000	2,5	4
B	40.000 - < 150.000	2,5	4
C	150.000 - < 500.000	3,0	4
D	500.000 – 20.000.000	3,5	4

Sumber: Kantor Pegadaian Wates

Penggolongan jumlah pinjaman tersebut umumnya dapat mencerminkan status atau matapencaharian si peminjam. Peminjam golongan A umumnya adalah petani kecil atau buruh, golongan B pedagang kecil di pasar, dan golongan C serta D pemborong, pegawai negeri atau swasta, dan pedagang besar seperti pemilik toko.

Penentuan nilai barang yang akan dijaminkan dilakukan oleh juru taksir khusus. Barang elektronik dinilai 73% dari harga pasar tetapi maksimum pinjaman hanya 91% dari nilai barang yang ditaksir. Nilai sepeda motor adalah 93% dari harga pasar dan maksimum pinjaman hanya 88% dari nilai taksiran. Sedangkan untuk emas sudah tersedia tabel khusus yang disediakan oleh kantor pusat untuk periode waktu tertentu.

Mudahnya persyaratan dan cepatnya proses pinjaman dinilai sebagai kelebihan pegadaian, sehingga digunakan sebagai slogan untuk mencari nasabah. Kegiatan mencari nasabah dilakukan secara aktif karena pegadaian mempunyai banyak pesaing dari lembaga kredit lain seperti BPR dan BRI yang juga bersedia menerima emas dan peralatan rumahtangga sebagai jaminan kredit. Kegiatan promosi tersebut tampaknya berhasil dilihat dari banyaknya nasabah dan besarnya jumlah kredit.

Tabel 11 menunjukkan bahwa jumlah peminjam berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Peminjam kecil golongan A dan B mengalami penurunan dari tahun ke tahun sedangkan peminjam besar golongan C dan D justru mengalami peningkatan. Jumlah peminjam golongan kecil tetap mendominasi jumlah peminjam meskipun kontribusinya semakin kecil.

**Tabel 11. Perkembangan Jumlah Nasabah menurut golongan di Kantor Pegadaian Wates**

(orang)

Tahun	Golongan				
	A	B	C	D	Jumlah
1995	8.000	3.657	1.289	328	13.274
1996	6.605	3.535	1.829	322	12.291
1997	5.285	3.256	1.945	376	10.862
1998	5.093	3.049	3.444	858	12.444
1999	4.399	2.833	3.514	802	11.548
2000*)	2.977	2.073	2.749	633	8.432

Sumber: Kantor Pegadaian Wates  
Ket: \*) Data sampai Agustus 2000.

Meskipun jumlah peminjam secara keseluruhan cenderung menurun tetapi karena peminjam golongan besar mengalami peningkatan, maka jumlah dana yang dipinjam masyarakat secara keseluruhan meningkat, terutama sejak tahun 1998 (Tabel 12). Melonjaknya permintaan diperkirakan akibat pengaruh krisis yang telah menurunkan daya beli masyarakat sehingga mereka berusaha mengatasinya dengan menggadaikan barang yang dimiliki. Lembaga pegadaian dipilih karena mereka dapat segera memperoleh pinjaman. Pada tahun 1998 target pegadaian hanya Rp. 1,9 M tetapi ternyata realisasinya mencapai Rp. 2,5 M. Meskipun dalam keadaan krisis, tingkat pengembalian pinjaman tersebut cukup lancar, yaitu mencapai 98%.

**Tabel 12. Perkembangan Omzet Kredit yang Disalurkan Kantor Pegadaian Wates**

Tahun	1995	1996	1997	1998	1999	Agt-00
Omzet (milyar Rp)	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,03

Sumber: Kantor Pegadaian Wates

Bila peminjam tidak mampu menebus barang yang digadaikan maka pegadaian akan melelang barang gadaian kepada masyarakat umum. Batas terkecil harga jual barang yang dilelang adalah jumlah pinjaman ditambah bunga, ditambah biaya lelang. Biaya lelang ditentukan 10% dari jumlah pinjaman dan bunga.

## **(2) BUKP (Badan Usaha Kredit Perdesaan)**

BUKP merupakan lembaga keuangan bukan bank milik pemerintah daerah tingkat propinsi. Badan pembina lembaga ini adalah Kepala Biro Perekonomian Setwilda Tk. I dengan gubernur sebagai ketuanya. Sementara itu pembinaan teknis perbankan diberikan oleh Bank BPD DIY yang sekaligus menjadi bank pengawas.

BUKP di Kecamatan Wates yang berlokasi di Desa Bendungan didirikan sejak awal tahun 1993. Lembaga ini dikelola oleh empat orang, terdiri dari kepala, kasir, bagian pembukuan, dan staf operasional. Guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, BUKP menyewa tempat sebagai pos pelayanan di pasar dan di sebuah dusun di Desa Wates.

Kegiatan usaha BUKP adalah simpan-pinjam. Jenis simpanan hanya terdapat satu macam, yaitu Simpanan Masyarakat Desa (Simassa) dengan tingkat bunga 1% per bulan. Skema pinjaman yang ditawarkan ada dua macam, yaitu Kredit Mingguan dan Kredit Bulanan. Kredit Mingguan umumnya diambil oleh pedagang di pasar, sedangkan Kredit Bulanan diambil oleh pegawai atau mereka yang mempunyai usaha lebih dari satu dan berjalan lancar.

Kedua jenis kredit ini mempunyai persyaratan yang sama tetapi aturan mainnya berbeda. Syarat kredit adalah: mempunyai usaha, foto copy KTP, surat keterangan dari desa, dan untuk pinjaman di atas Rp. 500.000 perlu agunan berupa BPKB, sertifikat atau surat kuasa pemotongan gaji bagi pegawai. Tingkat bunga Kredit Mingguan adalah 1% per minggu merata dengan jangka waktu 10 atau 20 minggu. Sementara tingkat bunga Kredit Bulanan 3% per bulan merata dengan jangka waktu 10, 12, atau 18 bulan.

Plafon kedua jenis kredit ini Rp. 2,5 juta tetapi realisasi pinjaman berkisar antara Rp. 150.000 – Rp. 2,5 juta per nasabah. Sebagian besar nasabah hanya mendapat pinjaman di bawah Rp. 1 juta, sedangkan yang mendapat pinjaman Rp. 1 juta ke atas hanya beberapa orang saja. Keterbatasan jumlah pinjaman tersebut antara lain karena dana yang tersedia terbatas sementara jumlah pengajuan kredit cukup banyak. Disamping itu juga karena prinsip kehati-hatian BUKP yang hanya memberikan pinjaman besar kepada nasabah yang terlihat jelas kelancaran usahanya. Terbatasnya jumlah pinjaman yang disertai tingkat suku bunga cukup tinggi menyebabkan sebagian responden enggan meminjam pada BUKP.

Secara keseluruhan, ditinjau dari sektor ekonomi nasabah, ternyata kredit BUKP lebih dari 90% diambil oleh sektor perdagangan. Sisanya diambil oleh sektor pertanian/

peternakan (data BUKP Agustus 2000). Sebagian besar peminjam dari sektor perdagangan tersebut adalah kaum ibu.

Peminjam BUKP diharuskan mempunyai tabungan wajib sebesar 5% dan membayar biaya administrasi 3% dari jumlah pinjaman. Apabila nasabah tidak mengajukan pinjaman kembali, tabungan wajib bisa diambil segera setelah melunasi pinjaman. Akan tetapi apabila mengajukan pinjaman kembali, tabungan wajib baru bisa diambil setelah melalui lima kali pencairan pinjaman. Proses untuk mendapatkan kredit relatif cepat, rata-rata hanya satu minggu (kecuali menjelang lebaran bisa sampai dua minggu karena banyaknya permintaan kredit).

Modal BUKP Kecamatan Wates dimulai dengan dana awal sebesar Rp. 5 juta yang berasal dari tiga sumber, yaitu Pemda Tk. I Rp. 2,5 juta, Pemda TK II Rp. 500.000, dan pemerintah desa Rp. 2 juta. Modal tersebut kemudian berkembang dari hasil perputaran dana, tambahan modal dari Pemda, dan terutama pinjaman lunak dari BPD dengan suku bunga 19% per tahun efektif.

Dengan bertambahnya modal, BUKP bisa meningkatkan penyaluran dana kepada masyarakat. Besarnya penyaluran dana mengalami peningkatan cukup pesat dari tahun ke tahun. Peningkatan penyaluran dana juga ditunjang oleh meningkatnya jumlah tabungan masyarakat. Tabungan tersebut sebagian besar merupakan tabungan wajib dari nasabah peminjam (78%) dan tabungan sukarela.

**Tabel 13. Perkembangan Jumlah Piutang dan Tabungan di BUKP Kec. Wates**

Tahun	Piutang Akhir Tahun		Tabungan
	(Orang)	(Rp)	(Rp)
1993	106	7.228.225	1.224.480
1994	127	12.778.850	2.074.492
1995	175	25.688.450	4.613.277
1996	207	39.952.350	7.653.625
1997	356	68.602.825	13.331.517
1998	402	86.739.525	19.500.532
1999	368	105.411.650	23.411.702
2000*)	362	106.746.425	27.120.377

Sumber: BUKP Kecamatan Wates

Ket: \*) Data sampai Agustus 2000

Berdasarkan Tabel 13 dapat diketahui bahwa peningkatan modal BUKP selain menyebabkan bertambahnya peminjam juga menyebabkan meningkatnya jumlah pinjaman rata-rata per nasabah. Apabila pada awal tahun berdirinya (1993) BUKP rata-rata hanya bisa meminjamkan kepada 27 nasabah per bulan dengan jumlah pinjaman Rp. 98.000 per nasabah maka pada tahun 2000 meningkat menjadi 78 orang dengan rata-rata pinjaman Rp. 290 ribu.

### **(3) Koppas (Koperasi Pedagang Pasar) Karya Makmur**

Koppas Karya Makmur di Desa Wates didirikan pada tahun 1987 oleh Pusat Koperasi Pedagang Kecil (Puskopak) yang berkedudukan di Semarang. Karena itu, meskipun Koppas ini dibentuk melalui keputusan Kandepkop tersendiri tetapi dalam struktur organisasinya bertindak sebagai unit dengan Puskopak sebagai induknya.

Sebagai koperasi simpan-pinjam, kegiatan Koppas hanya terbatas pada simpan-pinjam. Penekanan kegiatan sebenarnya pada kegiatan pinjaman, sedangkan kegiatan simpanan muncul karena adanya kewajiban menyimpan bagi peminjam. Saat ini jumlah anggota mencapai 1.002 orang, terdiri dari pedagang kecil (candak-kulak) yang tersebar di seluruh pasar di Kabupaten Kulon Progo. Jumlah anggota ini sekaligus merupakan jumlah orang yang meminjam karena keanggotaan koperasi ini muncul karena adanya transaksi peminjaman.

Koppas Karya Makmur menawarkan dua skema pinjaman yang dibedakan berdasarkan periode angsuran, yaitu Pinjaman Harian dan Pinjaman Mingguan. Pinjaman Harian diangsur secara harian, maksimal selama 90 hari kerja tetapi umumnya hanya 30 hari kerja (di luar hari libur dan Minggu). Pinjaman Mingguan dicicil setiap minggu dalam jangka waktu enam minggu. Kedua pinjaman tersebut dikenakan suku bunga 3% per periode pinjaman. Suku bunga pinjaman ini relatif murah, akan tetapi selain bunga peminjam juga dikenakan biaya lain yang nilainya sangat tinggi, yaitu jasa pelayanan sebesar 15%, biaya administrasi 1%, dan tabungan wajib 5%. Disamping itu peminjam baru wajib membayar Rp. 5.000 untuk menjadi anggota. Biaya administrasi dan tabungan dipotong langsung dari jumlah pinjaman pada saat pencairan. Dari berbagai biaya tersebut hanya tabungan wajib yang dikembalikan setelah pinjaman lunas.

Jasa pelayanan hanya dikenakan kepada nasabah yang membayar angsuran melalui petugas yang datang, sedangkan bagi mereka yang membayar langsung ke kantor Koppas hanya dikenakan bunga<sup>15</sup>. Walaupun demikian, peminjam yang membayar langsung ke kantor Koppas sangat sedikit, yaitu hanya pemilik kios di sekitar kantor Koppas. Tampaknya, ketentuan ini tidak diinformasikan secara terbuka sehingga pedagang di Pasar Wates yang jaraknya relatif dekatpun tidak mengetahui.

Syarat untuk memperoleh pinjaman adalah KTP dan keanggotaan dalam koperasi. Besarnya pinjaman berkisar antara Rp. 10.000 – Rp. 200.000 diberikan secara bertahap. Artinya, peminjam awal tidak dapat meminjam dalam jumlah besar secara langsung, melainkan harus dimulai dari pinjaman Rp. 10.000 atau Rp. 15.000 saja. Jumlah pinjaman dapat semakin meningkat apabila angsuran dibayar secara lancar.

Masyarakat yang memanfaatkan koperasi ini umumnya pedagang kecil di pasar yang tidak mempunyai kios atau los. Mereka biasanya berjualan di pinggir pasar atau berkeliling. Di Desa Wates terdapat 25 orang peminjam dengan jumlah pinjaman sekitar Rp. 600.000.

---

<sup>15</sup> Adanya pemisahan biaya bunga dengan jasa pelayanan merupakan strategi Koppas untuk menghilangkan kesan bahwa bunga pinjamannya tinggi, sekaligus dijadikan sebagai alat untuk menghindari tuduhan sebagai rentenir atau “bank keliling” yang berkedok koperasi. Dengan strategi tersebut Kandepkop tidak bisa menyatakan bahwa Koppas tidak beroperasi sebagai koperasi, karena selain tingkat bunga masih dianggap wajar, juga syarat adanya rapat anggota selalu terlaksana dengan dihadiri banyak anggota.

Koperasi ini mendapat dana awal dari Puskopak sebesar Rp. 15 juta. Dana tersebut tidak perlu dikembalikan tetapi lebih bersifat sebagai saham. Sebagai konsekuensinya, setiap bulan Koppas harus menyetor sebesar Rp. 1 juta kecuali menjelang Hari Raya Lebaran. Saat ini modal koperasi sudah berkembang menjadi Rp. 62 juta.

Jumlah karyawan Koppas 28 orang, 20 orang diantaranya merupakan petugas lapangan yang bertugas mengambil angsuran dari nasabah sekaligus menawarkan kredit. Setiap hari seorang petugas lapangan minimal menagih kepada 50 orang nasabah. Mereka mendapat gaji sebesar Rp. 146.000/bulan pada 3 bulan pertama masa percobaan dan kemudian meningkat menjadi Rp. 167.000/bulan. Selain itu juga disediakan makan, uang bensin dan ruangan bagi petugas yang mau bermalam di kantor Koppas.

Koperasi ini merasakan banyaknya saingan pada tahun-tahun terakhir ini. Hal ini diduga akibat munculnya lembaga kredit baru, baik formal atau program (koperasi, BUKP, UED-SP) maupun informal (simpan-pinjam di tingkat masyarakat) dengan skema yang hampir sama tetapi lebih murah. Selain itu juga karena masyarakat semakin memahami besar kecilnya beban dari pinjaman.

#### **(4) Koppas Niaga Binangun**

Koppas Niaga Binangun merupakan koperasi pedagang pasar yang dibentuk oleh dan beranggotakan para pedagang di Pasar Wates. Koperasi ini terbentuk karena rasa keprihatinan para pedagang yang relatif besar terhadap pedagang kecil yang berjualan di sekitar pasar yang sering meminjam uang dari “bank harian” atau “bank keliling” yang menetapkan bunga tinggi. Berawal dari keinginan untuk melindungi sekaligus membantu permodalan pedagang kecil, para pedagang yang terdiri dari kaum ibu ini membentuk kelompok simpan-pinjam pada tahun 1995. Modal awal dikumpulkan dari 40 anggota dengan iuran Rp. 10.000 per pedagang sehingga berjumlah Rp. 400.000.

Pada tahun 1997 pengurus kelompok diikutsertakan dalam pendidikan dan latihan (Diklat) peningkatan peran wanita pasar yang diselenggarakan oleh Depperindag, Kandepkop dan Pemda TK II. Pada tahun yang sama kelompok ini menjadi kelompok yang lebih formal, yaitu Kelompok Usaha Bersama (KUB) dengan mendapat pengarahan dari empat instansi pembina, yaitu penyelenggara Diklat dan Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda). KUB yang mempunyai anggota 100 orang memulai permodalan dari awal kembali karena modal kelompok simpan-pinjam sebelumnya dikembalikan kepada anggota. Selain melakukan kegiatan simpan-pinjam, KUB juga mempunyai kegiatan arisan diantara anggotanya. KUB mewajibkan anggota menyetor simpanan pokok Rp. 5.000 dan simpanan wajib Rp. 500/minggu atau Rp. 2.000/bulan. Pinjaman KUB dibedakan menjadi dua macam, yaitu Pinjaman Harian dan Pinjaman Mingguan. Pinjaman Harian dikenakan suku bunga 5% per 30 hari angsuran, sedangkan Pinjaman Mingguan 10% per 10 minggu angsuran. Selain itu, pada saat pencairan pinjaman dipotong 10% untuk tabungan beku (wajib) yang bisa diambil kembali ketika pinjaman lunas.

Pada awal tahun 1998, KUB membentuk Koppas dan semua anggota KUB otomatis menjadi anggota Koppas dengan menambah simpanan pokok Rp. 5.000 karena simpanan pokok dinaikkan menjadi Rp. 10.000. Koppas ini cukup berkembang bila dilihat dari besarnya modal dan jumlah anggota. Saat ini modal Koppas sudah menjadi Rp. 40 juta. Dengan modal tersebut Koppas mampu meningkatkan plafon kredit yang awalnya hanya Rp. 100.000 per nasabah menjadi Rp. 750.000. Jumlah anggota telah mencapai 466 orang,

hampir semuanya perempuan (laki-laki hanya sekitar 10 orang)<sup>16</sup>. Koppas mempekerjakan tiga karyawan yang digaji sekitar Rp. 150.000 – Rp. 160.000 per bulan per orang. Disamping itu juga terdapat 11 koordinator yang bertugas melakukan ‘jemput bola’ terhadap pembayaran angsuran agar anggota tidak harus meninggalkan dagangannya untuk melakukan pembayaran. Saat ini Koppas sedang mempertimbangkan untuk mengangkat seorang manajer.

Skema kredit yang ditawarkan sama dengan ketika masih berbentuk KUB, yaitu Pinjaman Harian dan Pinjaman Mingguan. Besarnya Pinjaman Harian yang biasanya diambil oleh pedagang kecil (bakul), berkisar antara Rp. 100.000 – Rp. 150.000, sedangkan Pinjaman Mingguan bisa lebih besar. Pengembalian pinjaman sangat lancar, di atas 95%. Sebenarnya banyak anggota berminat mengambil kredit bulanan tapi sampai saat ini belum bisa dipenuhi karena terbatasnya modal sendiri yang harus berputar secara cepat.

Tahun ini Koppas Niaga Binangun menambah kegiatan dengan menjadi penyalur sekaligus pengelola kredit dari BPD. Kredit sebesar Rp. 1 milyar ini diperuntukkan bagi anggota untuk melunasi pembelian kios atau los pasar yang ditempati. Besarnya pinjaman per pedagang adalah 60% dari harga kios atau los. Pinjaman untuk los antara Rp. 1 juta – Rp. 1,5 juta, sedangkan untuk kios sampai dengan Rp. 15 juta. Pinjaman yang diperoleh melalui Bupati ini mendapat keringanan tingkat suku bunga, yaitu hanya 21% per tahun efektif (bandingkan dengan suku bunga pasar 26% per tahun). Atas kesepakatan anggota, bunga pinjaman kepada anggota ditetapkan 15% per tahun merata atau sekitar 27% efektif. Selisih antara bunga dari anggota dan yang dibayarkan ke BPD merupakan Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi. Sekitar 1% dari SHU ini digunakan untuk menyewa tempat di pasar sebagai kantor Koppas. Jangka waktu pinjaman paling lama 2,5 tahun dan angsuran dibayar setiap bulan. Meskipun BPD tidak mensyaratkan jaminan kepada koperasi karena menggunakan nama Bupati, tetapi koperasi tetap meminta jaminan dari anggota peminjam berupa los atau kios, demi menjamin keamanan pengembalian pinjaman.

Pinjaman ini menimbulkan polemik tersendiri di Kulon Progo, antara lain berupa ketidakpercayaan beberapa kalangan terhadap kemampuan koperasi mengelola dana, kemungkinan penyelewengan dana, disamping mempertanyakan mengapa Koppas Niaga Binangun yang mendapatkan. Menurut ketua pengurus (pedagang emas sekaligus istri seorang pejabat tinggi di Kabupaten Kulon Progo), sebelum proyek diserahkan kepada Koppas Niaga Binangun, pihak DPRD dan Pemda telah mengadakan pertemuan khusus dengan para pedagang pasar yang hasilnya memilih Koppas Niaga Binangun sebagai lembaga pengelola dan penyalur. Padahal waktu itu terdapat beberapa lembaga kredit lain yang ditawarkan, seperti Bank Pasar yang memang menyatakan tidak sanggup, dan kelompok lain.

Polemik melalui surat kabar tersebut telah membuat koperasi lebih berhati-hati dalam bertindak. Dana pinjaman yang saat ini masih tersisa Rp. 113 juta karena kurangnya pengajuan kredit dari anggota, disimpan di BPD. Selain itu Koppas juga selalu menyeter langsung pembayaran angsuran anggota (baik pokok maupun bunga pinjaman) kepada BPD setiap bulan walaupun terdapat aturan yang lebih ringan, yaitu setiap bulan hanya membayar bunga, sedangkan pokok pinjaman dibayar tiap akhir tahun selama tiga tahun, masing-masing sebesar Rp. 300 juta, Rp. 300 juta, dan Rp. 400 juta. Kedua dana tersebut

---

<sup>16</sup> Sebagian besar pedagang pasar, baik yang memiliki kios/los maupun tidak adalah kaum ibu. Fenomena yang sama juga berlaku pada pedagang yang memiliki kios di wilayah pemukiman. Hal ini terjadi karena kaum bapak biasanya memiliki pekerjaan lain seperti pegawai negeri/swasta, petani atau di bidang jasa.

sebenarnya dapat digunakan terlebih dahulu oleh koperasi, misalnya diputarakan dalam unit simpan-pinjam, tetapi koperasi tidak mau mengambil resiko menimbulkan polemik baru.

Sampai saat ini pengembalian pinjaman yang dicairkan sejak April 2000 berjalan dengan lancar. Target pengembalian Rp. 38 juta sebulan yang merupakan kesepakatan antara koperasi, Bupati dan DPRD bisa terlampaui.

Pencapaian tujuan awal pendirian KUB yang sekarang telah berbentuk Koppas ini menurut pendapat pengurus dan pedagang pasar terlihat nyata sekali. “Bank harian” atau istilah mereka bank *plecit* sudah jarang terlihat sejak adanya Koppas. Kalaupun masih ada yang meminjam dari “bank harian” biasanya dilakukan oleh pedagang yang belum menjadi anggota koperasi. Menghadapi hal ini Koppas terus berusaha menarik mereka menjadi anggota dengan meminta para anggota melakukan promosi dari mulut ke mulut.

### **(5) Koperasi Asewa Bentara**

Koperasi Asewa Bentara merupakan singkatan dari *Angudi Sejahtera Warganing* Bendungan Utara, artinya upaya mensejahterakan warga Bendungan Utara. Koperasi ini dibentuk pada tahun 1994 tetapi baru berbadan hukum pada April 1999. Koperasi milik Dusun Bendungan Utara ini awalnya merupakan perkumpulan sekitar 53 ibu-ibu peserta KB Lestari (Apsari = Akseptor KB Lestari) yang oleh BKKBN melalui petugas PLKB dikelompokkan dalam UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor) pada tahun 1979. Pada tahun 1992, UPPKA diubah menjadi UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) karena UPPKA kesannya terlalu sempit, yaitu hanya untuk akseptor KB.

Pada awalnya, UPPKS Dusun Bendungan Utara mendapat pinjaman tanpa bunga dari BKKBN sebanyak Rp. 200.000. Sesuai dengan kesepakatan anggota, dana ini dipinjamkan kepada anggota dengan suku bunga merata 10% per jangka pinjaman selama lima bulan, atau 2% per bulan. Guna menambah modal pinjaman, anggota wajib membayar simpanan pokok sebesar Rp. 1.000 dan simpanan wajib Rp. 100 per bulan.

Meskipun belum berbadan hukum, pada tahun 1995 UPPKS mendapat bantuan dari PT. Telkom dan PT. Pos Indonesia, masing-masing sebesar Rp. 5 juta. Pinjaman dari Telkom diberikan dalam bentuk perlengkapan wartel sebanyak satu sambungan telepon, sedangkan dari Kantor Pos berupa uang tunai sebesar Rp. 4 juta dan benda pos senilai Rp. 1 juta. Pinjaman berupa uang tunai tersebut digunakan untuk membuka toko kecil-kecilan disamping wartel. Kedua pinjaman tersebut berbunga 6% per tahun dan diangsur setiap bulan dari hasil jasa wartel dan toko. Jangka waktu pinjaman tiga tahun sehingga dapat dilunasi pada tahun 1998.

Pada tahun 1999 kelompok ini mendapat pinjaman Rp. 59 juta dari Departemen Koperasi melalui program LEPMM (Lembaga Ekonomi Produktif Masyarakat Mandiri). Pinjaman diberikan dalam dua tahap, tahap pertama pada bulan Maret 1999 sebesar Rp. 27,5 juta dan tahap kedua satu bulan berikutnya. Dana ini sebenarnya diperuntukkan untuk desa tetapi karena di tingkat desa tidak ada kelompok UPPKS maka pinjaman diberikan kepada dusun yang memiliki kelompok UPPKS yang cukup berhasil. Dana tersebut digunakan untuk kegiatan simpan-pinjam sebesar Rp. 13 juta, sedangkan yang lainnya antara lain untuk menambah satu sambungan telepon, pengembangan kios, sewa tempat, dan pembelian barang inventaris.

Syarat untuk mendapatkan dana tersebut adalah kelompok harus berbentuk koperasi yang berbadan hukum dan mempunyai anggota paling sedikit 150 orang. Badan hukum diperoleh secara cepat dan anggota dikumpulkan dari dua dusun lainnya karena jumlah warga dusun tersebut tidak mencukupi. Meskipun demikian pada kenyataannya anggota yang aktif hanya 85 orang berasal dari dusun yang bersangkutan.

Seiring dengan terbentuknya koperasi, Koperasi Asewa Bentara menetapkan peraturan baru untuk anggotanya. Simpanan pokok ditetapkan Rp. 25.000 dan simpanan wajib Rp. 2.000 per bulan. Pinjaman dikenakan suku bunga 1% per bulan diangsur setiap bulan dengan jangka waktu pinjaman maksimal 20 bulan. Pinjaman yang sebelumnya diberikan secara informal, diubah menjadi formal dengan syarat foto copy KTP dan mengisi formulir pertanggungjawaban suami/istri.

Setelah mendapat suntikan dana dari Departemen Koperasi, unit simpan-pinjam Koperasi Asewa Bentara yang sebelumnya hanya mempunyai dana Rp. 418.000 (pengembangan dari hasil pembayaran bunga pinjaman sejak tahun 1986), saat ini meningkat menjadi Rp. 13,4 juta. Dengan dana tersebut koperasi bisa memberikan pinjaman yang jauh lebih besar, yaitu antara Rp. 100.000 – Rp. 2 juta per peminjam, tergantung dari jumlah angsuran yang masuk dan banyaknya permohonan pinjaman.

Minat anggota untuk meminjam dari koperasi cukup besar, terlihat dari jumlah peminjam yang saat ini mencapai 78 orang dari 85 anggota yang aktif. Realisasi pinjaman berkisar antara Rp. 100.000 hingga Rp. 1 juta per orang, dengan bobot terbesar berada pada kisaran terbawah. Sedangkan jangka waktu pinjaman meskipun maksimal boleh 20 bulan tetapi karena jumlah pinjamannya relatif kecil, anggota umumnya mengambil 10 bulan.

Pembayaran angsuran berjalan lancar sehingga dana bisa terus diputar kembali. Untuk mengantisipasi adanya kredit macet, koperasi ini hanya memberikan pinjaman kepada anggota yang lancar membayar angsuran pada peminjaman sebelumnya. Ketentuan tersebut memaksa anggota untuk selalu membayar angsuran tepat waktu agar dapat mengambil pinjaman berikutnya.

Koperasi yang semula hanya beranggotakan ibu-ibu ini, dalam perkembangannya tidak membatasi keanggotaan sehingga saat ini 40% anggotanya adalah kaum bapak. Sedangkan karyawan koperasi yang berjumlah tujuh orang terdiri dari lima perempuan dan dua laki-laki.

Kegiatan koperasi tidak terbatas pada usaha ekonomi saja tetapi juga melakukan kegiatan sosial, antara lain memberikan sumbangan untuk kegiatan PKK, Posyandu dan anak asuh, serta memberikan pinjaman tanpa bunga kepada beberapa masyarakat dusun untuk menyemen lantai rumah mereka yang masih berupa tanah.

## **(6) Koperasi Industri Kerajinan Maju**

Koperasi Industri Kerajinan Maju didirikan pada tahun 1983 di Desa Bendungan oleh masyarakat yang mempunyai usaha. Awalnya koperasi mempunyai empat bidang usaha sesuai dengan jenis usaha anggota, yaitu: jasa las, perkalengan, pandai besi, dan bengkel (sepeda, sepeda motor, dan mobil). Masing-masing bidang usaha tersebut membentuk sentra-sentra yang kemudian lebih menonjol dibandingkan koperasinya yang *mandeg*.

Menghadapi masalah tersebut, pada tahun 1992 Kandeppkop dan Kandepperindag sebagai pembina mengumpulkan kembali semua anggota untuk membahas kelanjutan dari koperasi. Sejak saat itu koperasi yang mempunyai 41 orang anggota ini kembali aktif dan melakukan beberapa kegiatan yang meliputi: simpan-pinjam, arisan, penyediaan bahan baku dan penolong, produksi, pemasaran dan pembinaan. Kegiatan yang tetap aktif sampai sekarang hanya arisan dan simpan-pinjam, sedangkan empat kegiatan lain yang seharusnya menjadi kegiatan pokok karena berkaitan dengan usaha anggota justru tidak jalan.

Pinjaman kepada anggota dikenakan suku bunga sebesar 1,5% per bulan. Besarnya pinjaman tidak dibatasi, tergantung dari ketersediaan dana dan jumlah permohonan pinjaman. Saat ini pinjaman terbesar mencapai Rp. 1,5 juta. Pinjaman diangsur pada setiap pertemuan bulanan dalam waktu 10 bulan atau maksimal satu tahun. Pinjaman diprioritaskan bagi anggota yang berperan aktif, yang dinilai berdasarkan keikutsertaan dalam arisan. Keikutsertaan dalam arisan dijadikan sebagai tolok ukur karena menunjukkan kehadiran dalam pertemuan. Dari 41 anggota, hanya 27 orang yang dinilai aktif.

Dana awal simpan-pinjam berasal dari simpanan anggota berupa simpanan pokok Rp. 10.000 per anggota, simpanan wajib Rp. 500 per bulan dan simpanan sukarela. Pada tahun 1994 dan 1997 koperasi mendapat suntikan dana hibah dari Dekopinda dan Dinas Tenaga Kerja setempat, masing-masing sebesar Rp. 200.000. Setelah itu koperasi hanya mengandalkan perputaran dana sendiri karena tidak ada bantuan lainnya. Pinjaman dari BUMN Pegadaian pernah ditawarkan tetapi karena bunga 18% per tahun dinilai terlalu tinggi maka tawaran tersebut ditolak. Pada April 2000 Dekopinda memberikan pinjaman sebesar Rp. 2 juta. Dana tersebut sebenarnya adalah untuk pembangunan kantor Dekopin yang dipinjamkan sementara sebelum digunakan. Pinjaman tidak dikenakan bunga, hanya dibebani 1% untuk menutupi inflasi yang harus dibayar setiap tiga bulan sekali. Jangka waktu pengembalian pinjaman pokok tidak dibatasi tetapi apabila Dekopinda membutuhkan harus selalu siap membayar.

## **(7) KUD (Koperasi Unit Desa) Bangun**

KUD Bangun Kecamatan Wates yang berlokasi di Desa Bendungan berdiri sejak awal tahun 1978. Wilayah yang dilayani meliputi seluruh desa di Kecamatan Wates. Kegiatan usaha yang dilakukan terdiri dari: jasa pembayaran listrik, dua warung serba ada, dua unit penggilingan beras, wartel, simpan-pinjam, dan terlibat dalam program pemerintah, yaitu penyaluran dana KUT, pengadaan pangan untuk stok nasional, dan pengadaan sarana produksi pertanian.

Unit simpan-pinjam hanya melakukan kegiatan pemberian pinjaman dalam bentuk Kredit Candak Kulak (KCK) sejak tahun 1980. Dana awal KCK adalah hibah dari pemerintah yang diberikan melalui Departemen Koperasi sebesar Rp. 4.700.000. Kas KCK dibuka setiap lima hari sekali sesuai dengan kesepakatan anggota yang bertepatan dengan hari pasar terbesar di Desa Bendungan. Pinjaman berkisar antara Rp. 100.000 – Rp. 200.000, dengan bunga 2% per bulan dan 11 kali angsuran setiap lima hari sekali. Anggota peminjam juga diwajibkan menyeter tabungan 3% per bulan yang pembayarannya disatukan dalam pembayaran angsuran. Tabungan tersebut menjadi hak anggota yang dapat diambil kembali ketika pembagian SHU. Anggota yang aktif meminjam KCK sekitar 30 orang pedagang yang menjual kebutuhan sehari-hari dan hasil pertanian.

Pada awalnya kegiatan KCK ini berjalan lancar sehingga modal bisa berkembang dan jumlah pemberian pinjaman mengalami peningkatan. Tetapi akhir-akhir ini mulai mengalami kemacetan yang ditunjukkan oleh terjadinya tunggakan merah lebih dari Rp. 7 juta. Akibatnya saat ini dana yang tersedia untuk kegiatan pinjaman hanya berjumlah Rp. 3 juta lebih.

### **Kredit Informal**

Sumber kredit informal di kedua desa penelitian cukup banyak akibat banyaknya organisasi informal di tingkat masyarakat yang juga berperan sebagai lembaga perkreditan, baik yang dikelola oleh kaum ibu maupun kaum bapak. Seperti dipaparkan dalam Bab II, di kedua desa ini terdapat beberapa perkumpulan yang terbentuk karena kegiatan pemerintahan, PKK, atau profesi. Hampir semua perkumpulan yang dibentuk oleh masyarakat tersebut, baik di tingkat kecamatan, desa, dusun, RW, RT hingga dasa wisma mempunyai kegiatan simpan-pinjam. Mereka menetapkan aturan ala koperasi, seperti adanya simpanan pokok, wajib, dan sukarela. Semua simpanan ini dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah modal yang bisa dipinjamkan kepada anggotanya. Simpanan biasanya dikembalikan kepada anggota setiap periode tertentu dengan mendapat tambahan semacam SHU atau bunga simpanan yang diperoleh dari bunga pinjaman.

Sumber kredit informal dari jalur pemerintahan yang umumnya dikelola kaum bapak terdiri dari perkumpulan tingkat dusun dan RT. Dari jalur PKK yang dikelola oleh ibu-ibu terdiri dari: PKK kecamatan, PKK desa, PKK dusun, PKK RT, dan Dasa Wisma. Sedangkan dari jalur profesi terdapat Kelompok Tani Ngudi Luhur, Kelompok KWT/DPG, dan jaringan kerja. Selain itu terdapat sumber kredit informal lainnya seperti kios, *mindring*, dan perorangan.

Aturan main dari masing-masing sumber kredit sangat bervariasi, umumnya tergantung dari hasil kesepakatan anggota dan pengurus. Ide kegiatan simpan-pinjam pada kelompok ini biasanya muncul karena adanya keinginan untuk mengurangi peran “bank keliling”, “bank harian”, atau “bank *plecit*” yang biasanya menetapkan bunga sangat tinggi. Menurut berbagai sumber, keinginan tersebut terbukti berhasil dengan berkurangnya - bahkan bisa dikatakan tidak adanya- bank dimaksud yang beroperasi di dalam dusun.

#### **(1) Perkumpulan Tingkat Dusun**

Di Desa Bendungan tidak ada perkumpulan warga di tingkat dusun, sedangkan di Desa Wates yang terdiri dari 16 dusun perkumpulan hanya terdapat di enam dusun. Salah satu perkumpulan tersebut adalah Pra Koperasi Guyub di Dusun Kedunggong. Disebut pra koperasi karena aturan mainnya seperti koperasi, yaitu terdapat Rapat Anggota Tahunan dan sebagainya, tetapi belum berbadan hukum. Kegiatan Guyub terdiri dari arisan, simpan-pinjam, dan kegiatan sosial.

Guyub mulai berdiri pada tahun 1986 dengan anggota 18 orang. Meskipun keanggotaan Guyub terbuka untuk semua warga dusun tetapi tidak semua warga yang berjumlah 192 KK ikut dalam perkumpulan ini. Meskipun demikian jumlah anggota terus bertambah hingga sekarang berjumlah 69 orang. Tingkat kehadiran anggota dalam setiap pertemuan bulanan cukup tinggi, lebih dari 90%.

Arisan ada dua macam, yaitu arisan kecil sebesar Rp. 2.500 (lima penarik setiap pertemuan) yang diikuti oleh seluruh anggota, dan arisan besar Rp. 10.000 orang (tiga penarik) yang hanya diikuti oleh 39 anggota. Dalam setiap pertemuan, anggota membayar sejumlah iuran seperti uang meja untuk suguhan Rp. 500, simpanan wajib Rp. 1.500, dan dana sosial Rp. 200 per bulan. Disamping itu, anggota juga harus membayar simpanan pokok Rp. 5.000 dan simpanan sukarela minimal Rp. 200 untuk setiap pinjaman. Dana sosial diperuntukkan bagi anggota atau keluarganya yang meninggal, sakit, atau melahirkan, serta bagi masyarakat dusun yang jompo dan yatim piatu, dengan sumbangan antara Rp. 10.000 – Rp. 30.000.

Kekayaan Guyub berasal dari kas arisan yang kemudian berkembang dari dana lain seperti dana sosial yang belum digunakan. Pada laporan RAT tahun 1999, kekayaan Guyub mencapai Rp. 12 juta. Dengan kekayaan tersebut Guyub bisa memberikan pinjaman kepada anggota antara Rp. 100.000 – Rp. 700.000. Pinjaman tersebut dikenakan suku bunga 2% per bulan dan diangsur lima kali selama lima bulan. Minat anggota untuk meminjam cukup besar. Hal ini tampak dari uang pemasukan dari angsuran, iuran dan simpanan anggota yang hampir selalu habis untuk memenuhi permintaan pinjaman. Misalnya, pada tahun 1999 total permohonan pinjaman yang masuk setiap bulan berkisar antara Rp. 1,75 juta hingga Rp. 3,75 juta, atau rata-rata Rp. 2,6 juta tetapi yang bisa direalisasikan rata-rata Rp. 2,26 juta. Permohonan pinjaman tersebut biasanya mengalami peningkatan menjelang lebaran dan tahun ajaran baru.

Pada setiap pertemuan Pra Koperasi Guyub selalu menyisakan cadangan Rp. 150.000 untuk dana sosial dan pinjaman mendadak bagi anggota yang mendapat musibah. Khusus pinjaman mendadak tidak dikenakan bunga tetapi harus dibayar pada pertemuan berikutnya. Bila keberatan membayar pada saat pertemuan tersebut pinjaman mendadak bisa dialihkan menjadi pinjaman biasa yang dikenakan bunga.

## **(2) Perkumpulan Tingkat RT**

Meskipun semi informal, organisasi tingkat RT merupakan turunan dari organisasi di tingkat dusun dan desa. Organisasi ini terbentuk sekitar tahun 1980-an sebagai lembaga yang antara lain berfungsi untuk menyampaikan program-program pemerintah ke tingkat masyarakat. Guna lebih mengikat anggota masyarakat untuk selalu hadir dalam pertemuan rutin bulanan atau *selapanan*, kelompok RT di dua desa penelitian biasanya mempunyai kegiatan arisan, yang kemudian juga mengembangkan kegiatan simpan-pinjam. Hampir semua kelompok RT yang berjumlah 48 di Desa Bendungan dan 86 di Desa Wates melakukan kedua kegiatan tersebut disamping kegiatan pengumpulan dana sosial dan pembangunan lingkungan.

Jumlah anggota kelompok RT di Desa Bendungan sekitar 20 – 35 keluarga, sedangkan di Desa Wates yang penduduknya lebih padat anggotanya berkisar antar 25 – 40 keluarga. Meskipun satuan anggotanya keluarga, yang hadir dalam pertemuan adalah kaum bapak, sedangkan kaum ibu hanya datang kalau suaminya berhalangan (jarang terjadi) atau janda. Meskipun demikian peran mereka dalam setiap pertemuan tidak berbeda dan tidak dibedakan.

Sumber dana berasal dari iuran anggota berupa simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dan iuran untuk dana sosial dan dana pembangunan yang belum digunakan. Dengan modal tersebut masing-masing keluarga dapat meminjam antara

Rp. 10.000 – Rp. 500.000. Bunga yang ditetapkan di masing-masing perkumpulan RT sangat bervariasi, dengan kisaran antara 2% hingga 5% per bulan. Jangka waktu pinjaman satu, tiga, atau lima bulan, tergantung kesepakatan masing-masing.

### **(3) PKK Kecamatan**

Kegiatan PKK Kecamatan Wates mulai berjalan sekitar tahun 1985. Selain melakukan program PKK, perkumpulan ini juga melakukan kegiatan arisan dan simpan-pinjam. Anggotanya berjumlah sekitar 35 orang terdiri dari ibu-ibu yang umumnya bertempat tinggal di sekitar kota kecamatan. Latar belakang mereka beragam, mulai dari petani, pedagang, pegawai sampai istri pejabat di tingkat kecamatan dan desa. Semua anggota diwajibkan membayar simpanan pokok sebesar Rp. 1.000, namun sejak tiga tahun terakhir ini meningkat menjadi Rp. 5.000.

Tabungan anggota yang jumlahnya kecil (total sekitar Rp. 1,5 juta) mendapatkan bunga yang besarnya tergantung dari keuntungan yang diperoleh dari pembayaran bunga pinjaman, tetapi biasanya sekitar 12 - 17% per tahun. Dari tabungan anggota dan pengembangan modal, PKK kecamatan ini mempunyai modal lebih dari Rp. 2 juta yang bisa dipinjamkan kepada anggotanya.

Pinjaman yang besarnya berkisar antara Rp. 75.000 – Rp. 500.000 per peminjam, dikenakan bunga 2% per bulan dan diangsur secara bulanan. Jangka waktu pinjaman dibedakan berdasarkan besarnya pinjaman, yaitu lima bulan untuk pinjaman di atas Rp. 100.000 dan tiga bulan untuk pinjaman Rp. 100.000 atau lebih kecil. Meskipun demikian, jangka waktu pinjaman tersebut dibatasi juga oleh saat lebaran. Artinya, pinjaman yang diambil kapanpun harus lunas menjelang lebaran, sehingga pinjaman yang diambil mendekati saat lebaran akan mempunyai jangka pinjaman yang semakin pendek. Kebijakan ini diambil karena pada saat menjelang lebaran semua tabungan anggota akan dibagikan sebagai tambahan biaya lebaran keluarga.

Minat anggota untuk meminjam cukup besar meskipun kadang-kadang ada sisa dana yang tidak dipinjam. Dalam setiap bulan total pinjaman baru berkisar antara Rp. 220.000 hingga Rp. 550.000. Biasanya pengajuan pinjaman meningkat pada saat menjelang tahun ajaran baru untuk membayar biaya sekolah dan membeli keperluan sekolah anak.

### **(4) PKK Desa**

Organisasi PKK di tingkat desa merupakan turunan dari PKK kecamatan. Di kedua desa penelitian terdapat PKK desa tetapi yang dipaparkan berikut ini adalah tentang PKK Desa Bendungan. PKK desa ini mempunyai beragam kegiatan yaitu: kursus menjahit yang diberikan oleh anggota yang menguasai ketrampilan menjahit, arisan, pelatihan dengan mengirimkan anggota sebagai kader desa ke pelatihan di tingkat kecamatan atau kabupaten, dan simpan-pinjam. Ibu-ibu yang aktif sebagai anggota berjumlah 60 orang berasal dari dua dusun yang letaknya dekat dengan kantor desa.

Meskipun PKK desa sudah dibentuk sejak lama tetapi kegiatan simpan-pinjam baru dimulai sejak tahun 1998 setelah mendapat modal dari Bangdes. Bangdes memberikan dana yang dimaksudkan untuk UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Kesejahteraan Keluarga) yang dikelola PKK sebesar Rp. 1.500.000. Setelah dipotong biaya administrasi

sebesar Rp. 200.000, dana tersebut diserahkan secara bertahap, yaitu Maret 1998 Rp. 500.000, Desember 1998 Rp. 400.000, dan Maret 1999 Rp. 400.000.

Hanya dengan mengandalkan dana tersebut karena tidak ada simpanan anggota, PKK desa dapat memberikan pinjaman kepada anggota dengan bunga 5% per jangka pinjaman selama lima bulan, atau 1% per bulan. Angsuran dilakukan setiap bulan bersamaan dengan pertemuan PKK. Besarnya pinjaman maksimal Rp. 200.000 tetapi bagi peminjam awal hanya diberi Rp. 25.000 atau Rp. 30.000. Apabila pembayaran pertama lancar, jumlah pinjaman berikutnya akan dinaikkan. Akibat keterbatasan dana, pada saat ini anggota yang memperoleh giliran meminjam hanya 25 orang.

#### **(5) PKK dusun**

Di Desa Bendungan terdapat 12 dusun, sedangkan di Desa Wates 16 dusun. Hampir di semua dusun tersebut terdapat PKK dusun meskipun tidak semuanya berjalan secara aktif. Jumlah anggota bervariasi antara 30 – 60 orang dan tidak semua warga dusun ikut serta dalam kegiatan ini. Salah satu kegiatan yang dilakukan di PKK dusun adalah simpan-pinjam. Aturan masing-masing PKK dusun berbeda, tergantung dari kesepakatan anggota yang biasanya dipengaruhi oleh kegiatan simpan-pinjam di kelompok lainnya, seperti PKK kecamatan, desa, atau lainnya. Kegiatan simpan-pinjam ini umumnya muncul mulai pertengahan tahun 1990.

Sumber dana PKK dusun umumnya berasal dari simpanan anggota (simpanan pokok, wajib dan suka rela) tetapi ada juga kelompok yang mendapatkan dana tambahan dari pinjaman dana dusun. Jumlah pinjaman berkisar antara Rp. 10.000 – Rp. 200.000, tergantung dari ketersediaan dana, tetapi sebagian besar dibawah Rp. 100.000. Besarnya bunga bervariasi 1% hingga 5% per bulan. Jangka pinjaman antara satu hingga lima bulan tetapi umumnya lima bulan. Di sebagian dusun jangka waktu tersebut tidak terlalu mengikat, yang penting pinjaman harus lunas ketika tutup buku (tahunan) yang waktunya sudah ditentukan. Tingkat pengembalian pinjaman cukup lancar karena kontrol sosial diantara anggota cukup tinggi dan uang yang dipinjamkan merupakan uang anggota untuk anggota.

#### **(6) PKK RT**

Tidak seperti kelompok RT yang dibentuk hampir di semua RT, kelompok PKK RT tidak selalu ada di setiap RT, terutama di RT yang jumlah rumahtangganya sedikit. Hal ini antara lain karena di tingkat RT ada perkumpulan ibu-ibu lainnya, yaitu dasa wisma. Di RT yang jumlah rumahtangganya kecil biasanya anggota dasa wisma bukan hanya 10 rumah tetapi semua ibu dari rumahtangga yang ada di RT tersebut. Karena anggota dan kegiatannya hampir sama maka yang jalan atau dibentuk hanya salah satu saja.

Sesuai dengan kepadatan penduduk, jumlah anggota PKK RT di Desa Bendungan lebih sedikit dibanding di Desa Wates. Di Desa Bendungan sekitar 30 orang sedangkan di Desa Wates sampai 60 orang. Selain melakukan kegiatan PKK, kelompok ini juga melakukan kegiatan arisan dan simpan-pinjam sebagai penarik anggota untuk selalu datang, sekaligus membantu anggota yang membutuhkan modal kecil.

Dana PKK RT umumnya diperoleh dari simpanan anggota, tetapi ada juga kelompok yang mendapat pinjaman dana dari kas RT. Pinjaman yang diberikan kepada anggota

berkisar antara Rp. 10.000 – Rp. 200.000, dengan bunga antara 1% – 2% per bulan. Pembayaran bunga ada yang digabungkan dengan angsuran pinjaman pokok, ada juga yang harus dibayar dimuka untuk mempercepat perputaran modal. Pinjaman yang diangsur pada setiap pertemuan (satu bulan atau 35 hari) ini mempunyai jangka waktu pinjaman antara satu hingga lima bulan. Di beberapa kelompok meskipun jangka waktu sudah ditentukan dalam pelaksanaannya tidak terlalu mengikat sehingga bisa sampai delapan bulan.

### **(7) Dasa Wisma**

Dasa Wisma merupakan kelompok ibu-ibu PKK yang tinggal dalam satu RT dan mulai beroperasi sekitar tahun 1995. Seharusnya kelompok ini terdiri dari 10 keluarga, sesuai dengan namanya dasa wisma yang berarti 10 rumah. Akan tetapi dalam perkembangannya jumlah anggota di masing-masing dasa wisma bervariasi mulai dari 10 hingga belasan orang. Karena cakupan jumlah anggotanya kecil, jumlah dasa wisma di kedua desa penelitian cukup besar, yaitu 104 di Desa Bendungan dan 190 di Desa Wates, dan sebagian besar masih aktif.

Seperti di PKK kecamatan hingga dusun, dasa wisma juga mempunyai kegiatan yang sama, yaitu arisan, simpan-pinjam, dan sosial. Besarnya pinjaman umumnya berkisar antara Rp. 10.000 hingga Rp. 250.000, dengan bunga antara 1% hingga 5% per bulan. Pinjaman dalam jumlah kecil biasanya dibayar langsung pada pertemuan berikutnya, sedangkan pinjaman besar diangsur selama lima bulan. Dana pinjaman berasal dari simpanan anggota yang menerima bunga lebih kecil dari bunga pinjaman atau hanya mendapat SHU yang diperoleh dari bunga pinjaman.

### **(8) Kelompok Tani Ngudi Makmur**

Kelompok Tani Ngudi Makmur merupakan kumpulan petani yang tergabung dalam kelompok P3A (Persatuan Petani Pemakai Air) di Desa Bendungan. Kelompok tani ini merupakan salah satu anggota dari 20 kelompok anggota P3A Kabupaten Kulon Progo. Sesuai dengan berdirinya P3A kabupaten, Kelompok Tani Ngudi Makmur berdiri sejak tahun 1981 dengan anggota aktif 60 orang petani. Selain membahas hal-hal yang berkaitan dengan pertanian, kelompok ini juga mempunyai kegiatan simpan-pinjam.

Guna menghimpun modal pinjaman, anggota kelompok diwajibkan membayar iuran pokok Rp. 25.000, iuran wajib Rp. 1.000/bulan. Pinjaman yang diberikan kepada anggota sebesar Rp. 100.000 – Rp. 700.000. Bunga pinjaman dikenakan 10% per tiga bulan dan pinjaman diangsur pada setiap pertemuan rutin bulanan.

### **(9) Kelompok DPG (Diversifikasi Pangan dan Gizi)**

Kelompok DPG di Desa Bendungan berdiri pada tahun 1990an, terdiri dari 20 ibu tani sebuah dusun yang sebelumnya sudah tergabung dalam Kelompok Wanita Tani (KWT) sejak sekitar tahun 1980. KWT terbentuk dari kelompok tani yang dianggap maju dan bagus. Kelompok ini diharapkan bisa menjadi contoh bagi dusun lainnya, sehingga oleh Dinas Pertanian melalui PPL dibentuk menjadi KWT.

Kegiatan DPG berkaitan dengan pertanian dan masalah gizi, yaitu berupa pemberian anjuran penanaman tanaman bergizi, pemberantasan penyakit, dan usaha perguliran pemeliharaan ternak kambing atau lele. Untuk pemeliharaan kambing atau lele, Dinas Pertanian memberikan dana sebesar Rp. 600.000 pada tahun 1992. Dana tersebut dibagikan kepada 10 orang anggota untuk memelihara 5 kg lele. Karena tidak semua anggota mendapatkan dana, semua anggota iuran sebesar Rp. 500 per bulan untuk memodali anggota lain secara bergilir. Karena kecilnya iuran, hingga saat ini masih ada anggota yang belum mendapat giliran. Karena harga bibit sudah meningkat maka dana pemeliharaan ditingkatkan menjadi Rp. 150.000/anggota, sehingga untuk mendapatkan giliran dibutuhkan 15 bulan. Meskipun demikian, tidak ada anggota yang keberatan menunggu giliran. Bahkan seorang anggota yang semestinya mendapatkan giliran tetapi merasa lebih mampu, menyerahkan haknya untuk anggota lain yang lebih tidak mampu, sementara dia menunggu giliran selanjutnya.

Kelompok DPG ini juga melakukan kegiatan simpan-pinjam. Suku bunga simpanan 2% per bulan, sedangkan pinjaman 5% per bulan. Selisih bunga tersebut digunakan untuk kegiatan sosial bila ada anggota yang mendapat musibah kematian atau dirawat di rumah sakit.

#### **(10) Jaringan Kerja**

Jaringan kerja terbentuk karena adanya kegiatan usaha yang saling berkaitan, seperti antara petani - pedagang pengumpul - pedagang besar - pedagang kecil, antara pemilik bahan baku - industri pengguna - pedagang, dan lain sebagainya. Pada berbagai tahap jaringan tersebut banyak ditemui kegiatan pemberian pinjaman, baik berupa barang maupun uang.

Kegiatan pemberian pinjaman dari jaringan kerja yang ditemui di lapangan antara lain dari pedagang besar kepada pengecer berbagai barang (seperti sayuran, kebutuhan sehari-hari, dan makanan kecil), penghasil barang kerajinan dan alat rumah tangga kepada pedagang, dan dari penghasil makanan kecil kepada pedagang. Pinjaman yang diberikan umumnya berupa barang, yaitu barang diambil dahulu kemudian setelah terjual atau tersedia uang baru dibayarkan. Meskipun pinjaman barang ini biasanya tidak ditentukan jangka waktunya tetapi peminjam umumnya membayar dalam waktu relatif cepat, tidak lebih dari satu minggu.

Pinjaman barang atau biasa disebut 'mengambil barang dahulu', relatif lebih banyak ditemui di Desa Bendungan dibanding Desa Wates. Beberapa pedagang menyatakan bahwa pinjaman barang di Desa Bendungan tidak dikenakan biaya atau bunga sehingga harga barang tetap sama antara yang dibayar tunai maupun beberapa hari kemudian, sementara di Desa Wates terdapat selisih harga. Fenomena ini tampaknya dipengaruhi oleh perbedaan kondisi kedua desa. Desa Wates lebih berciri perkotaan sehingga aspek ekonominya lebih menonjol dibanding aspek sosial.

#### **(11) Kios**

Meskipun kedua desa dapat digolongkan sebagai wilayah perkotaan, tetapi kios masih merupakan sumber pinjaman yang tidak mengenakan bunga. Di Desa Wates kios yang dapat memberikan pinjaman atau 'bon' lebih terbatas pada kios yang terdapat di tengah pemukiman penduduk, sedangkan di Desa Bendungan lebih luas hingga ke kios atau los

yang terdapat di pasar. Walaupun demikian peminjam dibatasi untuk mereka yang sudah dikenal seperti tetangga.

Jumlah peminjam di kios yang terdapat di pemukiman relatif lebih banyak (sekitar 20 orang/kios) tetapi jumlah pinjamannya kecil (sekitar Rp. 5.000 per orang), sedangkan jumlah peminjam di pasar sangat sedikit tetapi dengan jumlah pinjaman lebih besar (bisa mencapai Rp. 1 juta). Pinjaman di kios biasanya untuk kebutuhan sehari-hari sehingga frekuensinya lebih banyak dibanding pinjaman di pasar yang digunakan untuk keperluan 'hajatan'. Umumnya jangka waktu pembayaran tergantung dari janji si peminjam, biasanya tidak lebih dari satu minggu atau setelah selesai 'hajatan'.

### Box 1

#### Kios yang terlibat dalam kredit jaringan sekaligus pemberi pinjaman

Berbekal pengalaman membantu kakaknya berjualan di Kutoarjo, 14 tahun yang silam Ibu A (32 tahun) membuka warung di rumahnya yang merupakan warung pertama di Dusun Bendungan Lor, Desa Bendungan. Dengan membuka warung berukuran 6 m<sup>2</sup> ini Ibu A bisa membantu suaminya, seorang pekerja serabutan yang kadang-kadang bekerja di pengrajin kaleng atau sebagai tukang batu. Saat baru dibuka, warung ini mempunyai banyak pembeli sehingga tugasnya sebagai ibu rumahtangga sering terbengkalai. Tetapi sekarang jumlah warung di dusun berkembang menjadi sekitar 15 warung ditambah tiga pedagang sayur keliling, sehingga jumlah pembeli jauh berkurang menjadi tinggal seperempat dibanding dulu. Dengan kondisi ini sulit baginya membiayai tiga anak yang masih sekolah.

Warung Ibu A menjual berbagai kebutuhan sehari-hari seperti beras, minyak goreng, sayur-mayur, tempe, hingga jajanan anak kecil. Barang dagangan tersebut merupakan hasil *kulakan* dari Pasar Wates berkisar antara Rp. 100.000 hingga Rp. 500.000 per hari.

Untuk memenuhi kebutuhan modal, Ibu A yang hanya berpendidikan SD, tidak mau meminjam uang ke bank karena khawatir tidak mampu membayar cicilan secara rutin. Ia hanya berhutang kepada pedagang tempat Ia berbelanja di Pasar Wates dengan mengambil dahulu sebagian barang belanjanya. Pinjaman tersebut biasanya dibayar ketika berbelanja kembali keesokan harinya dan tidak dikenakan bunga sama sekali. Sebaliknya, sebagai pemilik kios, Ibu A juga biasa memperbolehkan tetangga dekatnya untuk "ngebon" sebagian belanjaan. Pinjaman dalam jumlah kecil ini (sekitar Rp. 10.000 per orang) dibayar beberapa hari hingga satu bulan kemudian tanpa dikenakan bunga.

#### (12) *Mindring*

Di wilayah penelitian kegiatan *mindring* atau penjualan barang berkeliling dari dusun ke dusun yang pembayarannya diangsur, sudah lama tidak berkembang. Meskipun di kedua wilayah penelitian terdapat pedagang *mindring* yang menetap tetapi wilayah operasinya di luar desa, dan penduduk desa setempat yang memanfaatkan hanya satu dua orang saja.

Di Desa Wates aktifitas sejenis yang mulai berkembang beberapa tahun terakhir ini adalah *mindring* terorganisir, yaitu *sales* yang mengaku dari pabrik tertentu. Mereka memperkenalkan produknya melalui demo yang cukup meyakinkan (seperti barang pecah

belah yang tidak pecah ketika dibanting dan alat masak yang bisa memasak dengan cepat), pada saat pertemuan rutin ibu-ibu, baik dasa wisma, RT, maupun dusun. Barang yang ditawarkan adalah berupa peralatan kosmetik, kompor gas, peralatan dapur, atau barang-barang lainnya yang tergolong mahal. Barang tersebut biasanya dicicil sampai delapan bulan, dan perbedaan harga dengan pembayaran tunai bisa mencapai dua kali lipat.

### **(13) Perorangan (Saudara, Tetangga atau Kenalan)**

Saudara, tetangga atau kenalan, juga merupakan sumber pinjaman informal bagi masyarakat di kedua desa, terutama di Desa Bendungan. Pinjaman ini relatif mudah tetapi sangat tergantung pada ketersediaan modal dan pemberi pinjaman. Pinjaman biasanya dilakukan untuk keperluan mendadak, seperti ada keluarga yang sakit atau meninggal. Pembayaran dilakukan secara sekaligus sekitar satu bulan kemudian dan tidak dikenakan biaya atau bunga.

### **Kredit Program**

Kredit program merupakan kredit dari pemerintah yang diberikan kepada masyarakat untuk tujuan tertentu, misalnya untuk menanggulangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan keluarga, meningkatkan kegiatan usaha, dan sebagai Jaring Pengaman Sosial. Kredit program yang dijumpai di wilayah penelitian adalah: UED-SP, Kukesra, KPKU, KUT, P2KP, dan PDM-DKE.

Secara umum pelaksanaan kredit program di wilayah penelitian relatif lancar<sup>17</sup>. Hal ini karena dukungan kelembagaan di tingkat masyarakat yang sudah terbangun dengan baik akibat tumbuh kembangnya berbagai organisasi kemasyarakatan informal dan formal, yang sebagian besar diprakarsai oleh mereka sendiri. Dengan kemampuan organisasi dan kelembagaan yang baik, ketika kredit program turun (biasanya sebagian atau seluruh kegiatannya harus dikelola oleh masyarakat sendiri), mereka sudah siap melaksanakannya. Disamping itu kebiasaan bekerja secara transparan yang sudah terbentuk dalam organisasi mereka turut mempengaruhi keberhasilan kredit program. Namun demikian, beberapa kalangan mempertanyakan pembentukan lembaga kredit baru padahal di desa tersebut sudah ada lembaga kredit yang dikelola oleh masyarakat. Tampaknya akan lebih baik bila dana tersebut dimasukkan ke dalam lembaga kredit yang sudah berjalan dengan baik sehingga hanya perlu memperkuat bidang administrasinya tanpa harus menata sistem organisasi baru.

### **(1) UED-SP (Usaha Ekonomi Desa Simpan-Pinjam)**

UED-SP merupakan salah satu upaya untuk membangun daerah perdesaan yang diwujudkan dalam kegiatan usaha ekonomi berupa simpan-pinjam. UED-SP dibentuk berdasarkan hasil musyawarah LKMD dan dibahas dalam rapat LMD untuk kemudian

---

<sup>17</sup> Hasil studi SMERU terdahulu tentang kredit perdesaan menunjukkan bahwa pelaksanaan hampir semua jenis kredit program seperti IDT, PDM-DKE, UED-SP dan UP2K di wilayah penelitian (kecuali di Kupang) telah gagal, dan yang bersifat dana bergulir (*revolving fund*) terhenti pada putaran pertama atau kedua. Kegagalan kredit program ini umumnya disebabkan oleh: (i) masyarakat cenderung tidak mengembalikan kredit karena dana kredit dianggap sebagai sumbangan dari pemerintah atau donor; (ii) kredit diberikan dengan bunga rendah atau tanpa bunga, sehingga penggunaan kredit sering tidak jelas atau bersifat konsumtif; (iii) kredit diberikan kepada *kelompok* sehingga pertanggungjawabannya tidak jelas; (iv) tidak ada sanksi apabila tidak membayar; (v) ada indikasi sebagian dana jatuh ke tangan aparat atau anggota keluarga aparat; (vi) manajemen pengelolaan dana kurang jelas; dan (vii) sistem pendampingan kurang baik.

ditetapkan menjadi keputusan desa. Meskipun UED-SP milik pemerintah desa tetapi pengelolanya adalah masyarakat.

Ciri-ciri lembaga simpan-pinjam ini adalah: (1) milik desa tetapi kekayaannya terpisah dari kekayaan desa; (2) di bawah naungan LKMD dengan organisasi sederhana yang dikelola oleh masyarakat desa setempat; (3) tumbuh dari bawah dan berazaskan gotong-royong atau kebersamaan; (4) pemberian kredit mudah, murah/ringan, cepat dan dikelola dengan prinsip keuangan formal; dan (5) keberadaannya dalam satu batas wilayah administratif desa.

Tujuan UED-SP adalah:

- Menciptakan iklim permodalan yang kondusif di perdesaan dan mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa;
- Menghimpun dana melalui musyawarah anggota;
- Memberikan pinjaman modal kepada masyarakat untuk modal usaha baru atau pengembangan usaha;
- Membantu pemerintah desa dalam usaha meningkatkan sumber PAD;
- Mengurangi dan mengatasi sistem ijon, pelepas uang, gadai gelap dan kegiatan sejenis lainnya;
- Membantu masyarakat dalam menyediakan modal yang murah, mudah dan cepat dalam rangka menumbuhkembangkan usaha ekonomi desa;
- Menciptakan jiwa kewirausahaan bagi masyarakat desa; dan
- Melestarikan keberadaan dana atau modal yang masuk ke desa.

Sasaran UED-SP adalah masyarakat berpendapatan rendah di wilayah yang potensial berkembang dan berkeinginan untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan modalnya diperoleh dari dua sumber, yaitu dari pemerintah melalui Inpres Bantuan Pembangunan Desa (Bangdes) dan dari masyarakat yang dikumpulkan dari simpanan wajib pinjaman (5% dari jumlah pinjaman untuk peminjam mingguan dan 10% untuk peminjam bulanan), simpanan wajib anggota (Rp. 2.000 per anggota), simpanan sukarela (minimal Rp. 1.000 pada awal dan Rp. 500 pada simpanan berikutnya), dan usaha-usaha lain yang sah.

Semua simpanan anggota bisa diambil kembali oleh anggota pada waktu yang sudah ditentukan. Simpanan wajib pinjaman dapat diambil menjelang hari raya atau hari besar setelah pinjaman lunas. Jumlah yang bisa diambil adalah 50% dari saldo simpanan wajib pinjaman. Simpanan wajib anggota bisa diambil pada saat berhenti menjadi anggota, sedangkan simpanan sukarela bisa diambil setiap saat ketika kas buka. Simpanan sukarela ini mendapat bunga yang besarnya disesuaikan dengan kesepakatan anggota.

UED-SP dikelola oleh tiga orang yang bertugas sebagai ketua, kasir dan juru tagih. Mereka mendapatkan honor sebesar 2,5% dari angsuran pokok pinjaman yang diterima setiap bulan dengan perincian: ketua 35%, kasir 30%, dan juru tagih 35% (25% juru tagih dan 10% tambahan tenaga administrasi).

Modal UED-SP dari dana Bangdes sebesar Rp. 5.675.000 dicairkan secara bertahap. Tahap pertama yang merupakan modal dasar diterima pada akhir tahun 1996 sebanyak Rp. 2.375.000, tahap kedua Rp. 1,5 juta pada pertengahan 1997, dan tahap ketiga Rp. 1,8 juta pada tahun 1998. Dengan dana tersebut ditambah dengan sumber lainnya, UED-SP dapat memberikan pinjaman maksimal Rp. 300.000 sesuai dengan usaha peminjam. Pola

angsuran pinjaman adalah mingguan selama 12 minggu dan bulanan selama enam bulan. Suku bunga pinjaman masing-masing adalah 5% dan 12% per jangka waktu pinjaman.

Segera setelah dana Bangdes tahap pertama turun, UED-SP di Desa Bendungan dibuka pada bulan Januari 1997. Dengan modal awal sebesar Rp. 2.375.000, jumlah masyarakat yang mendapat pinjaman pertama adalah 24 orang yang tersebar merata di semua dusun, yaitu dua orang per dusun. Pinjaman diperuntukkan khusus untuk masyarakat yang mempunyai usaha dagang, sedangkan aparat desa atau istrinya tidak diperbolehkan meminjam meskipun mempunyai usaha dagang. Ketentuan ini diambil untuk mengantisipasi timbulnya penilaian negatif dari masyarakat.

Pada awalnya UED-SP Desa Bendungan memberlakukan dua macam pinjaman sesuai ketentuan, yaitu mingguan dan bulanan. Dalam perkembangannya pinjaman bulanan kurang diminati masyarakat sehingga saat ini hanya pinjaman mingguan saja yang dikembangkan. Jumlah pinjaman maksimal sesuai dengan ketentuan, yaitu Rp. 300.000, tetapi baru bisa diberikan setelah beberapa tahap pinjaman, karena besarnya pinjaman diberikan secara bertahap sambil mengukur kemampuan dan kemauan nasabah untuk mengembalikan pinjaman. Pinjaman untuk nasabah baru hanya berkisar antara Rp. 50.000 – Rp. 100.000.

UED-SP di desa ini dibuka seminggu sekali, setiap hari Rabu mulai pukul 09.00 hingga 14.00 WIB. Permohonan maupun angsuran pinjaman dilakukan pada hari tersebut. Permohonan pinjaman biasanya cair seminggu setelah pengajuan. Untuk bisa mengajukan pinjaman, masyarakat yang mempunyai usaha harus menjadi anggota terlebih dahulu dengan membayar simpanan wajib Rp. 2.000. Syarat KTP yang sebelumnya diberlakukan, sudah dihapuskan karena dinilai merepotkan calon peminjam.

Selama kegiatan simpan-pinjam berlangsung, angsuran dari nasabah relatif lancar, terutama dari nasabah baru. Hingga saat ini peminjam yang diputihkan hanya dua orang dengan jumlah pinjaman Rp. 228.000.

Pinjaman UED-SP hanya diminati oleh para pedagang kecil karena jumlah pinjamannya relatif kecil dan melalui pentahapan. Meskipun demikian, pada saat ini dananya sudah berkembang menjadi Rp. 8,8 juta dengan jumlah nasabah peminjam 59 orang.

Bagi pengurus, kegiatan UED-SP ini bisa dikatakan sebagai kegiatan sosial karena hasil yang diperoleh kurang seimbang dengan tenaga dan pikiran yang dikeluarkan. Sebagai gambaran, dalam setahun pengurus hanya memperoleh sekitar Rp. 90.000 per orang, padahal mereka harus melayani nasabah seminggu sekali dan harus membuat laporan bulanan untuk PMD kecamatan.

Seperti di Desa Bendungan, UED-SP di Desa Wates juga mempunyai aturan simpan-pinjam sesuai ketentuan dan dibuka setiap hari Rabu. Selain dari dana Bangdes dan anggota, lembaga ini mendapat tambahan modal dari LKMD yang menitipkan dana sebesar Rp. 1 juta. UED-SP Desa Wates lebih berkembang dibandingkan UED-SP Desa Bendungan bila dilihat dari jumlah anggota yang berjumlah 121 orang dan jumlah modal Rp. 12 juta. Peminjam adalah para pedagang yang berjualan di pasar atau pemukiman, 70% diantaranya adalah perempuan.

Tidak seperti di Desa Bendungan, pinjaman bulanan di UED-SP Desa Wates tetap berkembang bahkan lebih banyak peminatnya karena dirasakan ada tenggang waktu pembayaran. Sekitar 50% angsuran pinjaman berjalan lancar, 25% menunggak tetapi masih bisa ditagih meskipun waktu pinjamannya menjadi bertambah satu hingga dua minggu, dan 25% macet tetapi terus ditagih. Kredit macet umumnya dari pedagang kecil. Guna menghindari kemacetan, pemberian pinjaman dilakukan lebih selektif, yaitu mereka yang pernah menunggak hanya diberi pinjaman dalam jumlah kecil.

## (2) Kukesra (Kredit Usaha Keluarga Sejahtera)

Kukesra tidak dapat dipisahkan dari Takesra (Tabungan Keluarga Sejahtera), karena keduanya saling terkait, yaitu untuk mendapatkan Kukesra masyarakat harus memiliki Takesra terlebih dahulu. Takesra dan Kukesra merupakan bentuk tabungan dan pinjaman yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kondisi keluarga melalui pengembangan usaha produktif, mendidik masyarakat agar gemar menabung di lembaga perbankan, dan untuk meningkatkan peranan bank dalam pemberian kredit pada segmen retail. Bentuk tabungan dan pinjaman ini ditujukan bagi kelompok KPS dan KS-1 alasan ekonomi yang tidak sedang menikmati fasilitas kredit dari sumber lain. Pelaksanaannya dilakukan melalui kerjasama antara Bank BNI dan PT. Pos Indonesia sebagai penyelenggara, serta BKKBN sebagai pembina atau pembimbing kelompok masyarakat. Untuk bisa menabung dan mendapatkan pinjaman, keluarga harus membentuk kelompok usaha bersama atau UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) terlebih dahulu. Takesra memberikan bunga sebesar 12% per tahun, sementara Kukesra menetapkan bunga merata yang ekuivalen dengan suku bunga efektif sebesar 6% per tahun. Untuk tujuan proses pembelajaran, Kukesra diberikan melalui lima tahap, yaitu:

**Tabel 14. Pentahapan Skema Kukesra**

Tahap	Jangka Waktu Kredit (bulan)	Maksimum Kredit (Rp/anggota)	Dana Ditahan di Takesra 10% (Rp)	Kredit yang Digunakan (Rp/anggota)
I	4	20.000	2.000	18.000
II	4 – 6	40.000	4.000	36.000
III	4 – 8	80.000	8.000	72.000
IV	4 – 12	160.000	16.000	144.000
V	4 – 16	320.000	32.000	288.000

Sumber: Buku Bantu Pegangan PLKB, PKB dan Kader tentang Takesra, Kukesra dan KPKU. BKKBN Nusa Tenggara Timur, 2000.

Di Kabupaten Kulon Progo program Takesra dimulai sejak tahun 1995 dan Kukesra setahun kemudian. Dana Kukesra diperoleh dari Yayasan Sejahtera Mandiri yang disalurkan melalui BNI ke kantor pos, kemudian ke kelompok dan para anggota. Dana ini sifatnya abadi sehingga bisa terus digulirkan.

Realisasi penyaluran Kukesra di Kabupaten Kulon Progo hingga bulan Juli 2000 (selama hampir empat tahun) mencapai Rp. 12,7 milyar. Berdasarkan pentahapan Kukesra, tampak bahwa realisasi penyaluran mengalami peningkatan hingga tahap IV tetapi

kemudian menurun pada tahap V. Keadaan ini antara lain karena penyaluran tahap V belum terealisasi secara penuh, antara lain disebabkan adanya tunggakan di tahap sebelumnya. Total penyaluran di Kecamatan Wates berjumlah Rp. 860 juta atau mencapai 6,77% dari total Kabupaten Kulon Progo. Sementara itu di Desa Bendungan mencapai Rp. 104 juta dan di Desa Wates Rp. 82,6 juta. Alur realisasi per tahap di tingkat kecamatan hampir sama dengan di kabupaten, yaitu meningkat hingga tahap IV, dan pada tahap V mengalami penurunan meskipun jauh lebih sedikit dibanding di tingkat kabupaten. Berdasarkan kenyataan ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kukesra di Kecamatan Wates lebih lancar dibanding rata-rata kecamatan lainnya (lihat Tabel 15).

Berdasarkan data BKKBN tingkat Kecamatan (PPLKB) Wates, pada akhir September 2000 realisasi tahap V sudah bertambah menjadi Rp. 411 juta atau meningkat 32% dibanding tahap sebelumnya. Dari total Kukesra yang disalurkan di Kecamatan Wates terjadi penunggakan sebesar Rp 18,58 juta, atau hanya 1,9%, antara lain terjadi di Desa Bendungan Rp. 4,27 juta dan di Desa Wates Rp. 902.900. Jumlah anggota yang sedang meminjam berjumlah 2.189 orang dengan pinjaman sebesar Rp. 542,72 juta. Anggota yang berasal dari Desa Bendungan berjumlah 375 orang dengan pinjaman Rp. 111,04 juta, sedangkan dari Desa Wates 297 orang dengan pinjaman Rp. 62,16 juta.

Tunggakan pengembalian Kukesra di Desa Bendungan dan Desa Wates terjadi di tingkat ketua kelompok sedangkan dari pihak anggota sudah lunas. Menurut keterangan masyarakat dan tokoh setempat, terjadinya penunggakan tersebut dipicu oleh tidak adanya sanksi bagi kelompok lain yang sudah menunggak sebelumnya. Bila tingkat kelancaran pengembalian angsuran dari anggota ditinjau per tahapan Kukesra, maka pengembalian untuk tahap I hingga IV lancar, sedangkan tahap V agak tersendat. Hal ini terjadi karena besarnya angsuran tahap I hingga IV relatif kecil sehingga masih bisa dipenuhi tepat waktu. Menurut pihak BKKBN, secara umum tingkat tunggakan semakin besar dengan semakin besarnya pinjaman dan mengalami peningkatan selama krisis.

Pinjaman Kukesra dimulai dengan nilai yang sangat kecil yaitu Rp. 20.000. Bagi para ibu yang tergolong KPS/KS1 di wilayah penelitian pinjaman ini bisa digunakan untuk kegiatan ekonomi produktif seperti membuat makanan kecil dan es mambo. Program ini bermanfaat bagi ibu-ibu setempat dalam menunjang ekonomi keluarga. Seorang ketua kelompok UPPKS yang beranggota 18 ibu peminjam Kukesra menuturkan bahwa kondisi ekonomi keluarga para anggota mengalami peningkatan setelah adanya program ini. Hal itu terlihat dari kondisi rumah yang sebelumnya hanya berlantai tanah menjadi bersemen atau yang tidak permanen menjadi lebih permanen dengan pondasi tembok. Meskipun sebagian dari mereka mendapat dana untuk menyemen lantai atau membuat pondasi dari pinjaman koperasi tetapi angsurannya dibayar dari hasil jualan ibu-ibu.

**Tabel 15. Realisasi Penyaluran Kukesra di Desa Bendungan, Desa Wates, Kecamatan Wates dan Kabupaten Kulon Progo**

Tahap	Desa Bendungan			Desa Wates			Kecamatan Wates			Kabupaten Kulon Progo		
	Jumlah Kelompok	Jumlah Anggota (Orang)	Realisasi (Rp. 000)	Jumlah Kelompok	Jumlah Anggota (Orang)	Realisasi (Rp. 000)	Jumlah Kelompok	Jumlah Anggota (Orang)	Realisasi (Rp. 000)	Jumlah Kelompok	Jumlah Anggota (Orang)	Realisasi (Rp. 000)
I	24	351	7.020	25	408	8.160	115	2.048	40.960	1.938	39.311	786.220
II	24	351	14.040	24	395	15.800	107	1.842	73.680	1.685	34.133	1.377.330
III	24	351	28.080	24	395	31.600	100	1.771	141.680	1.415	28.723	2.297.840
IV	21	295	47.200	23	115	18.400	120	1.950	312.000	1.786	37.703	6.032.480
V	2	24	7.680	2	27	8.640	66	912	291.840	487	6.909	2.208.960
Total			104.020			82.600			860.160			12.702.830

Sumber: Analisa Pengendalian Proyek Gerakan Keluarga Berencana Nasional dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Kabupaten Dati II Kulon Progo Tahun 1999/2000. BKKBN Kabupaten Kulon Progo, Juli 2000.

### **(3) KPKU (Kredit Pengembangan Kemitraan Usaha)**

KPKU merupakan kelanjutan dari skema kredit Kukesra. Kedua jenis kredit ini dikelola oleh bank dan BKKBN. Apabila pada Kukesra proses pengambilan dan pembayaran harus dilakukan melalui Kantor Pos Pembantu, maka pada KPKU kelompok masyarakat langsung berurusan dengan bank. Untuk mendapat kredit ini selain harus mempunyai kelompok usaha yang dinilai baik, masyarakat juga harus mempunyai mitra usaha dengan koperasi atau pengusaha kecil/menengah (PKM). Bentuk kemitraan usaha yang diharapkan adalah dalam (1) penyediaan modal, produksi atau teknologi; (2) pengolahan, pengemasan, pemasaran; dan (3) pembelian dan jasa lainnya. Melalui kemitraan ini diharapkan bisa dikembangkan jaringan ekonomi yang kuat untuk mendukung upaya peningkatan kesejahteraan keluarga. Selain untuk kelompok masyarakat, kredit ini juga ditujukan untuk koperasi atau PKM yang bermitra, meskipun sumber dananya berbeda. Dana koperasi atau PKM diperoleh dari BUMN (Badan Usaha Milik Negara) sedangkan untuk kelompok masyarakat berasal dari YDSM (Yayasan Dana Sejahtera Mandiri).

KPKU merupakan salah satu bentuk Prokesra (Program Kesejahteraan Rakyat), disamping Takesra dan Kukesra. Di Kabupaten Kulon Progo, KPKU mulai dilaksanakan sejak tahun 1998. Meskipun KPKU seperti Kukesra diberikan kepada kelompok UPPKS, tetapi targetnya berbeda. Kukesra ditujukan untuk KPS dan KS I sedangkan KPKU untuk mereka yang memiliki usaha produktif dan mitra usaha, yang umumnya mempunyai tingkat kesejahteraan lebih tinggi.

Dana KPKU yang sudah dikembalikan masyarakat tidak digulirkan sepenuhnya untuk program KPKU tahap perguliran karena program ini dijadikan satu paket dengan program pemberantasan kemiskinan lainnya, yaitu KPTTG (Kredit Penggunaan Tehnologi Tepat Guna) yang dikelola oleh PMD dan diperuntukkan bagi industri rumah tangga yang menggunakan teknologi. Sebagian dana KPKU dialihkan untuk program KPTTG sehingga anggaran untuk KPKU tahap perguliran menjadi menurun dari tahun ke tahun. Menurut BKKBN tingkat kabupaten, dana KPKU tahun 1998 berjumlah Rp. 316,5 juta, tahun 1998/99 Rp. 186 juta, dan tahun 1999/2000 menurun menjadi Rp. 124,52 juta. Keterbatasan dana tersebut menyebabkan pinjaman yang menurut aturan bisa diberikan maksimal Rp. 50 juta per kelompok hanya terealisasi Rp. 30 juta.

Karena penyaluran dan pengembalian angsuran dilakukan melalui kelompok, keberhasilan program KPKU sangat tergantung pada kesiapan kelompok. Oleh karena itu proses seleksi terhadap kelompok UPPKS harus dilakukan dengan ketat. Di Kabupaten Kulon Progo pelaksanaan program ini dinilai cukup berhasil (dilihat dari kecilnya tunggakan) karena UPPKS penerima dipilih yang sudah mempunyai organisasi dan usaha yang baik. Proses seleksi dilakukan oleh sebuah tim terdiri dari BKKBN, BRI, PMD, Bappeda, dan beberapa dinas terkait. Sebagai gambaran dari ketatnya pemilihan kelompok, dari 2.143 kelompok UPPKS yang mendapatkan dana Kukesra hanya 36 kelompok yang memperoleh KPKU-Plus (tahap perguliran).

Berdasarkan data BRI Cabang Kulon Progo yang bertindak sebagai bank penyalur, pada Agustus 2000 dana KPKU yang disalurkan mencapai Rp. 310,52 juta. Sebagian besar pinjaman sudah dilunasi, hanya Rp. 1,2 juta yang masih ditunggak oleh satu kelompok dari luar wilayah penelitian. Penunggakan tersebut terjadi karena kelompok tersebut terkena musibah sehingga sementara tidak bisa membayar angsuran.

Minat masyarakat, khususnya yang sudah tergabung dalam kelompok UPPKS di wilayah penelitian untuk mendapatkan kredit ini cukup besar. Hal ini karena tingkat bunga 6,5% per tahun merata dan pembayaran angsuran bulanan selama satu tahun dianggap ringan. Akan tetapi karena keterbatasan dana, hanya satu atau dua kelompok per desa yang menerima dana tersebut.

Sebuah kelompok UPPKS di Desa Bendungan yang terdiri dari 10 anggota memperoleh dana Rp. 6 juta sehingga masing-masing anggota menerima Rp. 600.000. Kegiatan usaha anggota bervariasi, yaitu tukang jok mobil, pedagang benih tanaman pertanian, pedagang makanan kecil, dan usaha warung nasi.

#### **(4) P2KP (Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan)**

P2KP merupakan program penanggulangan kemiskinan struktural maupun yang diakibatkan oleh krisis ekonomi melalui pemberian bantuan kepada masyarakat miskin di perkotaan. Bantuan diberikan dalam bentuk dana yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan yang diusulkan masyarakat, juga untuk pendampingan teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Dana bantuan P2KP yang disalurkan kepada kelompok-kelompok swadaya masyarakat (KSM) dapat dimanfaatkan untuk modal usaha produktif, pembangunan prasarana dan sarana dasar lingkungan, serta pengembangan sumber daya manusia. Dana modal usaha produktif merupakan dana pinjaman bergulir yang dikelola masyarakat melalui wadah yang disebut Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang beranggotakan tokoh masyarakat, perwakilan KSM, dan warga, serta dibantu oleh Konsultan Manajemen Wilayah (KMW). Sedangkan dana untuk pembangunan merupakan dana hibah yang tidak perlu dikembalikan.

Dana P2KP diperoleh dari pinjaman beberapa lembaga donor, terutama Bank Dunia, kepada Pemerintah Indonesia. Secara keseluruhan, biaya proyek diperkirakan berjumlah US\$ 100 juta untuk tiga tahun anggaran, mulai 1999/2000. Dana untuk modal usaha produktif akan dipinjamkan kepada perorangan maupun keluarga miskin yang tergabung dalam KSM. Pinjaman dikenakan bunga dan harus dikembalikan dalam masa 18 bulan. Dana yang dikembalikan merupakan dana bergulir yang menjadi hak KSM miskin lainnya di kelurahan yang sama<sup>18</sup>.

Pada tahap I, lokasi sasaran P2KP terdiri atas 57 Dati II di wilayah pantai utara Jawa, ditambah DIY, Kabupaten dan Kota Bandung, serta Kabupaten dan Kota Malang. Di Kabupaten Kulon Progo P2KP untuk tahun anggaran 1999/2000 dimulai pada bulan Agustus 1999. Dana Rp. 2 milyar yang diperoleh dialokasikan untuk delapan desa, sehingga masing-masing desa mendapat Rp. 250 juta. Bunga pinjaman modal usaha ditetapkan 1,5% per bulan yang akan digunakan untuk penambahan modal 0,75% dan jasa pengurus 0,75%. Besarnya tingkat suku bunga tersebut ditentukan oleh BKM yang anggotanya diwakili dari dusun-dusun. Tingkat suku bunga yang sama dengan suku bunga pinjaman di lembaga perbankan lainnya tersebut dinilai terlalu tinggi oleh berbagai kalangan.

Khusus di Kecamatan Wates, yang memperoleh P2KP hanya satu desa, yaitu Desa Wates. Meskipun sasaran penerima bantuan P2KP difokuskan pada satuan permukiman kelurahan, tetapi karena Desa Wates merupakan daerah perkotaan maka desa ini bisa mendapat bantuan tersebut. Sementara Desa Bendungan walaupun sudah sempat diikutsertakan dalam kegiatan sosialisasi belum mendapat bantuan.

---

<sup>18</sup> Buku Satu Pedoman Umum P2KP.

Di Desa Wates, dari jatah alokasi Rp. 250 juta baru Rp. 100 juta atau 40% yang sudah cair pada tahap I bulan April 2000. Perincian penggunaan dana tersebut adalah sebagai berikut:

- Fasilitator kelurahan (faskel) 2% = Rp. 2 juta
- Biaya operasional BKM 2% = Rp. 2 juta
- Cadangan (10% dari sisa) = Rp. 9,6 juta
- Dipinjamkan kepada KSM = Rp. 86 juta

Pengajuan pinjaman dari 20 KSM yang tersebar di sepuluh dusun dengan anggota 52 orang mencapai Rp. 174,55 juta dengan kisaran antara Rp. 500.000 – Rp. 12 juta per orang. Jumlah anggota pada setiap KSM tidak merata dan tidak berstruktur, bervariasi antara satu hingga delapan orang. Setelah dilakukan uji kelayakan oleh sebuah tim, realisasi pinjaman hanya Rp. 63,8 juta atau antara Rp. 300.000 – Rp. 4 juta per anggota.

Meskipun berdasarkan aturan pinjaman P2KP diberikan untuk modal usaha perorangan atau keluarga miskin, tetapi dalam pelaksanaannya yang bisa mengajukan pinjaman hanya pemilik usaha kecil produktif, seperti warung, yang sebagian besar bukan berasal dari golongan miskin. Hal ini terjadi karena adanya tuntutan kelancaran pengembalian untuk perguliran selanjutnya, yang lebih bisa dipenuhi oleh mereka yang relatif bermodal. Syarat pengajuan dana adalah mengisi formulir yang diserahkan kepada BKM 'Nugroho' oleh Ketua kelompok KSM yang dilampiri (i) fotocopy KTP anggota kelompok; (ii) riwayat perusahaan; (iii) kekayaan perusahaan per anggota; dan (iv) perkiraan hasil kotor/bersih per bulan.

Guna mengantisipasi adanya kredit macet dilakukan beberapa upaya, yaitu dengan mensosialisasikan seolah-olah dana tersebut bukan dari pemerintah tetapi milik lembaga keuangan BKM, dan menciptakan sistem sanksi. Sanksi bagi kredit macet tidak hanya dikenakan pada orang yang bersangkutan tetapi juga pada KSM secara keseluruhan karena adanya jaminan tanggung renteng. Bahkan masyarakat di seluruh RT hingga dusun yang bersangkutan tidak akan mendapat hak untuk meminjam. Meskipun demikian permasalahan tunggakan tetap saja muncul yang dilakukan oleh tiga KSM (salah satu anggotanya adalah pengurus BKM). Tunggakan tersebut diperkirakan karena kelompok tersebut mengetahui bahwa dana P2KP merupakan dana dari pemerintah sehingga tidak perlu dikembalikan. Meskipun ada masalah tersebut, saat ini dana P2KP sudah memasuki tahap perguliran untuk empat KSM lain dengan jumlah pinjaman sekitar Rp. 14 juta.

Transparansi pelaksanaan program tampak cukup bagus, antara lain daftar peminjam sekaligus dengan besarnya pinjaman ditempel di kaca jendela kantor BKM sehingga dapat dibaca oleh siapa saja. Transparansi ini juga terlihat dengan banyaknya kritikan dari masyarakat terhadap adanya anggota BKM yang meminjam. Meskipun belum ada penyelesaian, kritikan ini sudah disampaikan kepada pihak lain seperti kepala desa.

#### **(5) PDM-DKE (Program Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi)**

PDM-DKE merupakan salah satu dari program JPS (Jaring Pengaman Sosial) untuk mengatasi dampak krisis, dalam bentuk pemberian bantuan langsung kepada masyarakat miskin dan yang jatuh miskin akibat krisis ekonomi, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Dana untuk masyarakat digunakan untuk kegiatan pembangunan fisik yang

bersifat hibah, dan untuk kegiatan ekonomi yang harus digulirkan. Di tingkat desa dana ini dikelola oleh Tim Pelaksana Kegiatan desa/kelurahan (TPKd/l) seperti LKMD. Dana ekonomi dipinjamkan kepada masyarakat miskin yang membentuk kelompok usaha yang disebut pokmas (kelompok masyarakat).

Di Kecamatan Wates, dana PDMDKE yang sudah terealisasi adalah dana untuk tahun anggaran 1998/99. Desa Bendungan memperoleh dana sebesar Rp. 73.279.000. Setelah dikurangi untuk honor fasilitator desa dan BOP desa masing-masing sebesar Rp. 675.000 dan Rp. 2.500.000, dana dibagikan kepada 12 dusun dan kelompok tani yang bertindak sebagai pokmas. Masing-masing dusun memperoleh Rp. 5 juta hingga Rp. 6,35 juta, umumnya langsung dibagikan ke kelompok di tingkat RT. Masing-masing RT rata-rata mendapat Rp. 500.000 – Rp. 1 juta (lihat Tabel 16).

Pengelolaan dana di tingkat RT diserahkan pada keputusan masing-masing yang sebagian besar digunakan untuk kegiatan ekonomi. Di Desa Bendungan, dari total dana yang diperoleh, Rp. 62 juta digunakan untuk kegiatan ekonomi, sisanya Rp. 8 juta untuk pembangunan fisik. Pengelolaan perguliran dana pada kegiatan ekonomi diserahkan sepenuhnya kepada pengelola di tingkat RT, berdasarkan kesepakatan warga yang aktif dalam perkumpulan RT. Di beberapa RT dana ekonomi digunakan untuk biaya pemeliharaan ternak dan di RT lainnya untuk kegiatan simpan-pinjam. Pada sebagian RT, pengelolaan dana PDM-DKE disertakan pada kegiatan simpan-pinjam RT meskipun dengan pembukuan berbeda

Khusus untuk penetapan tingkat suku bunga terdapat pedoman dari tingkat desa, yaitu pinjaman paling tidak dikenakan beban sebesar 10% per tahun yang akan digunakan untuk LKMD/kas desa 2%, LKMD dusun 3%, dan untuk penambahan modal 5%. Dalam pelaksanaannya tingkat suku bunga yang ditetapkan, juga jangka waktu angsuran dan pinjaman sangat bervariasi antar RT dan sebagian disesuaikan dengan skema pinjaman yang telah berlaku di perkumpulan RT. Besarnya suku bunga biasanya berkisar antara 10% – 24% per tahun dengan pembayaran diangsur setiap bulan atau *selapanan* selama 12 kali, atau dibayar sekaligus setahun kemudian. Disamping itu ditemukan juga RT yang menetapkan bunga tinggi, yaitu 5% per bulan dan pembayaran angsurannya dilakukan sekaligus pada pertemuan berikutnya. Ketentuan untuk perguliran ternak berbeda dengan pinjaman biasa, misalnya untuk ternak kambing ada yang menetapkan angsuran tiga kali selama 1,5 tahun dengan bunga 10% per tahun, sementara untuk ternak sapi tidak dikenakan bunga tetapi keuntungannya dibagi dua, yaitu 50% untuk pemelihara dan 50% untuk kelompok.

Tingginya tingkat bunga pada sebagian RT tidak membuat anggota keberatan untuk mengajukan pinjaman, karena keputusannya diambil berdasarkan kesepakatan bersama. Mereka sangat yakin bahwa sebagian bunga tersebut untuk kepentingan mereka juga seperti halnya bunga dari kegiatan simpan-pinjam RT. Kepercayaan tersebut didukung oleh pengelolaan dana simpan-pinjam yang cukup transparans dengan pembukuan sederhana yang bisa dilihat siapa saja.

Pemberian pinjaman dana PDM-DKE umumnya tidak dibatasi untuk keluarga miskin saja tetapi tergantung pada siapa yang mengajukan dan cenderung menggunakan sistem pergiliran sehingga semua anggota RT mempunyai hak yang sama. Minat masyarakat untuk meminjam dan tingkat pengembalian pinjaman di hampir semua RT cukup tinggi. Dana PDM-DKE di Desa Bendungan meningkat 14% dibanding awal realisasi setelah dikelola sekitar 1,5 tahun. Selain itu, jumlah penerima manfaat juga meningkat sebesar

44%. Hampir di setiap dusun dana PDM-DKE mengalami perkembangan kecuali di Dusun V akibat kambing yang dibeli dari dana perguliran mati sehingga peminjam tidak diwajibkan membayar (lihat Tabel 16).

**Tabel 16. Laporan Perkembangan PDM-DKE Tahun 1998/99 di Desa Bendungan**

Dusun/ Kelompok	Jumlah Dana (Rp.)	Penggunaan Dana Bantuan		Perkembangan Kegiatan Ekonomi		
		Fisik (Rp.)	Ekonomi (Rp.)	Jumlah dana Sekarang (Rp.)	Jumlah penerima Manfaat	
					Awal (Kelompok /Orang)	Sekarang (Kelompok /Orang)
I	5.000.000	-	5.000.000	6.132.500	42	52
II	5.250.000	-	5.250.000	5.875.000	20	23
III	5.100.000	-	5.100.000	6.525.000	23	50
IV	5.000.000	-	5.000.000	5.864.000	11	16
V	5.062.000	862.000	4.200.000	4.050.000	10	7
VI	2.431.500	431.500	2.000.000	2.300.000	1 *)	1 *)
VI	2.568.500	431.500	2.137.000	2.300.000	2 *)	3 *)
VII	5.250.000	-	5.250.000	5.495.000	21	15
VIII	5.100.000	-	5.100.000	6.945.850	24	62
IX	5.000.000	2.000.000	3.000.000	3.413.750	18	27
X	5.300.000	-	5.300.000	5.630.000	14	14
XI	6.350.000	1.650.000	4.700.000	5.264.000	12	17
XII	5.662.500	862.500	4.800.000	4.938.000	6	10
Sempulur	1.700.000	1.700.000	-	-	-	-
N. Makmur	2.500.000	-	2.500.000	2.750.000	10	12
N. Rahayu	2.700.000	-	2.700.000	3.024.000	15	21
Jumlah	69.974.500	7.937.500	62.037.000	70.507.100	229	330

Sumber : Desa Bendungan. Maret 2000.

Ket. : \*)kelompok

Sementara itu, realisasi dana PDM-DKE di Desa Wates mencapai Rp. 122.978.000, semuanya digunakan untuk kegiatan ekonomi sesuai dengan keputusan di tingkat desa, yaitu:

- simpan-pinjam : Rp 57.520.000
- ternak (ayam, sapi) : Rp 20.600.000
- Industri kecil : Rp 21.900.000
- Usaha lain : Rp 11.700.000
- Honor fasilitator desa : Rp 750.000
- BOP Desa : Rp 2.500.000

Meskipun di Desa Wates terdapat 16 dusun tetapi hanya 11 dusun yang mendapat dana PDM-DKE. Lima dusun lainnya tidak mendapat dana karena sudah mendapat dana dari program JPS lainnya, yaitu PDKMK sebesar Rp. 40 juta yang juga digunakan untuk kegiatan fisik dan ekonomi.

Seperti juga di Desa Bendungan, dana PDM-DKE di Desa Wates diserahkan kepada dusun kemudian ke tingkat RT. Berdasarkan musyawarah di tingkat desa, suku bunga pinjaman disarankan 1% per bulan (0,25% untuk desa, 0,50% pengurus, dan 0,25%

penambahan modal perguliran), dan pembayaran bunga dipotong di depan supaya cepat digulirkan kepada yang lain. Akan tetapi keputusan selanjutnya diserahkan pada kelompok sehingga dalam pelaksanaannya bervariasi antar kelompok.

Meskipun berdasarkan arahan dari tingkat desa dana tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang usahanya perlu dibantu, tetapi di Dusun Kedunggong terlihat ada indikasi bahwa penerima manfaat lebih diutamakan untuk kepala dusun dan ketua RT. Mereka mendapat prioritas untuk meminjam dana pada perguliran tahap pertama.

Pelaksanaan pinjaman PDM-DKE di Desa Wates lebih formal dibanding di Desa Bandungan karena di desa ini terdapat perjanjian kredit yang ditandatangani di atas materai. Perkembangan dana di Desa Wates lebih lambat, saat ini dana PDM-DKE baru meningkat sebesar Rp. 6 juta atau sekitar 5% dibanding dana awal.

#### **(6) KUT (Kredit Usaha Tani)**

KUT merupakan jenis kredit pertanian yang awalnya hanya diberikan khusus untuk petani padi tetapi dalam beberapa tahun terakhir ini jenis komoditinya ditambah, antara lain tanaman hortikultura dan palawija. KUT diberikan dalam dua bentuk, yaitu dalam bentuk *natura* berupa bibit tanaman, pupuk dan pestisida, serta dalam bentuk uang tunai untuk biaya pengolahan lahan. Besarnya kredit bervariasi, tergantung dari luas lahan dan jenis tanaman: padi Rp. 2,2 juta/ha, kedele Rp. 8 juta/ha, bawang merah Rp. 12 juta/ha, dan cabe Rp. 21 juta/ha, dengan suku bunga 10,5% per tahun.

Pada awalnya, lembaga pelaksana KUT dibatasi pada KUD tetapi sejak tahun 1998/99 diperluas sehingga koperasi lain dan LSM pun bisa berperan sebagai pelaksana. Di Kabupaten Kulon Progo realisasi penyaluran KUT yang dilakukan oleh koperasi pada musim kemarau (MK) 1999 mengalami peningkatan dibanding pada musim tanam (MT) 1998/99 tetapi pada MT 1999/2000 mengalami penurunan cukup tajam. Keadaan yang sama terjadi juga di KUD Bangun yang merupakan lembaga pelaksana KUT di Kecamatan Wates (Tabel 17). Penurunan tersebut disebabkan tunggakan pada musim sebelumnya masih banyak sehingga pencairan untuk musim selanjutnya ditahan atau ditiadakan.

KUD Bangun yang terletak di Desa Bendungan sudah lama terlibat dalam penyaluran KUT. Kegiatan ini terus dilanjutkan hingga pelaksanaan program KUT yang diperbaharui (tahun 1998/99). Dana KUT yang disalurkan KUD Bangun sebelum MT 1998/99 atau KUT pola lama sudah lunas semuanya tetapi pada KUT pola baru masih mengalami tunggakan. Tunggakan untuk MT 1998/99 berjumlah Rp. 166,69 juta sedangkan MK 1999 Rp 341,93 juta. Tunggakan tersebut kebanyakan dilakukan oleh petani di luar wilayah penelitian. Di Desa Wates sendiri terdapat tunggakan sebesar Rp. 3 juta yang dipinjam oleh 19 petani pada MT 1998/99, sedangkan di Desa Bendungan sebesar Rp. 7,23 juta untuk MT 1998/99 dan Rp. 16,71 juta pada MK 1999.

**Tabel 17. Realisasi Penyaluran KUT di KUD Bangun dan di Kabupaten Kulon Progo**

	Luas Areal (Ha)	Jumlah Petani	Realisasi (Juta Rp.)	Angsuran (Juta Rp.)	Sisa (juta Rp.)
KUD Bangun					
- MT 1998/1999	613,80	845	710	522	187
- MK 1999	147,75	444	686,5	326	360,5
- MT 1999/2000	9.595,00	148	151	0	151
Kab. Kulon Progo					
- MK II 1998	-	-	1.411	1.411	0
- MT 1998/1999	7.145,71	14.328	7.803	6.902	901
- MK 1999	3.728,11	8.249	13.038	7.646	5.392
- MT 1999/2000	2.535,76	5.636	3.897	0	3.897

Sumber : Laporan Triwulan II Tahun 2000. Kandepkop PKM Kabupaten Kulon Progo.

Ket : Data pada bulan Juni 2000

Macetnya kredit biasanya bukan disebabkan oleh gagal panen tetapi karena turunnya harga produksi yang menyebabkan berkurangnya penerimaan petani. Menurut pengurus KUD Bangun, semangat petani untuk mengembalikan pinjaman juga turut berpengaruh. Untuk mengembalikan pinjaman KUT, umumnya petani hanya tergantung pada hasil pertanian saja meskipun mereka masih mempunyai penghasilan dari usaha lain. Akibatnya ketika penerimaan dari hasil pertanian rendah mereka enggan mengembalikan kredit. Padahal berdasarkan kemampuan (hasil usaha lainnya) sebenarnya mereka mampu membayar pinjaman. Bila dilihat dari jenis tanaman, KUT yang paling banyak mengalami kemacetan adalah kredit untuk tanaman bawang merah dan cabe. Hal ini karena harga komoditi tersebut sangat fluktuatif dan sulit diperkirakan. Misalnya, harga bawang pada saat tanam mencapai Rp 10.000/kg tetapi pada saat panen hanya Rp. 2.000-Rp 3.000/kg. Hal yang sama terjadi pada harga cabe keriting yang saat ini merosot menjadi Rp. 2.000/kg untuk kualitas terbaik. Dengan harga jual tersebut petani cenderung rugi. Menurut mereka: *“bila harga cabe bisa mencapai Rp. 4.000 – 5.000 /kg saja Insya Allah bisa melunasi pinjaman KUT”*.

Sementara itu kasus penunggakan KUT di sebuah dusun di Desa Wates disebabkan pinjaman untuk musim tanam terakhir tidak cair padahal pinjaman sebelumnya sudah lunas 75%, dan anggota sudah siap mengelola lahan pertaniannya. Menghadapi masalah tersebut, ketua kelompok berinisiatif untuk mengembalikan pembayaran yang belum disetor Rp. 4 juta (25% dari total pinjaman) kepada petani, sebagai biaya untuk membeli pupuk. Hal tersebut dilakukan karena sebelumnya pemerintah sudah menjanjikan bahwa apabila pinjaman sudah lunas 75% maka kelompok akan mendapat pinjaman KUT tahap berikutnya. Akan tetapi ternyata di tingkat kecamatan ada kelompok lain yang pembayarannya macet sehingga berpengaruh terhadap kelompok yang sudah memenuhi persyaratan. Meskipun demikian uang tersebut akan mereka kembalikan apabila sudah ada pencairan tahap berikutnya.

Menghadapi kemacetan pembayaran KUT, akhir-akhir ini petugas KUD Bangun terpaksa melakukan penagihan langsung kepada kelompok. Melalui pendekatan tersebut KUD bisa menghimpun pembayaran tunggakan rata-rata Rp. 10 juta setiap dua minggu.

#### **IV. AKSES, HAMBATAN DAN PILIHAN MASYARAKAT TERHADAP JENIS KREDIT**

##### **Akses**

Secara umum, akses masyarakat di Desa Bendungan dan Desa Wates terhadap berbagai sumber kredit sangat terbuka. Banyak faktor membentuk kondisi ini, antara lain: (1) terdapat banyak lembaga kredit; (2) sarana dan prasarana transportasi serta komunikasi memadai; (3) persyaratan dan proses kredit relatif mudah; (4) sikap masyarakat; dan (5) aktivitas usaha masyarakat beragam. Meskipun demikian, akses individu terhadap masing-masing lembaga kredit sangat bervariasi karena tergantung keikutsertaan dalam keanggotaan kelompok kredit, kebijakan pemberi kredit, jaringan kerja, dan kondisi sosial ekonomi.

##### Lembaga kredit.

Baik di Desa Bendungan maupun Desa Wates terdapat berbagai lembaga kredit yang bersifat formal, informal dan program. Di Desa Bendungan terdapat BRI Unit, BPD Kas, BKD, BUKP, berbagai koperasi, KUD, berbagai lembaga kredit informal yang dibentuk masyarakat, UEDSP, dan PDM-DKE. Sedangkan di Desa Wates antara lain terdapat dua BRI Unit, Kantor cabang BPD, Bank Danamon, BNI, BKD, Pegadaian, berbagai koperasi, berbagai lembaga kredit informal yang dibentuk masyarakat, UEDSP, P2KP, dan PDM-DKE. Disamping itu masyarakat setempat juga dapat mengakses kredit program lain seperti Kukesra, KPKU, dan KUT.

Banyaknya lembaga kredit tersebut memungkinkan masyarakat mengakses salah satu atau beberapa jenis kredit yang tersedia secara sekaligus. Beberapa jenis kredit mempunyai sasaran masyarakat yang berbeda berdasarkan jenis usaha dan kondisi sosial ekonomi sehingga hampir semua golongan masyarakat bisa menjadi sasaran kredit tertentu. Misalnya, BUKP dan BKD cenderung untuk pedagang kecil; KUT untuk petani; kredit program yang terkait dengan Departemen Perindustrian dan Koperasi untuk industri kecil; kredit program PDM-DKE dan Kukesra cenderung untuk masyarakat golongan bawah; sedangkan golongan menengah ke atas bisa mengakses kredit formal lainnya.

##### Sarana dan prasarana transportasi serta komunikasi

Tersedianya sarana dan prasarana transportasi serta komunikasi yang baik menyebabkan masyarakat setempat bisa juga mengakses berbagai lembaga kredit di luar desa bahkan di luar kecamatan. Transaksi kredit bisa terjadi karena masyarakat mendatangi lembaga kredit tersebut atau sebaliknya, lembaga kredit mendatangi masyarakat. Lembaga kredit seperti BPR Shinta Putra yang terdapat di luar Kecamatan Wates dan berbagai koperasi pasar mempunyai banyak nasabah di wilayah penelitian Tim SMERU.

##### Persyaratan dan proses kredit

Apabila lembaga kredit, khususnya perbankan, di daerah lain dinilai sering mempersulit proses dan syarat kredit maka di Kecamatan Wates terutama di Desa Bendungan dan Desa Wates, tidak ditemui pernyataan tersebut. Hampir semua anggota masyarakat dari berbagai strata sosial ekonomi yang ditemui menganggap peminjaman di lembaga kredit cukup mudah. Sebagai contoh, BRI mempunyai ketentuan bahwa pinjaman di bawah Rp. 1 juta tidak perlu menggunakan jaminan-sebuah persyaratan yang sering dipersalahkan karena mempersulit atau menghambat peminjaman. Sedangkan untuk pinjaman yang lebih besar antara lain bisa menggunakan jaminan surat tanah berupa Letter C atau Letter D, padahal biasanya lembaga perkreditan mensyaratkan surat tanah yang berstatus lebih tinggi berupa sertifikat tanah. BPR Bank Shinta Putra tidak

mensyaratkan agunan untuk kredit kelompok kecuali mempunyai kelompok dan simpanan di Bank tersebut minimal 20% dari pinjaman yang diajukan. Untuk pinjaman bagi kelompok pegawai beberapa lembaga kredit mensyaratkan adanya SK pegawai yang asli sementara lembaga kredit lainnya cukup menggunakan foto copy saja.

Proses kredit di hampir semua lembaga kredit cukup cepat. BRI yang merupakan bank yang paling dahulu dikenal masyarakat setempat, biasanya hanya membutuhkan waktu satu hingga dua minggu. Bahkan bagi nasabah yang sebelumnya sudah pernah meminjam proses kredit bisa lebih cepat lagi. Lembaga kredit lainnya, seperti BKD, BUKP, lembaga informal, dan UED-SP biasanya membutuhkan waktu satu minggu, sedangkan Pegadaian hanya sekitar 15 menit.

#### Sikap masyarakat

Pandangan masyarakat Desa Bendungan dan Desa Wates terhadap lembaga kredit cukup unik. Berhubungan dengan bank misalnya, merupakan suatu hal yang biasa, baik untuk urusan menabung maupun meminjam. Sebagian besar masyarakat mengetahui persyaratan kredit berbagai lembaga kredit. Informasi tersebut mereka peroleh dari sesama anggota masyarakat atau langsung menanyakan ke lembaga kredit. Sebagai contoh, BPD Kas yang baru buka satu minggu di Desa Wates sudah didatangi beberapa anggota masyarakat yang menanyakan persyaratan dan ketentuan pinjaman. Anggota masyarakat yang meminta formulir peminjaman sudah tercatat 10 orang.

Pengembalian pinjaman dari masyarakat di berbagai lembaga kredit cukup tinggi. Hal ini terutama didorong oleh rasa takut tidak dipercaya sehingga tidak bisa meminjam lagi, keinginan untuk memperoleh IPTW (dari BRI dan BPR Bank Shinta Putra), dan rasa “tidak enak” kepada anggota lain, khusus pada kredit yang dikelola masyarakat.

Cukup lancarnya pembayaran dari nasabah, bahkan tepat waktu, menimbulkan tingginya tingkat kepercayaan lembaga kredit terhadap masyarakat setempat, sehingga di daerah ini justru lembaga kredit yang aktif menawarkan pinjaman kepada masyarakat. Beberapa responden yang ditemui, kembali menjadi nasabah kredit formal setelah didatangi petugas lembaga tersebut meskipun sebelumnya mereka berencana untuk tidak meminjam kembali. Meskipun beberapa lembaga kredit formal berusaha mencari nasabah peminjam tetapi diantara mereka tidak timbul persaingan yang tidak sehat. Mereka bahkan saling meminta dan memberi informasi tentang kelayakan calon nasabah.

#### Aktivitas usaha masyarakat

Kegiatan ekonomi masyarakat di dua wilayah penelitian bernuansa perdesaan-perkotaan. Sementara kegiatan pertanian masih banyak dilakukan, kegiatan perdagangan, industri kecil dan jasa pun berkembang. Umumnya rumahtangga setempat tidak hanya tergantung pada satu jenis usaha tetapi minimal dua, bahkan lebih. Beragamnya aktivitas usaha masyarakat menyebabkan pemasukan keluarga tidak tergantung pada satu sumber saja sehingga resiko kehilangan penghasilan bisa lebih dikurangi. Keadaan ini turut mendukung lancarnya pembayaran pinjaman masyarakat.

Beragamnya aktivitas usaha masyarakat juga telah memperluas akses terhadap kredit karena masing-masing kegiatan usaha bisa menjadi sasaran kredit, khususnya kredit program yang dikelola oleh masing-masing instansi pemerintah. Kegiatan pertanian mendapatkan KUT, sedangkan usaha kecil (dagang dan industri rumah tangga) mendapatkan kredit KPKU, kredit dari laba BUMN, dan lainnya. Dari sisi

masyarakatnya, keragaman usaha tersebut telah menyebabkan kebutuhan modal relatif besar sehingga lebih tergantung pada sumber modal luar.

### **Box. 2**

#### **Ibu rumah tangga yang meminjam dari beberapa sumber**

Ibu B adalah seorang ibu berputra dua. Suaminya seorang anggota POLRI yang ditugaskan di kantor kecamatan. Meskipun hanya tamatan SMP, Ibu B aktif dalam beberapa perkumpulan warga (PKK tingkat desa dan kecamatan, serta dasa wisma). Dua tahun yang lalu Ibu B terpilih menjadi kepala dusun setelah menisihkan dua pria yang menjadi saingannya dalam pengujian di tingkat kabupaten. Meskipun sibuk berorganisasi, Ibu B masih sempat mencari pendapatan tambahan bagi keluarganya dengan menjadi pedagang perantara hasil pertanian yang dibeli dari para petani untuk kemudian dijual kepada pedagang besar.

Keluarga Ibu B cukup berani dalam mengambil kredit, baik kredit formal, kredit informal maupun kredit program. Saat ini kredit yang sedang dicicil ada beberapa jenis dari lembaga kredit yang berbeda, yaitu dari: BRI Rp. 1 juta (sebelumnya sudah beberapa kali meminjam), BPD DIY Rp. 5 juta, Kukesra Rp. 320.000, BKD Rp. 25.000, BPR Shinta Putra Rp. 500.000, PKK desa Rp. 170.000, PKK dusun Rp. 30.000, dan Dasa wisma Rp. 50.000.

Pinjaman ke BRI dan BPD menggunakan agunan berupa SK pegawai suaminya sehingga pembayaran angsurannya langsung dipotong dari gaji bulanan. Pinjaman ini digunakan untuk tambahan membeli sepeda motor dan biaya membangun rumah. Sedangkan pinjaman dalam jumlah kecil digunakan untuk menambah modal dagang. Sebelumnya Ibu B pernah meminjam dari PDM-DKE sebesar Rp. 400.000 tetapi saat ini sudah lunas. Meskipun sudah mendapat pinjaman dari berbagai sumber, Ibu B masih berusaha untuk mendapat pinjaman KPKU tetapi sampai saat ini belum ada jawaban dari BKKBN sebagai instansi pembina KPKU.

Ibu B mempunyai banyak pinjaman bukan karena iseng atau *aji mumpung* tetapi karena memang membutuhkan dana untuk usaha dagang dan investasi, serta dengan pertimbangan sisa gaji suaminya yang dipotong angsuran masih cukup untuk keperluan makan sederhana keluarga.

#### Keikutsertaan sebagai anggota kelompok

Kelompok informal (misalnya kelompok dusun, PKK hingga Dasa Wisma) serta beberapa koperasi yang dibentuk masyarakat yang memiliki kegiatan simpan-pinjam biasanya hanya memberikan pinjaman kepada anggotanya sehingga yang tidak menjadi anggota tidak mempunyai akses terhadap pinjaman.

#### Kebijakan pemberi kredit

Kebijakan pemberi kredit dalam menetapkan sasaran kredit menyebabkan beberapa orang yang menjadi sasaran dengan mudah dapat mengakses kredit, sedangkan orang lain sulit bahkan tidak bisa mendapatkannya. Seperti di Desa Bendungan, pinjaman dari UED-SP, PDM-DKE, dan BKD tidak boleh diambil oleh perangkat desa atau keluarganya (istri/suami). KPKU hanya bisa diakses oleh para ibu yang menjadi anggota UPPKS yang dinilai berhasil, dan beberapa skema kredit dari lembaga kredit lainnya mensyaratkan adanya kepemilikan usaha.

### Jaringan kerja

Pinjaman jaringan kerja hanya bisa terjadi karena adanya ikatan kerja seperti dalam kegiatan perdagangan antara pemilik barang dengan pedagang, atau antara pedagang besar dengan pedagang pengecer.

### Kondisi sosial ekonomi.

Kemampuan ekonomi berpengaruh terhadap kemampuan menyediakan agunan untuk meminjam kredit dari lembaga tertentu yang mensyaratkannya. Meskipun pemberi kredit tidak selalu meminta agunan tetapi kepemilikan agunan akan mempengaruhi luasnya akses dan besarnya kredit.

Kondisi sosial ekonomi penduduk di wilayah penelitian relatif baik. Sebagian besar penduduk memiliki tanah atau sawah yang sudah dilengkapi surat meskipun tidak semuanya dalam bentuk sertifikat.

### **Hambatan**

Secara umum hambatan bagi masyarakat dalam memperoleh pinjaman relatif kecil karena adanya dukungan sumber daya dari pihak masyarakat sendiri dan kemudahan kredit dari pihak lembaga perkreditan. Meskipun demikian bagi masyarakat secara individu atau dari sisi masing-masing pengelola kredit terdapat beberapa kendala, yaitu:

#### Syarat agunan

Syarat agunan berupa surat kepemilikan tanah atau kendaraan bermotor masih merupakan kendala untuk memperoleh kredit formal perbankan, terutama bagi masyarakat golongan bawah.

#### Terbatasnya dana dan kecilnya plafon kredit

Untuk memperoleh kredit dari lembaga kredit informal di kelompok masyarakat atau dari lembaga formal seperti BUKP, PDM-DKE, dan BKD memang relatif mudah akan tetapi jumlah kredit yang bisa dipinjam umumnya kecil sehingga hanya bisa digunakan sebagai tambahan modal kerja kecil-kecilan. Selain itu keterbatasan dana lembaga kredit, menyebabkan calon nasabah harus menunggu satu sampai dua minggu dahulu, bahkan untuk beberapa kasus bisa lebih lama.

#### Suku bunga tinggi

Lembaga kredit formal yang berbentuk koperasi simpan-pinjam merupakan lembaga kredit formal yang paling mudah dan cepat diakses tetapi suku bunga yang ditetapkan terlalu tinggi. Disamping itu potongan untuk biaya administrasi dan simpanan cukup besar.

#### Pola penghasilan golongan ekonomi lemah

Pola penghasilan golongan ekonomi lemah yang bekerja sebagai buruh, pedagang kecil keliling, dan tukang beca biasanya adalah pendapatan 'harian' dan tidak tetap, sehingga menjadi kendala untuk memperoleh pinjaman dari lembaga kredit formal yang menuntut pengembalian pinjaman secara teratur. Bagi mereka, jenis kredit yang paling mudah diakses adalah kredit dari kelompok informal masyarakat yang mereka ikuti (dusun, RT, PKK, Dasa Wisma, dsb). Khusus bagi pedagang kecil dengan penghasilan relatif tetap secara harian, mereka masih bisa mengakses pinjaman dari koperasi pasar meskipun dikenakan suku bunga tinggi.

## Pilihan

Masyarakat Desa Bendungan dan Desa Wates umumnya cukup selektif dalam memilih lembaga kredit, yaitu dengan cara membandingkan berbagai kemudahan dan kelebihan dari lembaga yang bisa diakses. Bukan hanya tingkat suku bunga yang menjadi perhatian tetapi masih banyak aspek lain yang menjadi pertimbangan, antara lain: kemudahan persyaratan, kecepatan proses, pelayanan petugas, besarnya plafon pinjaman, serta insentif yang mungkin didapat. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan wawasan masyarakat mengenai kredit semakin selektif dalam memilih kredit. Masyarakat awam biasanya hanya membandingkan keuntungan dari sisi ekonomi, misalnya tingkat suku bunga (dilihat dari jumlah angsuran untuk pinjaman dan jangka waktu yang sama) dan besarnya insentif yang bisa diperoleh bila melakukan pembayaran angsuran tepat waktu. Sedangkan kelompok masyarakat yang lebih berpendidikan mulai membandingkan kenyamanan pelayanan petugas, mulai saat pengajuan dan proses kredit hingga saat pembayaran angsuran.

Kredit perbankan yang paling banyak dimanfaatkan oleh masyarakat adalah BRI, kemudian BPD dan BPR Bank Shinta Putra. BRI banyak dimanfaatkan karena merupakan lembaga perbankan yang paling lama dikenal, dan masyarakat setempat sudah lama melakukan pinjaman ke lembaga ini sehingga berurusan dengan BRI tidak menjadi sesuatu yang formal. Beberapa responden yang sudah lama menjadi nasabah bahkan didatangi petugas di rumahnya yang menawarkan pinjaman kembali. Adanya IPTW ternyata cukup merangsang masyarakat, khususnya di Desa Bendungan untuk tetap meminjam ke BRI dan melakukan pembayaran tepat waktu. Meskipun BPR Bank Shinta Putra juga memberikan IPTW tetapi nilainya lebih kecil dibanding yang diberikan oleh BRI. Nasabah BRI tidak terbatas pada mereka yang berpenghasilan tetap, namun juga petani atau pedagang. Sementara itu BPD banyak diambil oleh mereka yang berpenghasilan tetap. Biasanya selain ke BPD mereka juga meminjam ke BRI. Kredit dari BPR Shinta Putra banyak diambil oleh kelompok industri rumah tangga seperti pandai besi dan industri kaleng karena kreditnya bisa diambil secara berkelompok, tanpa persyaratan agunan kecuali mempunyai simpanan 20% dari jumlah pinjaman, serta adanya sistem “jemput bola” sehingga proses, pencairan dan pembayaran kredit tidak perlu dilakukan di kantor lembaga yang bersangkutan.

Pedagang kecil di pasar yang tidak memiliki jaminan atau hanya memiliki penghasilan harian relatif kecil biasanya meminjam dari koperasi pasar atau “bank keliling”. Mereka terpaksa meminjam jenis kredit ini karena mudah didapat, angsuran diambil petugas sehingga tidak perlu meninggalkan dagangan, dan pola angsuran harian cocok dengan pola penghasilan mereka. Selain itu biasanya mereka meminjam juga dari sumber lain seperti BKD dan kelompok masyarakat. Bagi pedagang di Pasar Bendungan juga meminjam dari BUKP.

Kelompok masyarakat yang mengetahui adanya kredit program seperti KPKU sebenarnya lebih memilih jenis kredit ini dibanding kredit lainnya karena selain prosesnya mudah tingkat suku bunganya juga rendah. Akan tetapi karena keterbatasan dana, masyarakat yang dapat memperoleh KPKU sangat terbatas.

Hampir semua masyarakat yang menjadi anggota kelompok masyarakat, tanpa membedakan status sosial ekonomi, memanfaatkan kredit dari kelompoknya masing-masing. Kredit yang diambil biasanya digunakan untuk kebutuhan usaha meskipun

nilainya kecil, terkadang hanya Rp. 10.000 – Rp. 20.000. Akan tetapi pinjaman dari lembaga perbankan dalam jumlah cukup besar (hingga beberapa juta) yang diambil beberapa responden, justru digunakan untuk kebutuhan konsumtif, seperti membangun rumah atau membeli kendaraan bermotor.

### **Box 3**

#### **Pengusaha tahu yang menjadi nasabah beberapa lembaga kredit**

Bapak C dan D adalah dua bersaudara di Desa Bendungan yang menekuni industri pembuatan tahu. Usaha ini sudah ditekuni secara turun temurun sejak tahun 1965. Mula-mula usaha tahu ini hanya mengandalkan modal swadaya, alat-alat produksi yang digunakan juga sederhana, seperti alat putar manual. Pada tahun 1980an usaha kecil ini mendapat perhatian dari Dinas Perindustrian setempat yang memberikan pinjaman tanpa bunga sebesar Rp. 500.000. Pinjaman yang bisa dicicil selama dua tahun ini digunakan untuk meningkatkan kualitas peralatan dan menambah modal.

Setelah itu, untuk menambah kapasitas usaha mereka meminjam dari beberapa lembaga kredit seperti BRI, BUKP, Koperasi, UED-SP, PDMDKE, dan Kukesra. Kepada BRI mereka sudah meminjam tiga kali sejak tahun 1996, masing-masing sebesar Rp. 1 juta, Rp. 4 juta, dan Rp. 2 juta dengan menggunakan jaminan berupa sertifikat tanah. Pada tahun 1996 mereka meminjam dari BUKP sebesar Rp. 200.000 yang dicicil selama 1 tahun. Tahun 1998 meminjam dari UED-SP sebesar Rp. 250.000 yang saat ini hutangnya masih tersisa Rp. 30.000. Pada tahun yang sama mereka mendapat pinjaman Rp. 2 juta dari yang diberikan melalui kelompok usaha (KSM). Dari dana bergulir PDMDKE mereka meminjam sebesar Rp. 100.000.

Menurut Bapak C dan D semua kredit tersebut mempunyai kelebihan masing-masing. Dilihat dari pemberian insentif, BRI menjadi pilihan karena memberikan IPTW dan jumlahnya lebih besar sekitar 2,4 kali dibanding IPTW yang diberikan oleh BPR Shinta Putra Pengasih. Namun ditinjau dari persyaratannya, BPR Shinta Putra Pengasih lebih disukai karena lebih mudah, yaitu tanpa jaminan kecuali menyimpan sebesar 20% dari jumlah pinjaman. Bapak C dan D juga lebih menyukai kredit kelompok karena pembayarannya dilakukan secara berkelompok sehingga tidak perlu mendatangi lembaga kredit secara individu.

## **V. KEBERADAAN KREDIT PERKOTAAN DI MASA KRISIS**

Umumnya lembaga kredit di wilayah penelitian baik formal, informal maupun program, dibentuk dan beroperasi jauh sebelum krisis berlangsung. Lembaga kredit atau skema kredit baru yang muncul setelah krisis hanya kredit program yang memang ditujukan untuk menanggulangi dampak krisis, seperti PDM-DKE, atau yang sudah direncanakan sebelumnya tetapi kebetulan baru terlaksana di saat krisis, seperti KPKU dan P2KP. Dengan demikian keberadaan lembaga atau skema kredit tidak terkait dengan krisis secara nyata. Namun demikian, krisis mempunyai beberapa pengaruh terhadap kinerja atau kebijakan berbagai lembaga kredit. Beberapa lembaga, khususnya lembaga kredit formal dan kredit program, melakukan berbagai penyesuaian dalam penyaluran kredit dan penetapan suku bunga pinjaman. Sementara itu lembaga kredit informal umumnya tidak melakukan perubahan sama sekali karena kinerja simpan-pinjamnya relatif tidak terkena dampak. Secara umum dampak krisis terhadap kinerja lembaga perkreditan paling dirasakan pada tahun 1998 tetapi pada tahun 2000 ini cenderung berjalan normal kembali.

Selama terjadi krisis ekonomi, BRI melakukan perubahan kebijakan dalam hal penyaluran kredit dan tingkat suku bunga. Meskipun penyaluran kredit tidak dihentikan sama sekali tetapi pemberiannya dilakukan secara lebih selektif. Hal ini turut memberikan pengaruh positif terhadap penurunan tunggakan. Sementara itu terhadap suku bunga, akibat pengaruh global perubahan suku bunga di tingkat nasional, selama krisis ekonomi BRI terpaksa melakukan beberapa kali perubahan suku bunga Kupedes (Tabel 18).

**Tabel 18. Perubahan Suku Bunga Kupedes BRI, Maret 1998- Oktober 2000**

Periode	Bunga	IPTW	Jumlah
Maret'98 – Sept'98	1,50	0,50	2,00
Sept'98 – Maret'99	2,20	0,73	2,93
Maret'99 – Juni'99	1,95	0,65	2,60
Juni'99 – Sept'99	1,65	0,55	2,20
Sept'99 – Sekarang	1,50	0,50	2,00

Sumber: BRI Cabang Wates

Sementara itu, BPD selama sekitar satu tahun (1998) menghentikan pemberian kredit baru untuk sementara. Hal ini selain karena kebijakan direksi juga karena permintaan dari masyarakat berkurang yang antara lain akibat peningkatan suku bunga. Setelah mengalami perubahan suku bunga selama krisis, BPD yang sebelum krisis menetapkan suku bunga pinjaman antara 14% – 15% per tahun merata, kini menggunakan suku bunga secara efektif *floating* (disesuaikan dengan perkembangan bunga di pasar).

Bank Pasar melakukan kebijakan yang hampir sama, yaitu pemberian Kredit Umum menjadi lebih selektif dan lebih mengutamakan Kredit Pegawai untuk golongan berpenghasilan tetap. Suku bunga Kredit Pegawai mengalami perubahan meskipun tidak besar, yaitu dari 1,8% per bulan menjadi 1,9% per bulan, kemudian kembali seperti semula sejak Agustus 2000. Pada tahun pertama krisis (1997), jumlah kredit bermasalah mengalami peningkatan 33,7% dari tahun sebelumnya. Namun demikian pada tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan kembali (lihat Tabel 6). Penyaluran dana pinjaman di Desa Bendungan dan Desa Wates juga mengalami penurunan tajam pada tahun 1998.

BPR Shinta Putra Pengasih terkena dampak krisis baik secara makro maupun mikro. Secara makro, aktiva produktif dari BPR tidak meningkat bahkan mengalami penurunan. Aktiva produktif yang pada awal tahun 1998 berjumlah Rp. 817 juta, pada akhir tahun yang sama hanya Rp. 802 juta. Keuntungan bank pada tahun 1998 pun mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Secara mikro BPR menjadi lebih selektif dalam memberikan kredit. Sementara itu di sisi nasabah pun mengalami perubahan minat. Masyarakat yang sedang menjadi nasabah, khususnya dari golongan menengah, cenderung melunasi pinjaman sementara masyarakat yang mengajukan pinjaman umumnya adalah nasabah baru.

Di pegadaian jumlah peminjam golongan kecil (Rp. 5.000 – < Rp. 150.000) mengalami penurunan, sedangkan golongan lebih besar (Rp. 150.000 – Rp. 20 juta) meningkat, sehingga secara keseluruhan jumlah dana yang dipinjam meningkat. Seperti disebutkan dalam uraian tentang pegadaian, hal tersebut diduga karena pengaruh krisis yang

menurunkan daya beli sehingga masyarakat berusaha menutupi kebutuhan dengan menggadaikan barang yang ada.

Kinerja BUKP pada tahun 1998 mengalami perubahan karena angsuran dari nasabah menjadi lebih lambat. Pengajuan permohonan kredit bertambah tetapi banyak yang ditolak karena keterbatasan dana. Sementara itu suku bunga pinjaman mengalami perubahan karena BPD sebagai sumber modal meningkatkan bunga pinjamannya. Ketika suku bunga pinjaman dari BPD meningkat dari 24% menjadi 36% per tahun, BUKP terpaksa meningkatkan suku bunga Kredit Bulanan dari 3% menjadi 3,5% per bulan. Kebijakan ini hanya berlaku sekitar satu tahun, kemudian kembali ke kebijakan semula karena BPD menurunkan suku bunga kembali. Saat ini suku bunga BPD menjadi 19% per tahun.

Selama krisis berlangsung, Koperasi Pasar Karya Makmur terkena pukulan yang cukup besar yang berdampak pada penurunan jumlah karyawan dari 40 orang menjadi 28 orang. Pada saat yang sama tunggakanpun meningkat. Apabila sebelum krisis tunggakan hanya berjumlah Rp 6 juta, sejak krisis melanda tunggakan meningkat hingga sekarang mencapai Rp. 15 juta. Meskipun demikian pihak Koppas tidak melakukan tindakan khusus kecuali terus menagih seperti kepada peminjam lainnya. Penurunan jumlah karyawan diperkirakan karena terjadi penurunan omzet yang selain disebabkan pengaruh krisis juga karena meningkatnya persaingan dari lembaga kredit lainnya. Sementara itu kegiatan pemberian pinjaman dari KUD Bangun mengalami kelesuan akibat meningkatnya kredit macet di masyarakat.

## **VI. KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian lapangan tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Lembaga kredit yang beroperasi di daerah penelitian sangat beragam dan dapat digolongkan ke dalam tiga kelompok kredit, yaitu: kredit formal, kredit informal, dan kredit program
2. Hampir semua lembaga kredit dan skema kredit yang ditawarkan sudah ada jauh sebelum krisis terjadi. Skema kredit yang muncul setelah krisis adalah kredit program, yaitu PDM-DKE, P2KP dan KPKU. PDM-DKE memang dirancang untuk menanggulangi dampak krisis, sedangkan dua kredit program lainnya yang dimaksudkan untuk menanggulangi kemiskinan sudah direncanakan sebelum krisis.
3. Secara umum, akses masyarakat di Desa Bendungan dan Desa Wates terhadap berbagai sumber kredit sangat terbuka. Faktor pendukung terbentuknya kondisi ini, antara lain adalah: (a) terdapat banyak lembaga kredit; (b) sarana dan prasarana transportasi serta komunikasi memadai; (c) persyaratan dan proses kredit relatif mudah; (d) sikap masyarakat yang mendukung; (e) aktivitas usaha masyarakat beragam. Meskipun demikian, akses individu terhadap masing-masing lembaga kredit sangat bervariasi karena tergantung keikutsertaan dalam keanggotaan kelompok kredit, kebijakan pemberi kredit, jaringan kerja, dan kondisi sosial ekonomi.

4. Skema kredit formal perbankan yang paling banyak dimanfaatkan adalah BRI. Hal ini karena BRI merupakan lembaga perbankan yang paling lama dikenal sehingga masyarakat terbiasa berurusan dengan BRI, proses dan persyaratan kredit relatif mudah, serta adanya IPTW. Lembaga perbankan lain yang juga banyak diminati adalah BPD dan BPR Shinta Putra.
5. Bagi sebagian besar masyarakat daerah penelitian, berhubungan dengan bank baik untuk menabung maupun meminjam merupakan hal biasa. Mereka umumnya mengetahui persyaratan kredit berbagai lembaga kredit. Informasi tersebut diperoleh dari sesama anggota masyarakat atau langsung dari lembaga kredit yang bersangkutan.
6. Secara umum pelaksanaan kredit program relatif lancar. Hal ini karena dukungan kelembagaan di tingkat masyarakat yang sudah terbangun dengan baik akibat tumbuh-kembangnya berbagai organisasi kemasyarakatan informal dan formal, yang sebagian besar diprakarsai oleh masyarakat sendiri. Dengan kemampuan organisasi dan kelembagaan yang baik, ketika turun kredit program yang sebagian atau seluruh kegiatannya harus dikelola oleh masyarakat sendiri, mereka sudah siap melaksanakannya. Disamping itu kebiasaan kerja secara transparan yang sudah terbentuk di organisasi masyarakat turut mempengaruhi keberhasilan kredit program.

**Tabel Lampiran 1. Sumber Informasi di Tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten, dan Propinsi Penelitian**

Desa	Kecamatan	Kabupaten	Propinsi
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala desa dan staf</li> <li>• Ketua RT</li> <li>• Kepala dusun</li> <li>• Pemilik kios di perumahan penduduk</li> <li>• Pemilik kios di pasar</li> <li>• Pedagang di pasar</li> <li>• Pengelola simpan-pinjam:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- BKD</li> <li>- UED-SP</li> <li>- Koperasi</li> <li>- Dasa Wisma</li> <li>- RT</li> <li>- PKK</li> <li>- Dusun</li> <li>- P3A</li> <li>- PDM-DKE</li> </ul> </li> <li>• Masyarakat peminjam dan non-peminjam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Camat dan stafnya</li> <li>• Pengelola simpan-pinjam:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- BPD Kas Wates</li> <li>- BUKP</li> <li>- KUD</li> <li>- Pegadaian</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bappeda Bidang Perekonomian dan Fisik</li> <li>• Kantor PMD</li> <li>• Pemda Bagian Perekonomian</li> <li>• BKKBN</li> <li>• Kantor Departemen Koperasi</li> <li>• BRI Cabang Kulon Progo</li> <li>• BPD Cabang Kulon Progo</li> <li>• BPR Shinta Putra</li> <li>• 2 Koperasi Pasar</li> <li>• Bank Pasar</li> <li>• LSM</li> <li>• BPS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bappeda Bidang Perekonomian</li> <li>• BPD DIY</li> </ul>

Tabel Lampiran 2. Skema Kredit Formal, Informal dan Program, serta Tahun Mulai Beroperasi di Wilayah Penelitian

No	Nama Program	Tahun mulai	Bunga	Jangka waktu	Jangka cicilan	Persyaratan	Plafon Pinjaman
	<b><i>KREDIT FORMAL Lembaga Keuangan Bank</i></b>						
1	BRI (Kupedes)	*)	24% /tahun merata	1 – 3 tahun	Bulanan	- ≤ Rp. 1 juta tanpa jaminan - Rp. 1 juta surat tanah (Letter C, D, atau sertifikat), BPKB, atau SK pegawai - Surat dari kepala desa	Rp. 25.000 - Rp. 25 juta
2	BPD A.Kredit Investasi dan Modal Kerja  B.Kredit Pensiun, Pegawai, dan Keluarga	A. *)  B. *)	A. 21%/tahun efektif  B. 27% /tahun efektif	A. 2 - 4 tahun  B. 4 tahun	A. bulanan  B. bulanan	A. ≤ Rp. 25 juta: memiliki usaha, sertifikat tanah atau BPKB > Rp. 25 juta: syarat di atas + ijin usaha  B. - Kredit Pensiun: SK Pensiun asli, usia maksimum 73 tahun. - Kredit Pegawai: cicilan maksimal 50% dari gaji bersih - Kredit keluarga: foto copy SK pegawai	A. Minimal Rp. 2,5 juta
3	BNI	*)	t.a.d.	t.a.d.	t.a.d.	t.a.d.	t.a.d.
4	Bank Danamon	*)	t.a.d.	t.a.d.	t.a.d.	t.a.d.	t.a.d.

5	BPR Bank Pasar						
	A. Pinjaman Umum	A. *)	A. 26% per 10 atau 12 bulan	A. 10 atau 12 bulan	A. Bulanan	A. Sertifikat tanah atau BPKB, penduduk Kab. Kulon Progo, mempunyai usaha	A. Rp. 1 juta – Rp. 8 juta
	B. Pinjaman Pegawai	B. *)	B. 21,6%/thn	B. 10, 12, 20, atau 24 bulan	B. Bulanan	B. Pegawai Pemda atau Perusahaan Daerah Kab. Kulon Progo dan SK pegawai	B. Rp. 500.000 – Rp. 3 juta
	C. Pinjaman Kelompok Mikro	C. t.d.a.	C. 24%/tahun	C. 18 bulan	C. Bulanan	C. Kelompok usaha, dan sertifikat tanah atau BPKB	C. Rp. 1 juta per anggota
	D. Pinjaman Pedagang Pasar	D. *)	D. 8%/50 hari	D. 50 hari	D. Harian atau pasaran (5 hari)	D. Pedagang pasar tanpa jaminan	D. Rp. 50.000 – Rp. 500.000

6	BPR Shinta Putra Pengasih (1996)						
	A. Kredit Usaha	A. T.a.d .	A. 1,5% atau 1% per bulan merata, tergantung jangka pinjaman	A. 10 atau 20 minggu	A. Mingguan	A. Mempunyai usaha kecil dan jaminan perabotan rumahtangga	A. Rp. 50.000 – Rp. 500.000
	B. Kredit Perorangan	B. T.a.d .	B. 1,7% - 2,15% per bulan merata, tergantung besar pinjaman	B. 2, 5, 10, atau 25 bulan	B. Bulanan	B. Mempunyai usaha lancar, jaminan sertifikat tanah atau BPKB, surat dari kepala desa	B. Rp. 500.000 – Rp. 30 juta
	C. Kredit Pegawai	C. T.d.a .	C. 1,7% atau 1,85% per bulan merata, tergantung jangka pinjaman	C. 10, 15, 20, 25, 30, 35, atau 40 bulan	C. Bulanan	C. Foto copy SK Pegawai dan rekomendasi dari kantor ybs	C. 60% gaji bersih
	D. Kredit Kelompok	D. T.a.d	D. 1,85% per bulan merata	D. 6 – 18 bulan	D. Bulanan	D. Kelompok usaha yang aktif dan tabungan 20% dari pinjaman sebagai jaminan tanggung renteng	D. Rp. 1 juta per anggota kelompok
E. Kredit Program: - PKM - KMK	E. T.a.d .	E. 1,35% per bulan merata	E. 1 tahun	E. Bulanan	E. Mempunyai usaha	E. - Rp. 600.000 - Rp. 15 juta - Rp. 300.000 - Rp. 15 juta	
7	BKD						
	A. Pinjaman Mingguan	A. *)	A. 7%/10 minggu	A. 10 minggu	A. Mingguan	Penduduk desa ybs dan permohonan pinjaman diketahui kepala desa	Rp. 50.000 – Rp. 750.000
B. Pinjaman <i>Selapanan</i> (35 hari)	B. *)	B. 24% per 10 <i>selapanan</i> (350 hari)	B. 10 <i>selapanan</i>	B. <i>Selapanan</i>			

	<b><i>KREDIT FORMAL Lembaga Keuangan Bukan Bank</i></b>						
8	Pegadaian	*)	2,5% – 3,5% per bulan, tergantung besar pinjaman	4 bulan	Sekaligus saat jatuh tempo	Menggadaikan barang berharga	Rp. 5.000 – Rp. 20 juta, tergantung nilai barang gadaian
9	BUKP A. Kredit Mingguan B. Kredit Bulanan	A. *) B. *)	A. 1%/minggu merata B. 3%/bulan merata	A. 10 atau 20 minggu B. 10, 12, atau 18 bulan	A. Mingguan B. Bulanan	Mempunyai usaha, surat keterangan dari desa, dan kredit >Rp. 500.000 menggunakan jaminan	Rp. 2,5 juta
10	Koppas Karya Makmur A. Pinjaman Harian B. Pinjaman Mingguan	A. *) B. *)	A. 3% per 30 hari kerja + jasa 15% B. 3% per 6 minggu + jasa 15%	A. 30 hari kerja B. 6 minggu	A. Harian B. Mingguan	Pedagang dan menjadi anggota	Rp. 10.000 – Rp. 200.000
11	Koppas Niaga Binangun <sup>2</sup> A. Kredit Harian B. Kredit Mingguan C. Kredit Kios/Los	A. *) B. *) C. **)	A. 5% per 30 hari B. 10% per 10 minggu C. 15% per tahun merata	A. 30 hari B. 10 minggu C. 2,5 tahun	A. Harian B. Mingguan C. Bulanan	A,B. Pedagang di Pasar Wates yang menjadi anggota  C. Pedagang di Pasar Wates yang mempunyai kios/los dan menjadi anggota	A. Rp. 100.000 – Rp. 150.000 B. Lebih besar dari kredit harian C. Rp. 1 – Rp. 15 juta
12	Koperasi Asewa Bentara <sup>1</sup>	*)	1% per bulan	Maksimal 20 bulan	Bulanan	Anggota (1 dusun)	Rp. 100.000 – Rp. 2 juta
13	Koperasi Industri Kerajinan Maju <sup>1</sup>	*)	1,5% per bulan	10 – 12 bulan	Bulanan	Anggota (pengrajin kaleng)	Rp. 1,5 juta
14	KUD Bangun	*)	2% per bulan	55 hari	5 harian	Anggota	Rp. 100.000 – Rp. 200.000

<b>KREDIT INFORMAL</b>							
15	Perkumpulan Tingkat Dusun <sup>2</sup> (Dusun Kedunggong, Desa Wates)	*)	2% per bulan	5 bulan	Bulanan	Anggota (warga satu dusun)	Rp. 100.000 – Rp. 700.000
16	Perkumpulan Tingkat RT (bervariasi antar RT)	*)	2% - 5% per bulan,	1,3, atau 5 bulan	Bulanan atau <i>selapanan</i>	Anggota (warga satu RT)	Rp. 10.000 – Rp. 500.000
17	PKK Kecamatan	*)	2% per bulan	3 dan 5 bulan, tergantung jumlah pinjaman	Bulanan	Anggota	Rp. 75.000 – Rp. 500.000
18	PKK Desa (Kasus di Desa Bendungan)	*)	1% per bulan	5 bulan	Bulanan	Anggota	Rp. 25.000 – Rp. 200.000
19	PKK Dusun	*)	1% - 5% per bulan	1 – 5 bulan	Bulanan	Anggota	Rp. 10.000 – Rp. 200.000
20	PKK RT	*)	1% – 2% per bulan atau <i>selapanan</i>	1 – 5 bulan atau <i>selapanan</i>	Bulanan atau <i>selapanan</i>	Anggota	Rp. 10.000 – Rp. 200.000
21	Dasa Wisma	*)	1% - 5% per bulan atau <i>selapanan</i>	1 – 5 bulan atau <i>selapanan</i>	Bulanan atau <i>selapanan</i>	Anggota	Rp. 10.000 – Rp. 250.000
22	Kelompok Tani Ngudi Luhur <sup>1</sup>	*)	10% per 3 bulan	3 bulan	Bulanan	Anggota	Rp. 100.000 – Rp. 700.000
23	Kelompok DPG	*)	5% per bulan	t.a.d	Bulanan	Anggota	t.a.d
24	Jaringan Kerja	*)	0% - t.a.d.	Tidak tentu, biasanya seminggu	Sekaligus	Dalam suatu jaringan kerja	Tidak tentu bisa sampai jutaan rupiah
25	Kios	*)	0%	Tidak tentu, biasanya seminggu	Sekaligus	Tetangga atau kenalan baik	Tidak tentu, Rp. 3.000 - jutaan rupiah
26	<i>Mindring</i>	*)	Tidak tentu, bisa sampai 100% per 8 bln	Tidak tentu	Harian atau bulanan	Tidak ada	Tidak tentu
27	Perorangan (Tetangga/saudara/kenalan)	*)	0%	Tidak tentu, biasanya 1 bulan	Sekaligus	Tetangga, saudara, atau kenalan	Tidak tentu

	<b>KREDIT PROGRAM</b>						
28	UED-SP A. Pinjaman Mingguan B. Pinjaman Bulanan	A. **) B. **)	A. 5% per 12 minggu B. 12% per 6 bulan	A. 12 minggu B. 6 bulan	A. Mingguan B. Bulanan	Penduduk desa setempat	Rp. 300.000
29	Kukesra	*)	6% per tahun efektif	4 – 16 bulan tergantung tahapan Kukesra	Bulanan	Anggota kelompok UPPKS	Rp. 20.000 – Rp. 320.000, tergantung tahapan Kukesra
30	KPKU	**)	6,5% per tahun merata	1 tahun	Bulanan	Anggota UPPKS yang mempunyai usaha produktif dan mitra usaha	t.a.d.
31	P2KP <sup>2</sup>	**)	1,5% per bulan	18 bulan	Bulanan	Perorangan dan keluarga miskin yang tergabung dalam KSM	Rp. 500.000 – Rp. 12 juta / orang
32	PDM-DKE	**)	10% - 24% per tahun	1 bulan - 1 tahun	Bulanan, <i>selapanan</i> , atau setahun sekali	Diutamakan KPS dan KS-1	Rp. 100.000 – Rp. 2 juta
33	KUT	*)	10,5% per tahun	t.a.d.	Tahunan	Petani padi, palawija, dan hortikultura	Padi: Rp. 2,2 juta/ha Kedele: Rp. 8 juta/ha Bawang merah: Rp. 12 juta/ha Cabe: Rp. 21 juta/ha

Ket: \*) sebelum krisis  
 \*\*) setelah krisis  
 t.a.d. tidak ada data  
 1) hanya terdapat di Desa Bendungan  
 2) hanya terdapat di Desa Wates